



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV

*Balai Pelaksana Penyediaan dan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi III*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga **Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025** ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama periode triwulan tersebut, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas kinerja di masa mendatang.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, serta kontribusi dalam proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas terkait capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan, peningkatan kualitas pelayanan, dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan di periode selanjutnya.

Akhir kata, semoga kerja sama, komitmen, dan semangat perbaikan terus menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas pada periode berikutnya.

Makassar, 2 Januari 2026

Kepala Balai,



BAKHTIAR

NIP. 19711000 200212 1 003



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan, pemograman, penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah.

Dan sebagai wujud dari pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III (Balai P3P Sulawesi III) berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis. Pelaporan kinerja dimaksudkan mengkomunikasikan capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,



maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Rencana Strategis Balai P3P Sulawesi III Tahun 2025-2029. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 20 menyebutkan laporan kinerja dihasilkan dari suatu SAKIP yang diselenggarakan masing-masing identitas pelaporan/akuntansi. Sesuai ketentuan tersebut penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki peran strategis karena dapat memberikan informasi antara lain:

1. Keberhasilan/kegagalan pencapaian output/outcome yang tercantum dalam perencanaan kinerja tahun 2025;
2. Hubungan kinerja dan hasil sumber daya; dan
3. Menjelaskan kinerja dan hasil-hasil yang dicapai.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme, Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang menguatkan integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang juga berimplikasi pada implementasi SAKIP.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

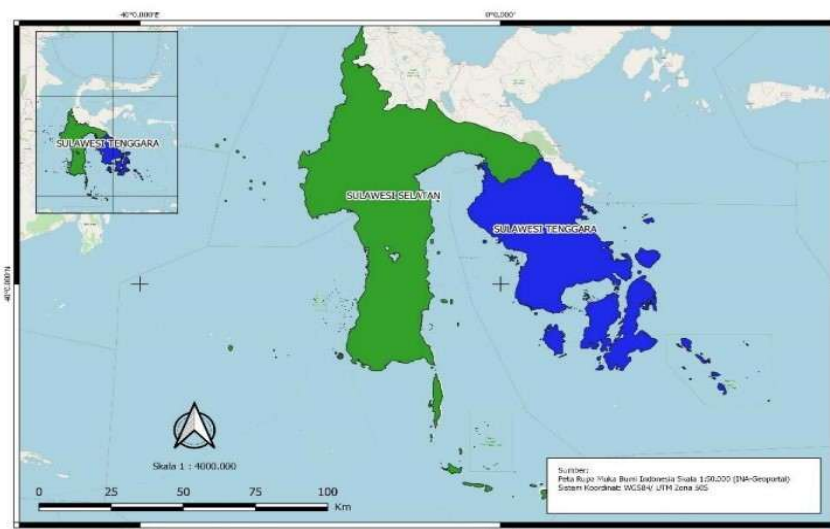
1. Rencana Strategis.
2. Perjanjian Kinerja.
3. Pengukuran Kinerja.
4. Pengelolaan Data Kinerja.

5. Pelaporan Kinerja.
6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai P2P Sulawesi III Triwulan IV Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Balai P3KP Sulawesi III merupakan salah satu unit kerja yang menangani Pembangunan Perumahan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No 1 Tahun 2025 yang merupakan penggabungan dari Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.



Gambar. 1.1 Wilayah Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
(Sumber: Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III)



Berdasarkan Permen PKP Nomor 1 Tahun 2025 Tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III adalah Melaksanakan Penyediaan Perumahan, Peningkatan Kualitas Perumahan, Pengembangan Kawasan Permukiman, penataan Kawasan Permukiman Pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi Serah Terima Aset.

Sebelum terbentuknya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III (BP3KP Sulawesi III) di kenal sebagai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III (BP2P Sulawesi III) dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada awalnya unit teknis penyediaan perumahan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki nomenklatur sebagai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi III yang tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. balai ini dibentuk sebagai unit pelaksana teknis (UPT) yang fokus pada pembangunan perumahan dan prasarana perumahan di daerah masing-masing. Sebelum Tahun 2025 struktur organisasi, tugas, dan fungsi awal balai ini mengacu pada Peraturan Menteri PUPR tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT yang juga mengatur penugasan teknis di tingkat daerah.

Pada tahun 2025, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Peraturan ini mengubah nomenklatur dan struktur organisasi UPT, termasuk balai-balai yang sebelumnya disebut BP2P, menjadi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP). Tujuan perubahan ini adalah untuk menyelaraskan fungsi teknis pelaksanaan perumahan dengan fokus yang lebih luas, yaitu tidak hanya penyediaan rumah tetapi



juga pengembangan kawasan permukiman serta koordinasi penyediaan lahan, PSU, dan rehabilitasi kawasan pasca bencana.

Sedangkan menurut fungsi Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
2. Penyusunan rencana teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
6. pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
7. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
8. pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
10. pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
11. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;



12. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
13. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
14. pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta system pengendalian anti korupsi dan penyusunan; dan
15. pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Secara organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Sulawesi III membawahi 2 (dua) wilayah Satuan Kerja diantaranya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan dan Satuan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara. Adapun susunan Struktur Organisasi yaitu :

1.3.1 Susunan Stuktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

1. Kepala Balai

Kepala Balai mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja. Kepala Balai juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan dengan bawahan dan memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Kasubag Umum dan Tata Usaha

Melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia,



pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik serta layanan hukum balai.

3. Kepala Seksi Pelaksana Wilayah I

- Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
- Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan dan pesisir.

4. Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II

Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan dan pesisir.

5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang terkait pengadaan barang dan jasa serta bertanggung jawab atas segala pengeluaran anggaran belanja.



6. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) mempunyai tugas menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pembayaran. PPSPM juga bertanggung jawab atas keabsahan dokumen tersebut.

7. Bendahara

mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja.

Adapun Untuk 2 (Dua) Satuan Kerja yang membawahi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, yaitu Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.

1. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan

A. Kepala Satuan Kerja mempunyai tugas menyusun DIPA, menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran/ keuangan, menetapkan rencana melaksanakan kegiatan dan rencana penarikan dana, mengawasi pemantauan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan perundang – undangan.

B. PPK Perencanaan/ Pengendalian

bertugas menyusun rencana dan analisa teknis, pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun,



rumah khusus, rumah swadaya, penanganan kawasan permukiman kumuh dan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Provinsi Sulawesi Selatan.

C. PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus

PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus mempunyai tugas melakukan Pelaksanaan kegiatan Rumah Susun dan Rumah Khusus deleniasi perumahan perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan.

D. PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman

PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Rumah Swadaya, Pembangunan PSU di perumahan MBR, Penanganan kumuh pada kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Selatan.

E. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPSM)

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memputugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

F. Bendahara Pengeluaran

Pejabat perbendaharaan negara yang mempunyai tugas melakukan pembayaran atas uang yang ada dalam kewenangannya.

2. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara

A. Kepala Satuan Kerja mempunyai tugas menyusun DIPA, menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran/ keuangan , menetapkan rencana melaksanakan kegiatan dan rencana penarikan dana , mengawasi pemantauan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, menyusun laporan keuangan



dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan perundang – undangan.

B. PPK Perencanaan/ Pengendalian

bertugas menyusun rencana dan analisa teknis, pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, penanganan kawasan permukiman kumuh dan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Provinsi Sulawesi Tenggara.

G. PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman

PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Rumah Swadaya, Pembangunan PSU di perumahan MBR, Penanganan kumuh pada kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.

H. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memputugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

I. Bendahara Pengeluaran

Pejabat perbendaharaan negara yang mempunyai tugas melakukan pembayaran atas uang yang ada dalam kewenangannya.

Untuk lebih melengkapi Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dan 2 (Dua) Satuan Kerja yaitu Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara dapat di lihat pada gambar dibawah ini :



Kawasan Permukiman Sulawesi III



Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar. 1.4 Struktur Organisasi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara



BAB II

CAPAIAN KINERJA

2.1 Target Kinerja Triwulan IV berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja.

Target Kinerja Triwulan IV berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja merupakan tahapan akhir dalam siklus pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan. Pada periode ini, seluruh indikator kinerja yang telah direncanakan sejak awal tahun diharapkan mencapai target kumulatif sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Triwulan IV difokuskan pada penyelesaian seluruh output kegiatan, percepatan realisasi fisik dan keuangan, serta penguatan pengendalian internal untuk menjamin kualitas hasil pekerjaan. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif guna memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan.

Capaian kinerja pada Triwulan IV menjadi indikator utama dalam penilaian kinerja tahunan, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan perencanaan pada tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, pelaksanaan Triwulan IV tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target kuantitatif, tetapi juga pada peningkatan kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Tabel 2.1 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Sulawesi III Dipa Sekretariat Jenderal Tahun 2025

Sasaran Strategis / Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Rencana Aksi	Target PK Revisi	Aktivitas	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya layanan dukungan manajemen								
Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	3 Layanan	3 Layanan	- Belanja Keperluan Perkantoran - Belanja Bahan - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Belanja Jasa Pos dan Giro - Belanja Langganan Listrik - Belanja Langganan Telepon - Belanja Langganan Air - Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	33,97	100,00

				- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Belanja Honor Operasional Satuan Kerja				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas Sasaran Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen diukur melalui indikator Jumlah Layanan Perkantoran dengan target 3 layanan sesuai Rencana Aksi dan PK Revisi. Hingga Triwulan III capaian sebesar 33,97%, sehingga pada Triwulan IV ditargetkan mencapai 100% secara kumulatif. Percepatan dilakukan melalui optimalisasi belanja operasional perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta dukungan administrasi guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Tabel 2.2 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Sekretariat Jenderal Tahun 2025

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	17,78	28,97	40,42	51,61	69,16	81,50	100,00
Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	22,78	33,97	45,42	56,61	74,16	86,50	100,00

Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas rencana pelaksanaan, progres keuangan mulai terealisasi pada bulan Mei sebesar 6,32% dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 100,00% pada bulan Desember. Sejalan dengan itu, progres fisik juga mulai berjalan pada bulan Mei sebesar 11,32% dan terus meningkat secara konsisten setiap bulan hingga mencapai 100,00% pada akhir tahun. Pola ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berlangsung secara progresif sejak semester I dan mengalami percepatan pada Triwulan III dan IV guna memastikan seluruh target kinerja dapat tercapai sesuai rencana.

Tabel 2.3 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025

Sasaran Strategis / Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Rencana Aksi	Target PK Revisi	Aktivitas	TW I	TW II	TW III	TW IV
Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni								
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Terhadap kegiatan bantuan rumah swadaya, dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	0,00	0,00	7,25	100
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan	Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekome ndasi / Laporan	1 Rekomen dasi / Laporan	Melaksanakan Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan	0,00	0,00	7,25	100

Permukiman				dan Kawasan Permukiman				
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman								
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Terhadap kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	0,00	0,00	15,30	100
Jumlah unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	unit	3534 unit	3541 unit	Melaksanakan peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui perbaikan atau peningkatan rumah tidak layak huni menjadi layak huni.	0,00	0,00	4,00	100
Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang di Tangani secara terpadu								
Luas Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	44,94 Ha	44,94 Ha	Peningkatan kualitas kawasan yang tidak layak	0,00	0,00	4,00	100



				huni melalui perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum seperti jalan lingkungan, drainase, sanitasi, dan air minum				
Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman								
Jumlah unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	unit	0 unit	325 unit	Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum seperti jalan lingkungan, drainase, air minum, dan sanitasi guna mendukung terciptanya hunian yang layak, aman, dan nyaman serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan secara berkelanjutan.	0,00	0,00	7,25	100

Sumber: Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 2.3 Berdasarkan Rencana Aksi dan PK Revisi, seluruh sasaran strategis ditargetkan mencapai 100% pada Triwulan IV. Pada sasaran keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran,

pemantauan dan evaluasi, ditargetkan tersusunnya 1 laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan tematik kawasan permukiman serta 1 rekomendasi kebijakan teknis Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan progres Triwulan III masing-masing 7,25%. Pada sasaran meningkatnya ketersediaan rumah layak huni, ditargetkan 3 laporan pemantauan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh (progres 15,30%), serta realisasi 3.541 unit Rumah Swadaya (progres 4,00%). Selanjutnya, penanganan permukiman kumuh seluas 44,94 Ha telah mencapai progres 4,00%, dan pembangunan 325 unit PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman mencapai progres 7,25% pada Triwulan III. Seluruh indikator dipercepat pada Triwulan IV guna memastikan capaian akhir tahun mencapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.4 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	32,50	57,50	100,00
Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	37,50	62,50	100,00

Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas rencana pelaksanaan, realisasi keuangan dan fisik belum menunjukkan perkembangan hingga bulan Agustus. Progres mulai terlihat pada bulan September dengan capaian keuangan sebesar 2,25% dan fisik sebesar 7,25%. Selanjutnya pada Triwulan IV terjadi percepatan signifikan, dimana realisasi keuangan meningkat menjadi 32,50% pada Oktober, 57,50% pada November, dan mencapai 100,00% pada Desember. Progres fisik juga meningkat dari 37,50% pada Oktober menjadi 62,50% pada November,

hingga mencapai 100,00% pada akhir tahun, sebagai bentuk penyelesaian seluruh target kegiatan sesuai rencana.

Tabel 2.5 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025

Sasaran Strategis / Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Rencana Aksi	Target PK Revisi	Aktivitas	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan								
Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekome- dasi / Laporan	1 Rekome- ndasi / Laporan	1 Rekome- dasi / Laporan	Melaksanakan pelaporan kebijakan, strategi, dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	0,00	0,00	10,22	100
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Melaksanakan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	0,00	0,00	20,05	100
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan								

Jumlah Rekomendasi Kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomen dasi / Laporan	1 Rekome ndasi / Laporan	1 Rekomen dasi / Laporan	Melaksanakan pelaporan kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	0,00	0,00	14,23	100
Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	unit	44 unit	44 unit	Melaksanakan pembangunan rumah susun yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan POLRI di wilayah perkotaan.	0,00	0,00	4,00	100
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan								
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomen dasi / Laporan	1 Rekome ndasi / Laporan	1 Rekomen dasi / Laporan	Melaksanakan pelaporan kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	0,00	0,00	13,55	100
Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan yang ditingkatkan kualitasnya	unit	498 unit	490 unit	Melaksanakan peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui perbaikan atau	0,00	0,00	4,00	100

				peningkatan rumah tidak layak huni menjadi layak huni.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 2.5 Berdasarkan Rencana Aksi dan PK Revisi, seluruh sasaran strategis pada penyelenggaraan perumahan perkotaan ditargetkan mencapai 100% pada Triwulan IV. Pada sasaran meningkatnya kinerja keterpaduan dan evaluasi, ditargetkan tersusunnya 1 rekomendasi kebijakan, strategi dan program prioritas (progres Triwulan III sebesar 10,22%) serta 3 laporan pemantauan dan evaluasi (progres 20,05%). Pada sasaran meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni, ditargetkan 1 rekomendasi kebijakan pembangunan perumahan perkotaan (progres 14,23%) serta pembangunan 44 unit rumah susun hunian ASN/TNI/POLRI (progres 4,00%). Selanjutnya, pada sasaran peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan, ditargetkan 1 rekomendasi kebijakan (progres 13,55%) dan peningkatan kualitas 490 unit Rumah Swadaya Perkotaan (progres 4,00%). Seluruh indikator dipercepat pada Triwulan IV untuk memastikan capaian akhir tahun mencapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.6 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	21,44	57,50	100,00
Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	26,44	62,50	100,00

Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2025

Tabel 2.7 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025

Sasaran Strategis / Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Rencana Aksi	Target PK Revisi	Aktivitas	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan								
Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	0,00	0,00	10,00	100,00
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Perumahan Perdesaan	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Melaksanakan Pemantuan dan Evaluasi Perumahan Perdesaan	0,00	0,00	10,00	100,00
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perdesaan								
Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	- Laporan	3 Laporan	Melaksanakan Pemantuan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	0,00	0,00	10,00	100,00
Jumlah Unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	unit	186 unit	175 unit	Melaksanakan peningkatan kualitas hunian masyarakat	0,00	0,00	4,00	100

				berpenghasilan rendah melalui perbaikan atau peningkatan rumah tidak layak huni menjadi layak huni.				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

Sumber: Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2025.

Berdasarkan table 2.7 diatas Pada Tahun Anggaran berjalan, sasaran peningkatan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan dilaksanakan melalui 1 kegiatan koordinasi serta penyusunan 2 laporan pemantauan dan evaluasi yang terealisasi pada Triwulan III dan IV dengan capaian 100% pada akhir tahun. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan, dilaksanakan 3 laporan pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kualitas 175 unit rumah swadaya (revisi dari 186 unit), yang juga mencapai progres 100% pada akhir periode. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target revisi Perjanjian Kinerja dan mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan.

Tabel 2.8 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	32,50	65,50	100,00
Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	37,50	70,50	100,00

Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2025

Berdasarkan table 2.8 diatas rencana penyerapan anggaran dan progres fisik, pelaksanaan kegiatan mulai menunjukkan realisasi pada Triwulan III, dengan capaian keuangan sebesar 5,00% dan fisik 10,00% pada bulan September. Progres meningkat signifikan pada Triwulan IV, dimana realisasi keuangan mencapai 32,50% pada Oktober, 65,50% pada November, dan 100,00% pada Desember, sedangkan capaian fisik mencapai 37,50% pada Oktober, 70,50% pada November, dan 100,00% pada Desember. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran dan seluruh target keuangan maupun fisik dapat diselesaikan secara optimal hingga mencapai 100% pada akhir periode.

Tabel 2.9 Target Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025

Sasaran Strategis / Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Rencana Aksi	Target PK Revisi	Aktivitas	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel								
Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas	Rekomen dasi / Laporan	1 Rekome ndasi / Laporan	1 Rekomen dasi / Laporan	Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas	0,00 %	0,00 %	00,00 %	100%
Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman								
Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomen dasi / Laporan	1 Rekome ndasi / Laporan	1 Rekomen dasi / Laporan	Melakukan Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko	0,00 %	0,00 %	25,05 %	100%

Berdasarkan Tabel 2.9 diatas Pelaksanaan sasaran peningkatan dukungan kebijakan keterbukaan publik dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan Zona Integritas dengan target 1 rekomendasi/laporan yang direncanakan tercapai pada Triwulan IV dengan capaian 100%. Selain itu, dalam rangka meningkatkan dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi, dilakukan penyusunan dan penerapan manajemen risiko dengan target 1 rekomendasi/laporan, dimana progres mulai terlaksana pada Triwulan III sebesar 25,05% dan ditargetkan mencapai 100% pada Triwulan IV. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, serta mendukung pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Tabel 2.10 Target Rencana Keuangan Dan Fisik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Dipa Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025

Rencana	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05	50,25	75,05	100,00
Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	37,50	70,50	100,00

Sumber: Rencana Aksi BP3KP Sulawesi III Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.10 rencana penyerapan anggaran dan capaian fisik kegiatan, realisasi pelaksanaan mulai terlihat pada Triwulan III dengan capaian keuangan sebesar 25,05% pada bulan September, sementara progres fisik masih belum menunjukkan realisasi pada periode tersebut. Memasuki Triwulan IV, pelaksanaan kegiatan mengalami peningkatan yang signifikan, dimana realisasi keuangan mencapai 50,25% pada Oktober, 75,05% pada November, dan 100,00% pada Desember. Sejalan dengan hal tersebut, progres fisik juga meningkat dengan capaian 37,50% pada Oktober, 70,50% pada November, dan mencapai 100,00% pada



Desember, sehingga seluruh target kegiatan baik dari sisi keuangan maupun fisik dapat diselesaikan secara optimal pada akhir tahun anggaran.



2.2 Capaian Kinerja Triwulan BP3KP Sulawesi III.

Sub bab ini menyajikan gambaran mengenai Capaian Target Triwulan IV sebagai hasil evaluasi atas target kinerja yang telah ditetapkan untuk periode Triwulan IV. Analisis ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencapai target yang direncanakan dalam Rencana Aksi Triwulanan. Melalui perbandingan antara target dan realisasi, sub bab ini memberikan informasi mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan, faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang muncul selama periode Triwulan IV, serta menjadi dasar bagi penyempurnaan strategi dan tindak lanjut pada triwulan berikutnya.

Pada Triwulan IV Tahun Anggaran berjalan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman. Secara umum, capaian kinerja pada triwulan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya, baik dari sisi realisasi fisik maupun realisasi keuangan, seiring dengan percepatan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran.

Realisasi kegiatan pada Triwulan IV difokuskan pada penyelesaian pekerjaan konstruksi, penyusunan laporan kegiatan, serta penyelesaian administrasi pelaksanaan program. Berbagai upaya percepatan dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, optimalisasi pengawasan pelaksanaan pekerjaan, serta pemantauan secara berkala terhadap perkembangan kegiatan di lapangan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh target output kegiatan dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.



Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan IV telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung pencapaian target kinerja Balai. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis di lapangan, seperti penyesuaian jadwal pekerjaan dan kondisi operasional tertentu, namun hal tersebut dapat diatasi melalui langkah koordinatif dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, capaian kinerja pada Triwulan IV diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal dalam mendukung peningkatan kualitas hunian layak serta pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan.

2.2.1 Capaian Target Triwulan IV Program Dukungan Manajemen

Capaian target Triwulan IV BP3KP Sulawesi III pada Program Dukungan Manajemen adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11 Capaian Target Kinerja Triwulan IV BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal Kementerian
PKP Tahun Anggaran 2025

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		TARGET PK REVISI	TARGET CAPAIAN TRIWULAN IV	CAPAIAN TARGET TRIWULAN IV		KETERANGAN
				JUMLAH LAPORAN	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen						
1.	Jumlah Laporan Layanan Perkantoran	3 Layanan	100%	3 Layanan	100%	Capaian sesuai target kinerja, mencakup : - Belanja Keperluan Perkantoran - Belanja Barang Operasional Lainnya - Belanja Bahan - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Belanja Jasa Pos dan Giro - Belanja Langganan Listrik - Belanja Langganan Telepon - Belanja Langganan Air - Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - Belanja Pemeliharaan Gedung dan

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		TARGET PK REVISI	TARGET CAPAIAN TRIWULAN IV	CAPAIAN TARGET TRIWULAN IV		KETERANGAN
				JUMLAH LAPORAN	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Bangunan - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Belanja Honor Operasional Satuan Kerja - Belanja Peralatan dan Mesin

Berdasarkan tabel 2.11 diatas Pada Triwulan IV, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan berupa meningkatnya layanan dukungan manajemen. Salah satu indikator kinerja yang diukur adalah Jumlah Laporan Layanan Perkantoran dengan target kinerja revisi sebanyak 3 layanan dan target capaian Triwulan IV sebesar 100%.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, pada Triwulan IV telah terealisasi 1 laporan layanan perkantoran dengan tingkat capaian 100% dari target triwulan, sehingga kinerja pada indikator ini dapat dinyatakan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan dukungan perkantoran telah berjalan dengan baik dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.



Pelaksanaan layanan perkantoran pada periode ini mencakup berbagai komponen belanja operasional yang menunjang kegiatan administrasi dan operasional satuan kerja, antara lain belanja keperluan perkantoran, belanja barang operasional lainnya, belanja bahan, belanja barang persediaan konsumsi, belanja jasa pos dan giro, belanja langganan listrik, telepon, air, serta daya dan jasa lainnya. Selain itu juga meliputi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja honor operasional satuan kerja, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Dengan terlaksananya seluruh komponen layanan tersebut secara optimal, kegiatan layanan perkantoran mampu memberikan dukungan administratif dan operasional yang memadai bagi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Balai, sehingga mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara keseluruhan.

Gambar 2.1 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan IV BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal Kementerian PKP Tahun Anggaran 2025

No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengadaan	Metode	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Progres (%)		Progres Fisik Per Bulan											
												Keu	Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des
1	Operasional Pemeliharaan Kantor	SULAWESI SELATAN	1 Layanan	AU	AU	AU	519.672.000	519.672.000	507.890.723	02-01-2025	31-12-2025	97,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55	50,31	50,31	100,00
2	Langganan Daya dan Jasa	SULAWESI SELATAN	1 Layanan	AU	AU	AU	65.550.000	65.550.000	65.093.818	02-01-2025	31-12-2025	99,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	55,46	65,84	100,00
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	SULAWESI SELATAN	1 Layanan	AU	AU	AU	353.775.000	353.775.000	342.734.295	02-01-2025	31-12-2025	96,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05	90,11	94,64	100,00
4	Honor Operasional Satuan Kerja (Sekretariat Jenderal)	SULAWESI SELATAN	1 Dokumen	AU	AU	AU	38.240.000	38.240.000	38.240.000	02-01-2025	31-12-2025	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25	58,08	58,08	100,00
5	Honor Operasional Satuan Kerja (Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman)	SULAWESI SELATAN	1 Dokumen	AU	AU	AU	25.920.000	25.920.000	25.920.000	02-01-2025	31-12-2025	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6	Honor Operasional Satuan Kerja (Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan)	SULAWESI SELATAN	1 Dokumen	AU	AU	AU	22.640.000	22.640.000	22.640.000	02-01-2025	31-12-2025	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7	Honor Operasional Satuan Kerja (Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan)	SULAWESI SELATAN	1 Dokumen	AU	AU	AU	30.480.000	30.480.000	30.480.000	02-01-2025	31-12-2025	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8	Honor Operasional Satuan Kerja (Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko)	SULAWESI SELATAN	1 Dokumen	AU	AU	AU	22.640.000	22.640.000	22.640.000	02-01-2025	31-12-2025	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL							1.078.917.000	1.078.917.000	1.055.638.836			97,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	59,21	61,32	100,00

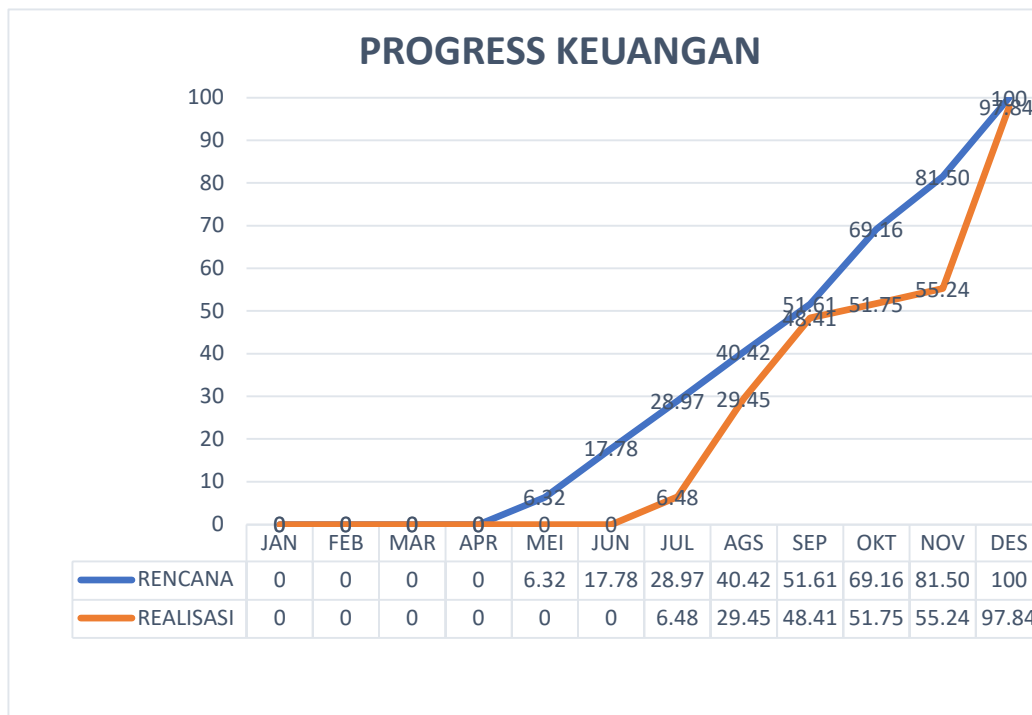
Berdasarkan gambar 2.1 Pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan kegiatan dukungan manajemen yang bertujuan untuk menunjang kelancaran operasional perkantoran serta pelaksanaan program di lingkungan balai. Berdasarkan data realisasi kegiatan, capaian kinerja pada Triwulan IV menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi keuangan sebesar 97,84% dari total pagu anggaran sebesar Rp1.078.917.000, dengan realisasi mencapai Rp1.055.638.836. Sementara itu, realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh target output kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.



Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan beberapa paket kegiatan layanan operasional, antara lain operasional pemeliharaan kantor, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pembayaran honor operasional satuan kerja pada beberapa unit di lingkungan kementerian. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun dan mengalami peningkatan realisasi yang signifikan pada Triwulan IV sebagai periode penyelesaian kegiatan dan penyerapan anggaran.

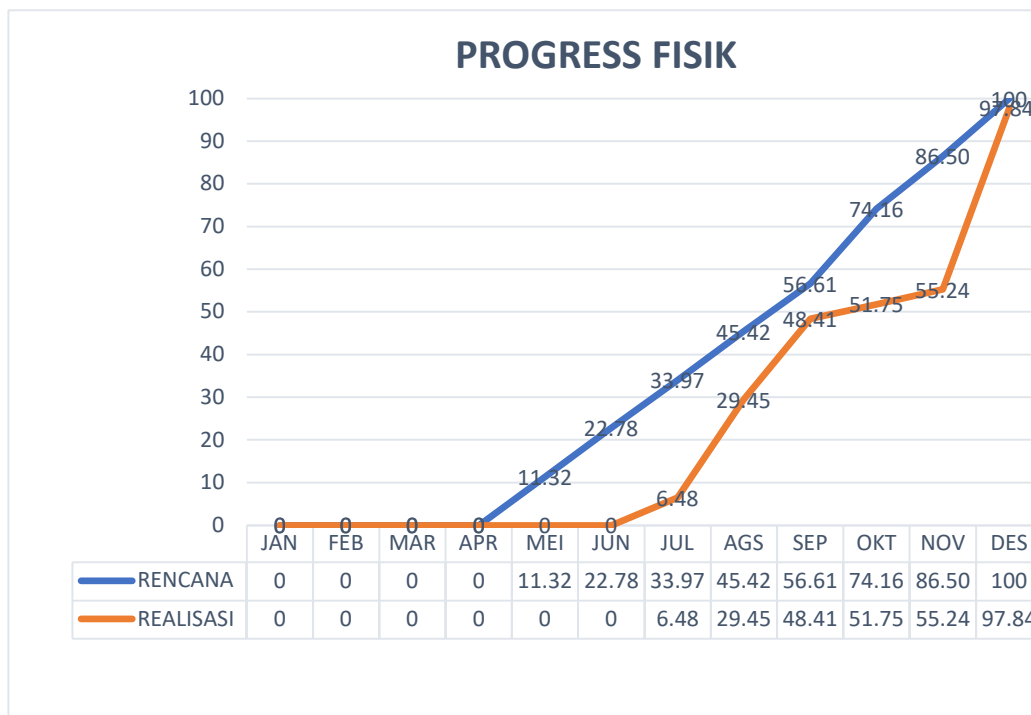
Secara umum, pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV berjalan dengan baik melalui pengelolaan anggaran yang efektif, koordinasi yang intensif, serta pengawasan pelaksanaan kegiatan secara berkala. Dengan tercapainya realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan yang tinggi, kegiatan dukungan manajemen pada Balai telah mampu memberikan dukungan administratif dan operasional yang optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta mendukung pencapaian target kinerja secara keseluruhan.

Gambar 2.2 Grafik Realisasi Keuangan BP3KP Sulawesi III Dipa Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



Berdasarkan gambar 2.2 diatas grafik progress keuangan, realisasi anggaran mulai mengalami peningkatan sejak bulan Juli dan terus meningkat hingga akhir tahun. Sampai dengan bulan Desember, realisasi keuangan mencapai 97,84%, mendekati target rencana sebesar 100%. Meskipun pada beberapa bulan realisasi masih berada di bawah rencana, percepatan penyerapan anggaran pada Triwulan IV mampu meningkatkan capaian secara signifikan sehingga kinerja penyerapan anggaran secara keseluruhan dapat dikategorikan sangat baik dan mendukung penyelesaian seluruh kegiatan yang telah direncanakan.

Gambar 2.3 Grafik Realisasi Fisik BP3KP Sulawesi III Dipa Sekretariat Jenderal
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



Berdasarkan Gambar 2.3 diatas Progress fisik menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan pada awal hingga pertengahan tahun, dengan realisasi baru mulai terlihat pada bulan Juli. Meskipun sempat tertinggal dari rencana, terjadi percepatan signifikan pada semester kedua sehingga realisasi mencapai 97,84% pada akhir tahun dan mendekati target 100%.

Table 2.12 Target Kinerja Triwulan IV BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		TARGET PK REVISI	TARGET CAPAIAN TRIWULAN IV	CAPAIAN TARGET TRIWULAN IV		KETERANGAN
				JUMLAH LAPORAN	%	
No.	(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh						
1.	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	Capaian sesuai target kinerja, mencakup : - Belanja Bahan - Belanja Sewa - Belanja Jasa Profesi - Belanja Perjalanan Dinas Biasa
2.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	100%	1 Rekomendasi Kebijakan	100%	Capaian sesuai target kinerja, mencakup : - Belanja Bahan - Belanja Sewa - Belanja Jasa Profesi - Belanja Perjalanan Dinas Biasa



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		TARGET PK REVISI	TARGET CAPAIAN TRIWULAN IV	CAPAIAN TARGET TRIWULAN IV		KETERANGAN
				JUMLAH LAPORAN	%	
No.	(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	3 Laporan	100%	3 Laporan	100%	Capaian sesuai target kinerja, mencakup : - Belanja Perjalanan Dinas Biasa
4.	Jumlah unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	3.541 unit	100%	3.541 unit	100%	Capaian sesuai target kinerja, mencakup : - Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah
5.	Luas Penanganan Permukiman Kumuh	44,94 Hectar	100%	20,89 Hectar	46,48%	Capaian sesuai target kinerja, mencakup : - Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		TARGET PK REVISI	TARGET CAPAIAN TRIWULAN IV	CAPAIAN TARGET TRIWULAN IV		KETERANGAN
				JUMLAH LAPORAN	%	
No.	(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	Jumlah unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	325 unit	100%	325 unit	100%	Capaian sesuai target kinerja, mencakup : - Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda

Berdasarkan Table 2.12 Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh secara umum telah terealisasi dengan baik pada Triwulan IV. Sebagian besar indikator kinerja berhasil mencapai target 100%, antara lain penyusunan laporan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan tematik, penyusunan rekomendasi kebijakan teknis melalui klinik perumahan, serta pelaporan pembangunan rumah susun, peningkatan kualitas, dan penanganan kawasan kumuh. Selain itu, realisasi peningkatan rumah swadaya di kawasan permukiman sebanyak 3.541 unit serta pembangunan PSU perumahan dan kawasan permukiman sebanyak 325 unit juga telah tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Namun demikian, terdapat satu indikator yang belum mencapai target optimal, yaitu luas penanganan permukiman kumuh yang hanya terealisasi sebesar 20,89 hektar dari target 44,94 hektar atau sebesar 46,48%. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan telah berjalan efektif dan sesuai rencana, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan kinerja khususnya dalam percepatan penanganan luas kawasan permukiman kumuh agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal pada periode berikutnya.

Gambar 2.4 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan IV BP3KP Sulawesi III DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025

No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengadaan	Metode	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Progres (%)		Progres Fisik Per Bulan											
												Keu	Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	SULAWESI SELATAN	1 Dokumen	AU	AU	AU	123.246.000	123.246.000	119.829.392	02-01-2025	31-12-2025	97,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95	61,97	72,11	100,00
2	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	SULAWESI SELATAN	1 Dokumen	AU	AU	AU	365.140.000	365.140.000	362.419.235	02-01-2025	31-12-2025	99,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88	52,78	87,97	100,00
3	Kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	SULAWESI SELATAN	1 Dokumen	AU	AU	AU	50.000.000	50.000.000	43.250.591	02-01-2025	31-12-2025	86,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86	100,00
TOTAL							538.388.000	538.388.000	525.499.218			97,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	49,98	79,41	100,00

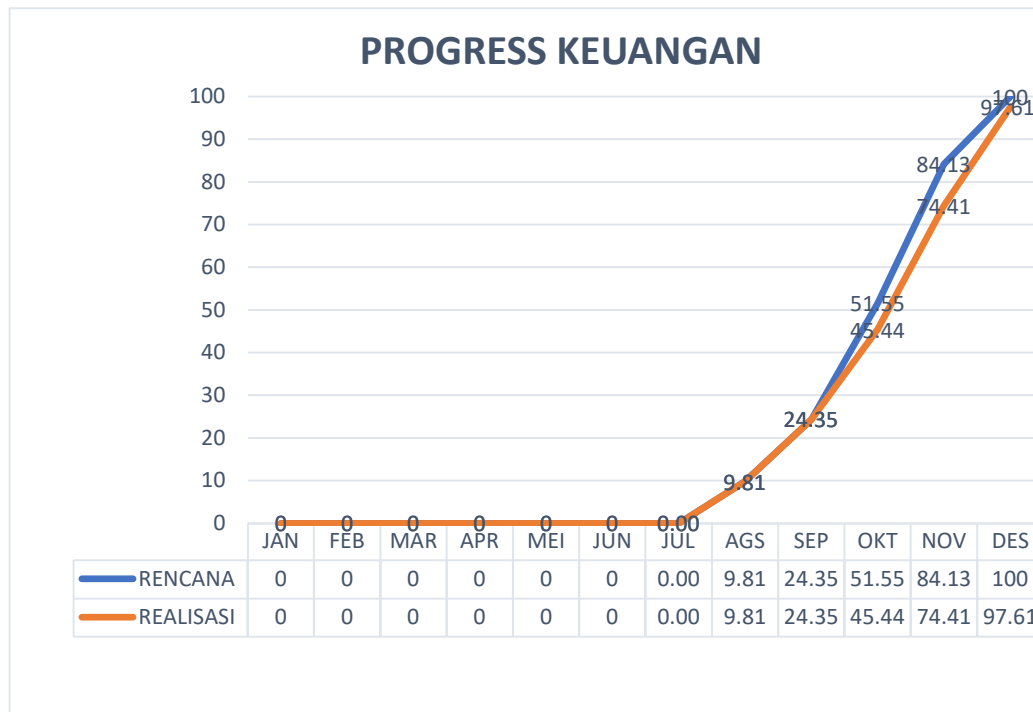
Berdasarkan gambar 2.4 diatas data capaian kegiatan, seluruh paket pekerjaan yang dilaksanakan di wilayah Sulawesi Selatan menunjukkan kinerja yang sangat baik pada Triwulan IV Tahun 2025. Secara keseluruhan, progres fisik seluruh kegiatan telah mencapai 100%, dengan progres keuangan sebesar 97,61% dari total pagu anggaran sebesar Rp538.388.000, dimana realisasi anggaran mencapai Rp525.499.218.



Setiap paket kegiatan, yaitu pemantauan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, pemantauan dan evaluasi pembangunan rusun serta penanganan kumuh, serta penyusunan kebijakan teknis klinik perumahan, telah terlaksana sesuai target fisik. Progres keuangan masing-masing kegiatan juga tergolong tinggi, yaitu sebesar 97,23%, 99,25%, dan 86,50%.

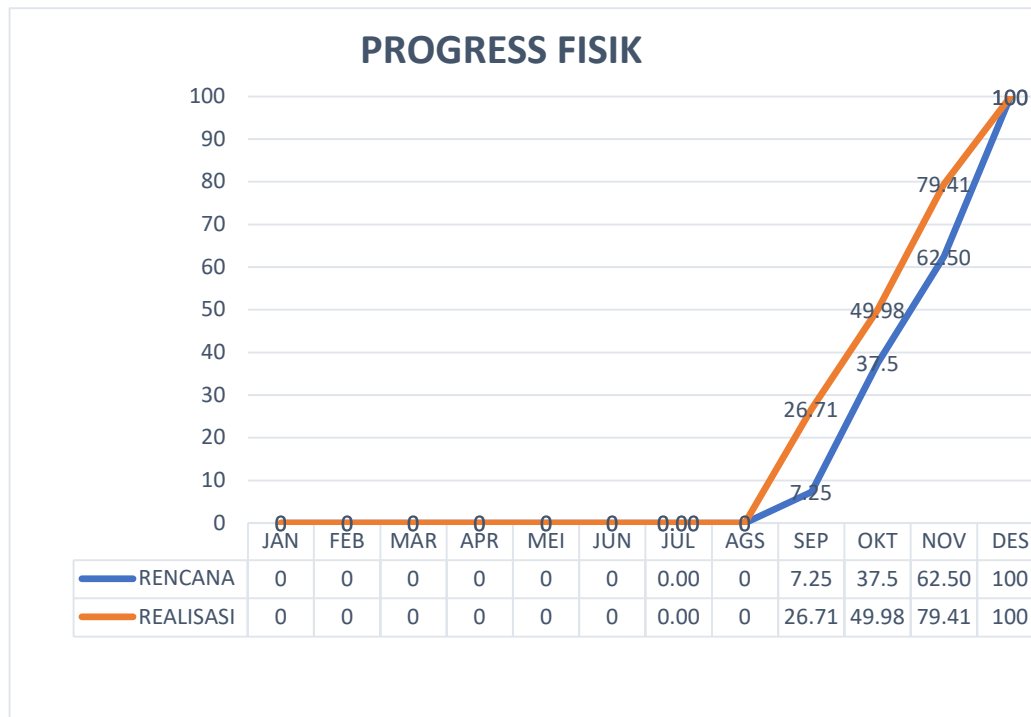
Realisasi kegiatan secara umum mulai menunjukkan perkembangan signifikan pada triwulan III hingga triwulan IV, dengan peningkatan progres fisik yang cukup pesat hingga mencapai 100% pada akhir tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, baik dari aspek fisik maupun keuangan.

Gambar 2.5 Grafik Realisasi Keuangan BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



Berdasarkan Gambar 2.4 diatas Grafik progres keuangan DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menunjukkan bahwa realisasi anggaran mengalami peningkatan signifikan pada paruh kedua tahun, setelah pada periode Januari hingga Juli belum terdapat realisasi. Mulai Agustus, realisasi mencapai 9,81% dan terus meningkat hingga September sebesar 24,35%, kemudian melonjak pada Oktober dan November masing-masing menjadi 45,44% dan 74,41%, meskipun masih sedikit di bawah rencana. Pada akhir tahun, realisasi mencapai 97,61% dari target 100%, sehingga secara keseluruhan kinerja keuangan tergolong baik dengan tren peningkatan yang kuat, meskipun terdapat sedikit deviasi terhadap rencana pada triwulan akhir.

Gambar 2.6 Grafik Realisasi Fisik BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



Berdasarkan Gambar 2.6 diatas memperlihatkan bahwa selama periode Januari hingga Agustus belum terdapat progres pekerjaan yang tercatat (0%), yang mengindikasikan bahwa kegiatan fisik proyek belum dimulai atau masih dalam tahap persiapan, kemudian memasuki bulan September mulai terjadi akselerasi yang signifikan dengan realisasi mencapai 26,71% yang jauh melampaui rencana sebesar 7,25%, menunjukkan kinerja pelaksanaan yang lebih cepat dari target, tren positif ini terus berlanjut pada bulan Oktober di mana realisasi meningkat menjadi 49,98% dibandingkan rencana 37,5%, serta pada bulan November realisasi kembali unggul dengan capaian 79,41% dibandingkan rencana 62,50%, hingga akhirnya pada bulan Desember baik rencana maupun realisasi mencapai 100% yang menandakan bahwa seluruh pekerjaan telah diselesaikan sepenuhnya sesuai target waktu, sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kegiatan berjalan dengan sangat baik



karena realisasi tidak hanya mengikuti rencana tetapi juga secara konsisten melampauinya sejak awal pelaksanaan hingga selesai.

Tabel 2.13 Target Kinerja Triwulan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		TARGET PK REVISI	TARGET CAPAIAN TRIWULAN IV	CAPAIAN TARGET TRIWULAN IV		KETERANGAN
				JUMLAH LAPORAN	%	
No.	(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kualitas Rumah Layak Huni di Perkotaan						
1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%	1 Rekomendasi Kebijakan	100%	Capaian sesuai target kinerja, mencakup : - Belanja Bahan - Belanja Sewa - Belanja Jasa Profesi - Belanja Perjalanan Dinas Biasa
2.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3 Laporan	100%	3 Laporan	100%	Capaian sesuai target kinerja, mencakup : - Belanja Bahan - Belanja Sewa - Belanja Jasa Profesi - Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		TARGET PK REVISI	TARGET CAPAIAN TRIWULAN IV	CAPAIAN TARGET TRIWULAN IV		KETERANGAN
				JUMLAH LAPORAN	%	
No.	(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%	1 Rekomendasi Kebijakan	100%	Capaian sesuai target kinerja, mencakup : - Belanja Bahan - Belanja Sewa - Belanja Perjalanan Dinas Biasa
4.	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	44 Unit	100%	28 Unit	63,63%	Capaian sesuai target kinerja, mencakup : - Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%	1 Rekomendasi Kebijakan	100%	Capaian sesuai target kinerja, mencakup : - Belanja Sewa - Belanja Jasa Profesi - Belanja Perjalanan Dinas Biasa
6.	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan yang ditingkatkan kualitasnya	490 Unit	100%	490 Unit	100%	Capaian sesuai target kinerja, mencakup : - Belanja Barang untuk Bantuan lainnya yang

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		TARGET PK REVISI	TARGET CAPAIAN TRIWULAN IV	CAPAIAN TARGET TRIWULAN IV		KETERANGAN
				JUMLAH LAPORAN	%	
No.	(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah

Berdasarkan Table 2.13 diatas Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas rumah layak huni di perkotaan secara umum telah menunjukkan hasil yang optimal, dimana sebagian besar indikator telah mencapai target 100% pada Triwulan IV. Indikator terkait penyusunan rekomendasi kebijakan, strategi, serta program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan, termasuk pemantauan dan evaluasi, seluruhnya terealisasi sesuai target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh penggunaan anggaran yang mencakup belanja bahan, sewa, jasa profesi, serta perjalanan dinas. Selain itu, peningkatan kualitas rumah swadaya perkotaan juga berhasil direalisasikan sepenuhnya sebanyak 490 unit.

Namun demikian, terdapat satu indikator yang belum mencapai target optimal, yaitu pembangunan rumah susun hunian bagi ASN/TNI/POLRI yang hanya terealisasi sebanyak 28 unit dari target 44 unit atau sebesar 63,63%. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan telah berjalan baik, meskipun masih diperlukan upaya percepatan pada pembangunan rumah susun agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara maksimal di periode berikutnya.

Gambar 2.7 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan IV BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan
Perkotaan Tahun 2025

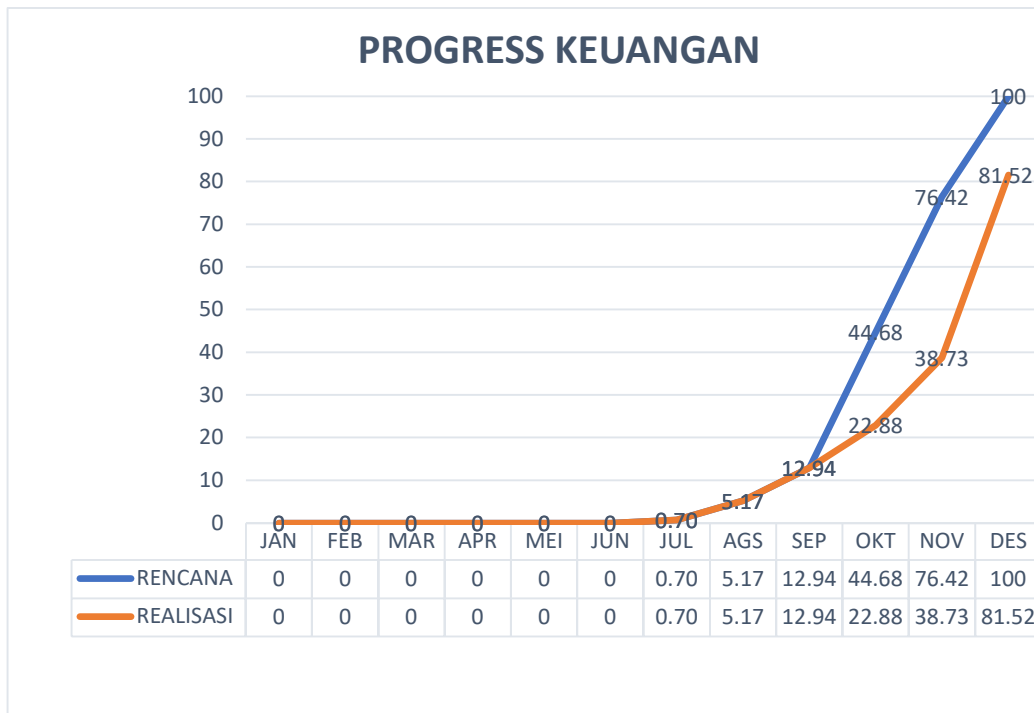
No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengadaan	Metode	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Progres (%)		Progres Fisik Per Bulan											
												Keu	Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des
1	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Pusat dan Daerah	SULAWESI SELATAN	1 Dokumen	AU	AU	AU	380.618.000	380.618.000	321.577.007	02-01-2025	31-12-2025	84,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	34,84	48,14	100,00
2	Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Perkotaan	SULAWESI SELATAN	1 Dokumen	AU	AU	AU	171.235.000	171.235.000	144.819.223	02-01-2025	31-12-2025	84,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23	20,98	37,96	100,00
3	Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	SULAWESI SELATAN	1 Dokumen	AU	AU	AU	312.470.000	312.470.000	235.590.697	02-01-2025	31-12-2025	75,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55	21,37	24,98	100,00
4	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	SULAWESI SELATAN	1 Dokumen	AU	AU	AU	276.900.000	276.900.000	228.383.306	02-01-2025	31-12-2025	82,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	24,01	55,36	100,00
TOTAL							1.141.223.000	1.141.223.000	930.370.233			81,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	26,44	42,02	100,00

Berdasarkan Gambar 2.7 diatas menunjukkan bahwa terdapat empat kegiatan yang seluruhnya memiliki target progres fisik 100% dan berhasil dicapai pada akhir tahun, dengan periode pelaksanaan dari 2 Januari hingga 31 Desember 2025. Secara keuangan, total pagu anggaran sebesar Rp1.141.223.000 dengan realisasi mencapai Rp930.370.233 atau sekitar 81,52%, yang mengindikasikan efisiensi penggunaan anggaran. Perkembangan fisik tiap paket mulai terlihat signifikan pada triwulan akhir, khususnya dari bulan



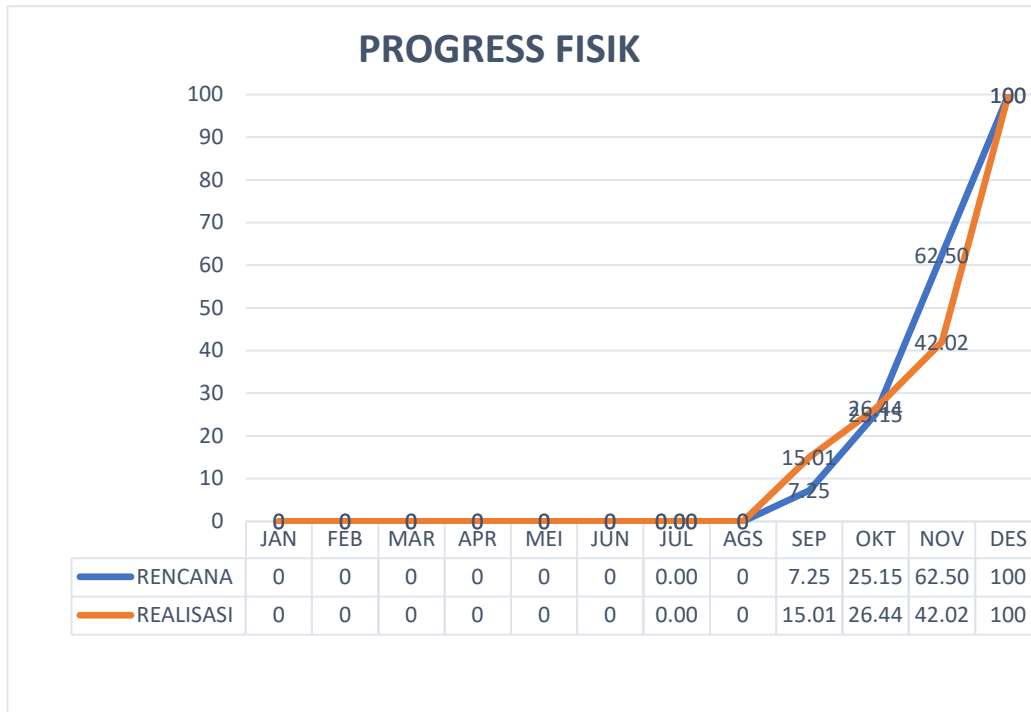
September hingga Desember, di mana progres meningkat bertahap hingga mencapai 100%. Paket pertama menunjukkan lonjakan progres dari 20,05% pada September menjadi 100% di Desember, paket kedua dari 14,23% menjadi 100%, paket ketiga dari 13,55% menjadi 100%, dan paket keempat dari 10,22% menjadi 100%. Secara keseluruhan, seluruh kegiatan terlaksana dengan baik dan selesai tepat waktu, meskipun realisasi keuangan masih berada di bawah pagu anggaran yang tersedia.

Gambar 2.8 Grafik Realisasi Keuangan BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



Berdasarkan Gambar 2.8 diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran mulai bergerak sejak bulan Juli dengan capaian awal sebesar 0,70% yang sesuai dengan rencana, kemudian meningkat secara bertahap pada Agustus (5,17%) dan September (12,94%) masih sejalan dengan target, namun mulai terjadi deviasi pada bulan Oktober ketika realisasi hanya mencapai 22,88% dibandingkan rencana 44,68%, dan selisih ini berlanjut pada November dengan realisasi 38,73% di bawah rencana 76,42%, hingga pada akhir tahun bulan Desember realisasi keuangan mencapai 81,52% sementara rencana ditargetkan 100%, sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi peningkatan penyerapan anggaran secara konsisten pada semester akhir, realisasi keuangan tidak mampu mengejar target yang telah direncanakan dan berakhir dengan capaian yang masih di bawah rencana.

Gambar 2.9 Grafik Realisasi Fisik BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



Berdasarkan Gambar 2.9 diatas menunjukkan bahwa pekerjaan belum dimulai dari Januari hingga Agustus (0%), kemudian mulai berjalan pada September dengan realisasi (15,01%) melampaui rencana (7,25%) dan masih sedikit di atas target pada Oktober (26,44% dibanding 25,15%), namun pada November terjadi keterlambatan cukup signifikan karena realisasi (42,02%) berada di bawah rencana (62,50%), sebelum akhirnya pada Desember progres berhasil dikejar hingga mencapai 100% sesuai target, sehingga secara keseluruhan proyek tetap selesai tepat waktu meskipun sempat mengalami deviasi di tengah periode.

Tabel 2.14 Target Kinerja Triwulan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		TARGET PK REVISI	TARGET CAPAIAN TRIWULAN IV	CAPAIAN TARGET TRIWULAN IV		KETERANGAN
				JUMLAH LAPORAN	%	
No.	(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kualitas Rumah Layak Huni di Perdesaan						
1.	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	100%	Capaian sesuai target kinerja, mencakup : - Belanja Bahan - Belanja Sewa - Belanja Jasa Profesi - Belanja Perjalanan Dinas Biasa
2.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Perumahan Perdesaan	2 Laporan	100%	2 Laporan	100%	Capaian sesuai target kinerja, mencakup : - Belanja Bahan - Belanja Sewa - Belanja Jasa Profesi - Belanja Perjalanan Dinas Biasa



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		TARGET PK REVISI	TARGET CAPAIAN TRIWULAN IV	CAPAIAN TARGET TRIWULAN IV		KETERANGAN
				JUMLAH LAPORAN	%	
No.	(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	3 Laporan	100%	3 Laporan	100%	Capaian sesuai target kinerja, mencakup : - Belanja Perjalanan Dinas Biasa
4.	Jumlah Unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	175 unit	100%	175 unit	100%	Capaian sesuai target kinerja, mencakup : - Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah.

Berdasarkan Table 2.14 diatas Pada Triwulan IV, seluruh sasaran kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas rumah layak huni di perdesaan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari seluruh indikator, yaitu jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan (1 kegiatan), laporan pemantauan dan evaluasi (2 laporan), kegiatan pemantauan dan evaluasi peningkatan kualitas perumahan perdesaan (3 laporan), serta jumlah unit rumah swadaya (175 unit), yang semuanya mencapai realisasi 100%. Capaian ini didukung oleh berbagai komponen belanja seperti belanja bahan, sewa,

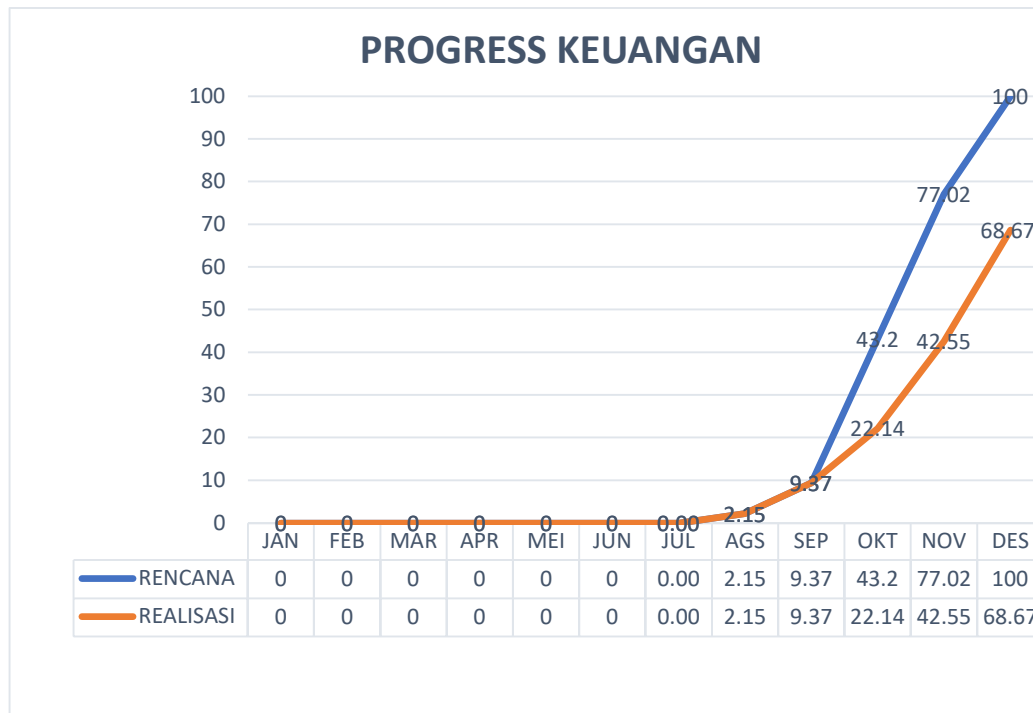
jasa profesi, perjalanan dinas biasa, serta bantuan pemerintah untuk rumah swadaya, sehingga secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan berjalan optimal dan sesuai dengan perencanaan.

Gambar 2.10 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan IV BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan
Perdesaan Tahun 2025

No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengadaan	Metode	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Progres (%)		Progres Fisik Per Bulan											
												Keu	Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Pusat dan Daerah	SULAWESI SELATAN	1 Dokumen	AU	AU	AU	227.394.000	227.394.000	132.857.184	01-05-2025	31-12-2025	58,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55	27,14	38,06	100,00
2	Pemantauan dan Evaluasi BSPS	SULAWESI SELATAN	1 Dokumen	AU	AU	AU	113.074.000	113.074.000	100.934.647	02-01-2025	31-12-2025	89,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63	100,00
TOTAL							340.468.000	340.468.000	233.791.831			68,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	18,13	47,55	100,00

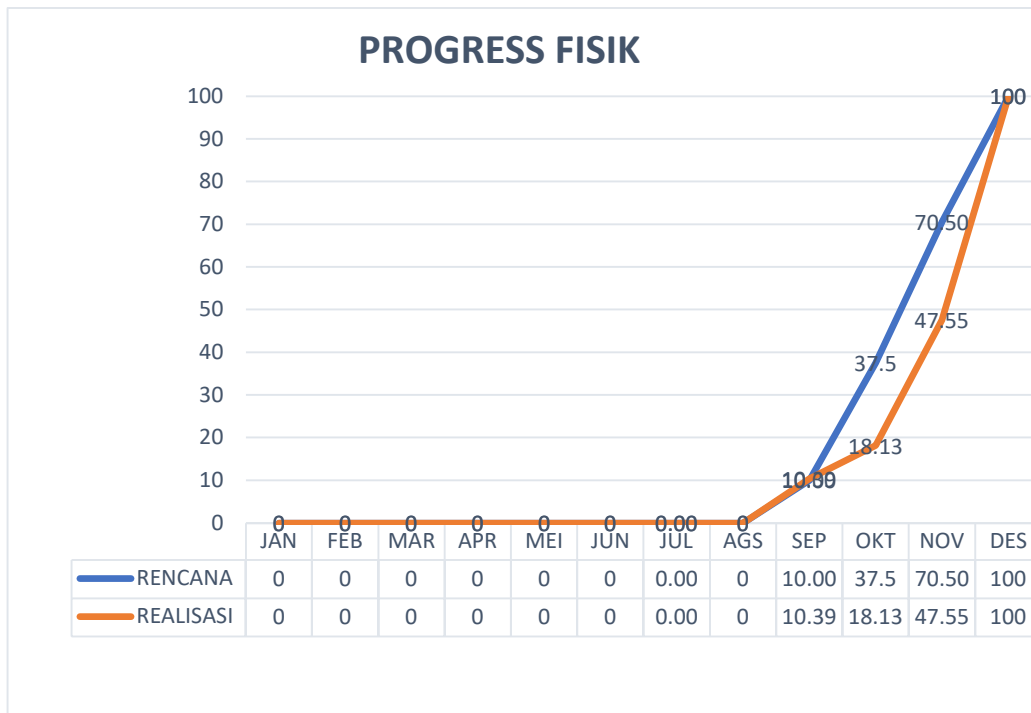
Berdasarkan Gambar 2.10 diatas Realisasi pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja fisik telah mencapai 100% pada akhir periode, dengan capaian keuangan sebesar 68,67% dari total pagu anggaran Rp340.468.000 atau terealisasi Rp233.791.831. Paket kegiatan “Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Pusat dan Daerah” mencatat progres keuangan 58,43% dengan realisasi Rp132.857.184, sementara progres fisik meningkat signifikan mulai September (15,55%), Oktober (27,14%), November (38,06%), hingga mencapai 100% pada Desember. Sementara itu, kegiatan “Pemantauan dan Evaluasi BSPS” menunjukkan kinerja keuangan yang lebih tinggi yaitu 89,26% dengan realisasi Rp100.934.647, dengan progres fisik yang relatif stabil dan mencapai 66,63% pada November sebelum tuntas 100% pada Desember. Secara umum, meskipun terdapat perbedaan capaian keuangan antar kegiatan, seluruh target fisik berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Gambar 2.11 Grafik Realisasi Keuangan BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



Berdasarkan Gambar 2.11 diatas menunjukkan bahwa penyerapan anggaran mulai terjadi pada bulan Agustus sebesar 2,15% dan masih sesuai dengan rencana hingga September di angka 9,37%. Namun, pada bulan Oktober hingga November realisasi keuangan tertinggal cukup jauh dibandingkan rencana, yaitu hanya mencapai 22,14% dari target 43,20% pada Oktober dan 42,55% dari target 77,02% pada November. Hingga akhir Desember, realisasi keuangan tercatat sebesar 68,67%, masih di bawah target rencana sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan adanya keterlambatan dalam penyerapan anggaran meskipun secara bertahap mengalami peningkatan, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi keuangan di akhir periode.

Gambar 2.12 Grafik Realisasi Fisik BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



Berdasarkan Gambar 2.12 diatas Grafik “Progress Fisik” menunjukkan bahwa tidak ada perkembangan dari Januari hingga Agustus, kemudian pekerjaan mulai berjalan pada September dengan realisasi (10,39%) sedikit melampaui rencana (10%). Namun pada Oktober dan November terjadi keterlambatan cukup signifikan, di mana realisasi (18,13% dan 47,55%) berada di bawah rencana (37,5% dan 70,5%). Meskipun demikian, pada Desember proyek berhasil mengejar ketertinggalan dan mencapai 100% sesuai rencana, sehingga secara keseluruhan pekerjaan tetap selesai tepat waktu meski sempat tertunda di tengah periode.

Tabel 2.15 Target Kinerja Triwulan DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		TARGET PK REVISI	TARGET CAPAIAN TRIWULAN IV	CAPAIAN TARGET TRIWULAN IV		KETERANGAN
				JUMLAH LAPORAN	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel						
1.	Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan / Laporan	100%	1 Rekomendasi Kebijakan / Laporan	100%	Capaian sesuai target kinerja, mencakup : - Belanja Bahan - Belanja Sewa - Belanja Jasa Profesi - Belanja Perjalanan Dinas Biasa
2.	Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan / Laporan	100%	1 Rekomendasi Kebijakan / Laporan	100%	Capaian sesuai target kinerja, mencakup : - Belanja Bahan - Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Belanja Sewa - Belanja Jasa Profesi

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		TARGET PK REVISI	TARGET CAPAIAN TRIWULAN IV	CAPAIAN TARGET TRIWULAN IV		KETERANGAN
				JUMLAH LAPORAN	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						- Belanja Perjalanan Dinas Biasa

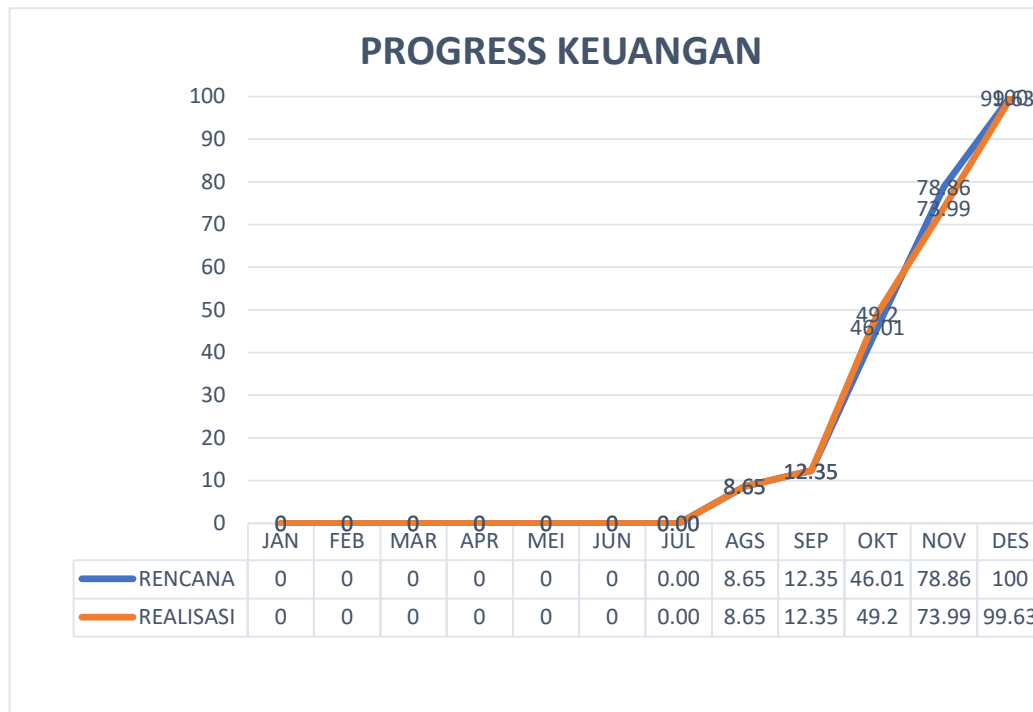
Berdasarkan Table 2.15 diatas Pada Triwulan IV, capaian kinerja kegiatan yang berfokus pada peningkatan dukungan kebijakan keterbukaan publik dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman telah mencapai target yang ditetapkan. Indikator jumlah kebijakan keterbukaan publik, transparansi, dan akuntabilitas terealisasi sebanyak 1 rekomendasi kebijakan/laporan (100%), sesuai dengan target, dengan dukungan komponen belanja seperti bahan, sewa, jasa profesi, dan perjalanan dinas. Demikian pula, indikator kebijakan manajemen risiko dan pencegahan korupsi juga berhasil mencapai 1 rekomendasi kebijakan/laporan (100%), sesuai target, yang didukung oleh belanja bahan, barang non operasional lainnya, sewa, jasa profesi, serta perjalanan dinas biasa. Secara keseluruhan, seluruh indikator pada kegiatan ini menunjukkan kinerja optimal dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Gambar 2.12 Progres Fisik dan Keuangan Triwulan IV BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025

No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengadaan	Metode	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Progres (%)		Progres Fisik Per Bulan											
												Keu	Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Penerapan Manajemen Risiko	SULAWESI SELATAN	1 Dokumen	AU	AU	AU	174.233.000	174.233.000	171.973.995	02-01-2025	31-12-2025	98,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87	80,75	100,00
2	Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP Sulawesi III	SULAWESI SELATAN	1 Dokumen	AU	AU	AU	129.233.000	129.233.000	130.378.132	02-01-2025	31-12-2025	100,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	69,47	85,50	100,00
TOTAL							303.466.000	303.466.000	302.352.127			99,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39	54,20	82,77	100,00

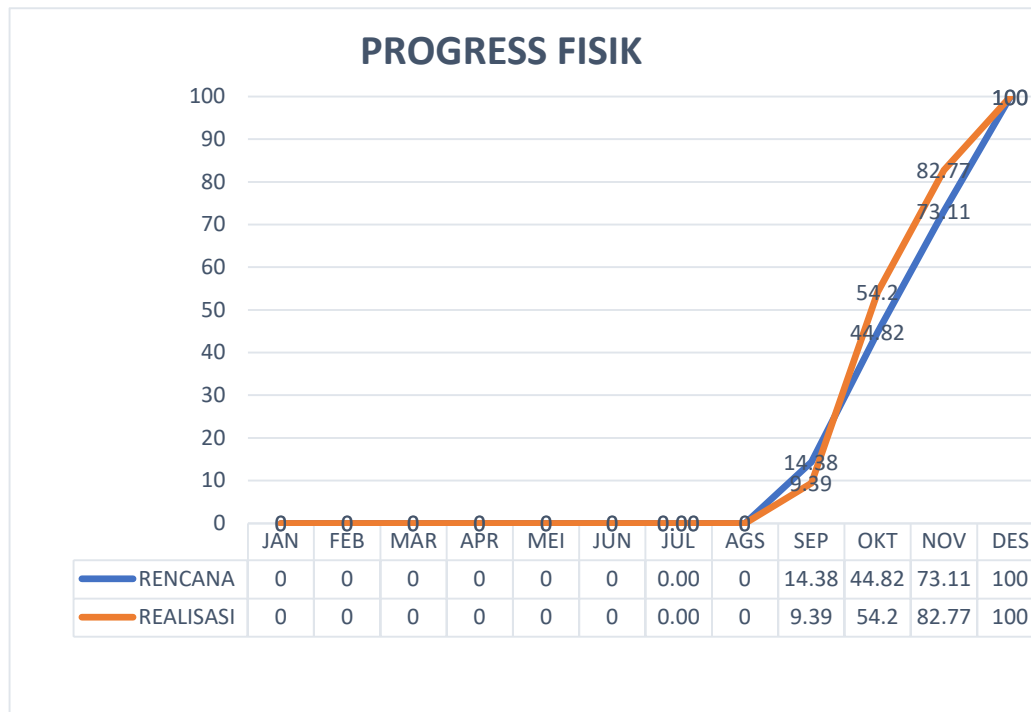
Berdasarkan Gambar 2.12 diatas capaian kegiatan, terdapat dua paket pekerjaan yaitu Penerapan Manajemen Risiko dan Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP Sulawesi III yang seluruhnya berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan output masing-masing 1 dokumen. Secara keseluruhan, realisasi anggaran mencapai Rp302.352.127 dari pagu Rp303.466.000 dengan progres keuangan sebesar 99,63% dan progres fisik telah mencapai 100%. Masing-masing paket menunjukkan kinerja yang sangat baik, di mana progres keuangan mencapai 98,70% dan 100,89%, serta progres fisik keduanya telah selesai 100% pada akhir Desember 2025. Perkembangan fisik mulai terlihat pada triwulan akhir, dengan peningkatan signifikan sejak September hingga Desember hingga seluruh kegiatan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Gambar 2.13 Grafik Realisasi Keuangan BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko



Berdasarkan Gambar 2.13 diatas grafik “Progress Keuangan” menunjukkan bahwa baik rencana maupun realisasi anggaran belum mengalami pergerakan dari Januari hingga Juli (0%), kemudian mulai meningkat pada Agustus sebesar 8,65% dan terus naik pada September menjadi 12,35%. Pada Oktober terjadi lonjakan signifikan, dengan rencana mencapai 46,01% dan realisasi sedikit lebih tinggi di 49,2%. Tren peningkatan berlanjut pada November, meskipun realisasi (73,99%) sedikit di bawah rencana (78,86%). Pada akhir tahun, Desember, kedua nilai hampir mencapai target penuh, dengan rencana sebesar 100% dan realisasi mendekati di 99,63%, menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang sangat baik meskipun sempat terjadi selisih kecil pada bulan-bulan akhir.

Gambar 2.14 Grafik Realisasi Fisik BP3KP Sulawesi III Dipa Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko



Berdasarkan Gambar 2.14 diatas grafik “Progress Fisik” menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan belum mengalami kemajuan dari Januari hingga Agustus (0%), kemudian mulai bergerak pada September dengan capaian rencana sebesar 14,38% dan realisasi masih di bawahnya yaitu 9,39%. Pada Oktober terjadi percepatan signifikan, di mana realisasi (54,2%) melampaui rencana (44,82%), dan tren positif ini berlanjut pada November dengan realisasi mencapai 82,77%, lebih tinggi dibanding rencana 73,11%. Pada akhir periode, Desember, baik rencana maupun realisasi sama-sama mencapai 100%, yang menandakan bahwa seluruh target fisik berhasil diselesaikan secara optimal meskipun sempat terjadi keterlambatan di awal pelaksanaan.

2.3 Permasalahan/ Faktor Keberhasilan

2.3.1 Permasalahan pelaksanaan kegiatan BP3KP Sulawesi III

Secara umum permasalahan pelaksanaan kegiatan selama Triwulan IV yang dihadapi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III adalah sebagai berikut:

1. Timbulnya kendala dalam proses pembangunan rumah susun;
2. Komitmen pimpinan dan pegawai dalam penerapan manajemen risiko rendah atau tidak konsisten;
3. ketidaktepatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran;
4. Verifikasi data usulan kegiatan BSPS di delineasi wilayah perkotaan dan perdesaan mengalami hambatan;
5. Komitmen pimpinan dan pegawai dalam pembangunan ZI menurun atau tidak konsisten;
6. ketidaktertiban dalam pencatatan, pelaporan dan mengakibatkan kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan aset negara;
7. Pemantauan dan pengawasan kegiatan BSPS di delineasi wilayah pesisir yang berjalan kurang optimal;
8. Kegiatan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman di Balai yang belum optimal terlaksana;
9. Tidak optimalnya pelaksanaan SPIP;
10. Pemantauan dan pengawasan kegiatan BSPS, Peningkatan Kualitas Sanitasi Kumuh, dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di delineasi wilayah pesisir yang berjalan kurang optimal;
11. Ketidaksesuaian antara pelaksanaan SOP dan praktik lapangan;
12. Pengawasan dan pengendalian kegiatan BSPS di delineasi wilayah perkotaan dan perdesaan berjalan kurang optimal;



13. Verifikasi data usulan kegiatan BPS di delineasi wilayah perkotaan dan perdesaan mengalami hambatan;
14. Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan RP3KP Provinsi dan Kab/Kota belum berjalan optimal;
15. Verifikasi data usulan kegiatan BPS di delineasi wilayah perkotaan dan perdesaan mengalami hambatan;
16. Pengawasan dan pengendalian kegiatan BPS di delineasi wilayah perkotaan dan perdesaan berjalan kurang optimal;
17. Tidak terlaksananya dukungan manajemen secara optimal;
18. Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Wilayah 1 Delineasi Kawasan Permukiman dan Pesisir;
19. Pengawasan dan pengendalian kegiatan BPS di delineasi wilayah perkotaan dan perdesaan berjalan kurang optimal;

2.3.2 Permasalahan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan

Secara umum permasalahan pelaksanaan kegiatan selama Triwulan IV yang dihadapi oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan panjang tiang pancang bangunan rusun
2. Adanya perubahan tipologi bangunan dari 3 lantai menjadi 2 lantai
3. Mobilisasi material dari luar palopo karena isu sosial Luwu Raya
4. Kondisi cuaca yang memasuki musim penghujan, sehingga proses pembangunan rumah (khususnya rumah permanen) menjadi terkendala.
5. Adanya kesulitan dalam mencari tukang untuk bersadaya dan juga keterlambatan dropping material.
6. Dikaerakan progres fisik yang terlambat, sehingga proses pencairan tahap II melewati tahun anggaran 2025.



2.3.3 Permasalahan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

Secara umum permasalahan pelaksanaan kegiatan selama Triwulan IV adalah sebagai berikut:

1. Faktor Cuaca dan Aksesibilitas Lokasi

Tingginya curah hujan pada Triwulan IV menghambat pelaksanaan kegiatan fisik, terutama pada pekerjaan konstruksi dan pengiriman bahan bangunan.

2. Proses Administrasi dan Pengadaan Barang/Jasa

Proses pengadaan barang dan jasa serta pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran menghadapi keterbatasan waktu, sehingga berdampak pada percepatan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan.

3. Ketersediaan Tenaga Tukang dan Proses Dropping Material.

Ketersediaan tenaga tukang dan keterlambatan proses dropping material bangunan di beberapa lokasi mempengaruhi ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.

Adapun permasalahan pelaksanaan kegiatan pada setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman:

- a. Proses pembukaan buku rekening tabungan 8 Penerima bantuan di 3 kabupaten terhambat dikarenakan berada di luar daerah saat pembukaan buku rekening tabungan, yaitu : Kabupaten Muna 3 PB, Kabupaten Buton Utara 1 PB, dan Kabupaten Kolaka 4 PB.
- b. Beberapa Penerima Bantuan di Kabupaten Konawe Selatan lebih dulu melaksanakan pekerjaan konstruksi secara swadaya tanpa mengikuti kaidah standar konstruksi yang telah ditetapkan di program BSPS.
- c. Proses Dropping material Kayu dan Pasir pada beberapa Penerima Bantuan di Kabupaten Konawe Selatan tidak sesuai jadwal.



- d. Curah hujan cukup tinggi di Kabupaten Buton tengah, dan Kabupaten Konawe Selatan, sehingga mengakibatkan tukang tidak dapat bekerja maksimal khususnya pada pekerjaan struktur.
 - e. Di Kabupaten Konawe Selatan terkendala ketersediaan tukang di desa setempat, dikarenakan banyak tukang yang telah bekerja pada proyek lain, sehingga menghambat pelaksanaan konstruksi tahap 1 terhambat.
 - f. Di Kabupaten Kolaka terjadi kelangkaan material pasir halus di wilayah Kec. Wundulako, Kec. Pomalaa, dan sekitarnya.
 - g. Di Kabupaten Buton Tengah terdapat unit rumah yang progress pekerjaan fisiknya rendah dikarenakan progres pekerjaan tukang yang lambat.
 - h. Di Kabupaten Muna Barat terjadi kelangkaan batu bata merah karena meningkatnya permintaan batu bata di akhir tahun.
2. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perumahan Perkotaan:
- a. Jumlah Penerima Bantuan di dalam DIPA berbeda dengan jumlah Penerima Bantuan dalam SK Penetapan Penerima Bantuan, yakni: dalam DIPA sebanyak 120 unit, sedangkan dalam SK Penetapan Penerima Bantuan 121 unit.
 - b. Pendrop material terlambat dikarenakan curah hujan hujan yang cukup tinggi.
3. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perumahan Perdesaan:
- a. Jumlah Penerima Bantuan di dalam DIPA berbeda dengan jumlah Penerima Bantuan dalam SK Penetapan Penerima Bantuan, yakni: dalam DIPA sebanyak 60 unit, sedangkan dalam SK Penetapan Penerima Bantuan 55 unit.
 - b. Proses pembukaan buku rekening tabungan 1 Penerima bantuan terhambat dikarenakan berada di luar daerah saat pembukaan buku rekening tabungan.



4. Penanganan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buton:

- a. Kondisi tanah berbatu dan lahan yang sempit menyulitkan penggalian tangki septic.
- b. Pengujian material yang memerlukan waktu dan pekerjaan berikutnya tidak dapat dilanjutkan sebelum hasil uji mutu keluar/terbit.
- c. Material paving block berasal dari luar kota melalui penyeberangan laut.
- d. Pekerjaan penanganan Permukiman Kumuh melewati tahun anggaran.



BAB III

PENUTUP

3.1 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adapun upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja berdasarkan hasil pemetaan permasalahan yaitu:

3.1.1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

Adapun upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya berdasarkan hasil pemetaan permasalahan/potensi capaian yaitu:

1. Melakukan pendampingan intensif dengan melibatkan tenaga ahli atau fasilitator teknis untuk mendampingi pelaksanaan pembangunan di lokasi agar berjalan sesuai jadwal dan rencana
2. Melakukan rapat pembahasan Manajemen Risiko serta mengidentifikasi risiko yang ada di Balai
3. Membuat laporan penyerapan perkegiatan
4. Menyelenggarakan bimbingan teknis verifikasi bagi SDM pelaksana verifikasi, dengan fokus pada peningkatan pemahaman terhadap prosedur, penggunaan sistem, dan standar kelayakan usulan
5. Penandatanganan pakta integritas dan setiap bulan dilakukan rapat bersama dengan pokja Zona Integritas
6. Membentuk tim UPG Unit Pengendalian Gratifikasi dan kanal WBS
7. Menyusun SOP BMN dan melaksanakan inventarisasi dan rekonsiliasi data BMN
8. Melakukan verifikasi berlapis pada setiap transaksi keuangan
9. Menjadwalkan FGD/Sosialisasi dengan penerima bantuan/user terkait progress penghunian dan pengelolaan Rumah Susun



3.1.2 Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adapun upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada triwulan selanjutnya berdasarkan hasil pemetaan permasalahan/potensi capaian yaitu:

- a. Melakukan komunikasi kepada pihak Bank Penyalur untuk diberikan kebijakan terkait pembukaan rekening secara daring. Permasalahan telah selesai dengan cara verifikasi pembukaan rekening Penerima bantuan secara daring.
- b. Melakukan pengawasan, mengarahkan tukang agar mengikuti gambar teknis dan rekomendasi teknis pengerjaan rumah serta membuat penegasan tertulis kepada penerima bantuan dan tukangya. Penerima Bantuan dan tukang telah mengikuti kaidah konstruksi sesuai pedoman teknis.
- c. TFL rutin melakukan koordinasi dengan pihak toko penyedia bahan bangunan agar dapat melakukan langkah-langkah percepatan dropping. Dropping material telah di laksanakan.
- d. Mempercepat pekerjaan pada situasi cerah dan memprioritaskan pekerjaan indoor saat situasi hujan.
- e. Mengarahkan Penerima Bantuan untuk menggunakan tukang dari desa terdekat. Penerima Bantuan telah mendapatkan tukang pengganti.
- f. Mencari suplier lain dan mengganti pasir butiran sedang untuk digunakan sebagai alternatif pengganti pasir halus. Telah mendapatkan suplier pengganti.
- g. Dilakukan pergantian tukang yang bisa berkeja dengan efisien. Penerima Bantuan telah mengganti tukang.
- h. KPB berkordinasi dengan toko penyedia bahan bangunan untuk mempercepat proses dropping material bata merah.



- i. Memaksimalkan pendropan material disaat tidak hujan. Dropping material telah selesai, progres fisik 100%.
- j. Berkoordinasi dengan pihak Bank Penyalur terkait solusi untuk pembukaan buku rekening penerima bantuan. Pembukaan buku rekening Penerima Bantuan diwakilkan oleh ahli warisnya.

3.1.3 Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adapun upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja berdasarkan hasil pemetaan permasalahan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman:
 - a. Melakukan komunikasi kepada pihak Bank Penyalur untuk diberikan kebijakan terkait pembukaan rekening secara daring. Permasalahan telah selesai dengan cara verifikasi pembukaan rekening Penerima bantuan secara daring.
 - b. Melakukan pengawasan, mengarahkan tukang agar mengikuti gambar teknis dan rekomendasi teknis pengerjaan rumah serta membuat penegasan tertulis kepada penerima bantuan dan tukang. Penerima Bantuan dan tukang telah mengikuti kaidah konstruksi sesuai pedoman teknis.
 - c. TFL rutin melakukan koordinasi dengan pihak toko penyedia bahan bangunan agar dapat melakukan langkah-langkah percepatan dropping. Dropping material telah dilaksanakan.
 - d. Mempercepat pekerjaan pada situasi cerah dan memprioritaskan pekerjaan indoor saat situasi hujan.
 - e. Mengarahkan Penerima Bantuan untuk menggunakan tukang dari desa terdekat. Penerima Bantuan telah mendapatkan tukang pengganti.
 - f. Mencari suplier lain dan mengganti pasir butiran sedang untuk digunakan sebagai alternatif pengganti pasir halus. Telah mendapatkan suplier pengganti.



- g. Dilakukan pergantian tukang yang bisa berkeja dengan efisien. Penerima Bantuan telah mengganti tukang.
 - h. KPB berkordinasi dengan toko penyedia bahan bangunan untuk mempercepat proses dropping material bata merah kepada penerima. Dropping material bata merah telah selesai.
2. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perumahan Perkotaan:
- a. Penyesuaian jumlah penerima bantuan melalui revisi DIPA. Telah terbit revisi DIPA 8 tanggal 17 Oktober dengan Penyesuaian jumlah penerima bantuan dari semula 120 unit menjadi 121 unit.
 - b. Memaksimalkan pendropan material disaat tidak hujan. Dropping material telah selesai, progres fisik 100%.
3. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perumahan Perdesaan:
- a. Penyesuaian jumlah penerima bantuan melalui revisi DIPA. Telah terbit revisi DIPA 6 tanggal 24 Oktober dengan Penyesuaian jumlah penerima bantuan dari semula 60 unit menjadi 55 unit.
 - b. Berkoordinasi dengan pihak Bank Penyalur terkait solusi untuk pembukaan buku rekening penerima bantuan. Pembukaan buku rekening Penerima Bantuan diwakilkan oleh ahli warisnya.
4. Penanganan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buton:
- a. Penggalian lubang tangki septik menggunakan breaker.
 - b. Berkoordinasi dengan pihak laboratorium pengujian guna percepatan pengambilan sampling bahan/benda uji.
 - c. Mengingatkan/meminta ke penyedia melakukan komunikasi dengan pihak pabrik paving untuk segera melakukan pengiriman paving blok
 - d. Diberikan kesempatan kepada penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan melewati tahun anggaran dengan mekanisme RPATA.

3.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya

Adapun bukti tindak lanjut atas permasalahan yang telah dipetakan pada triwulan sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya

TRIWULAN III				TRIWULAN IV		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
1.	Timbulnya kendala dalam proses pembangunan rumah susun	Melakukan pendampingan intensif dengan melibatkan tenaga ahli atau fasilitator teknis untuk mendampingi pelaksanaan pembangunan di lokasi agar berjalan sesuai jadwal dan rencana	Laporan hasil pendampingan terkait progres pembangunan rumah susun secara berkala	1.	Permasalahan triwulan IV telah selesai ditindak lanjuti	
2.	ketidaktepatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran	Membuat laporan penyerapan perkegiatan	Dokumen prognosis			



	Verifikasi data usulan kegiatan BSPS di delineasi wilayah perkotaan dan perdesaan mengalami hambatan	Menyelenggarakan bimbingan teknis verifikasi bagi SDM pelaksana verifikasi, dengan fokus pada peningkatan pemahaman terhadap prosedur, penggunaan sistem, dan standar kelayakan usulan	Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Verifikasi BSPS			
	Komitmen pimpinan dan pegawai dalam pembangunan ZI menurun atau tidak konsisten	Penandatanganan pakta integritas dan setiap bulan dilakukan rapat bersama dengan pokja Zona Integritas	Dokumen Bukti dukung Lembar Kerja Evaluasi			
	ketidaktertiban dalam pencatatan, pelaporan dan mengakibatkan kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan aset negara	Menyusun SOP BMN dan melaksanakan inventarisasi dan rekonsiliasi data BMN	Dokumen SOP BMN dan laporan BMN			
	Kegiatan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman di Balai yang belum optimal terlaksana.	Melaksanakan sosialisasi dan edukasi penerapan UU No. 08 Tahun 1999 dan pedoman teknis terkait kepada SDM Program Benar PKP	SK Pokja Klinik PKP di Balai, Rekomendasi Layanan Klinik PKP			
1.	Anggaran pekerjaan fisik baru ada setelah	Melakukan percepatan proses administrasi	Proposal Calon Penerima Bantuan dan			



	revisi DIPA di bulan Agustus	Percepatan pelaksanaan verifikasi teknis dan penyusunan proposal bagi calon penerima bantuan yang lulus verifikasi sambil menunggu terbitnya SK Penetapan Penerima Bantuan	SK Penetapan Penerima Bantuan			
2.	Pelaksanaan kontrak penyedia jasa belum dapat dilakukan di triwulan ini karena proses pemilihan penyedia jasa oleh Pokja Pemilihan masih berlangsung dan akan rampung pada minggu ketiga Oktober	Pelaksanaan kontrak penyedia jasa akan dilakukan pada bulan triwulan Berikutnya segera setelah proses pemilihan penyedia jasa oleh Pokja Pemilihan selesai	- Kontrak Penyedia Jasa untuk Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah tanggal 14 Oktober 2025 dengan nomor SPK 003/SPK Rb14.5.2/2025 - Kontrak Penyedia Jasa untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh tanggal 05 November 2025 dengan nomor Surat Perjanjian 005/SP- Rb14.5.2/2025			



	progres pekerjaan belum mencapai target untuk melakukan pembayaran termin.	Melakukan percepatan dalam proses pengerjaan fisik	Bukti permintaan percepatan progress (Baik BSPS, Kumuh, Sanitasi, PSU, dan Rumah Susun			
	Belum ada progres fisik yang berjalan baik itu BSPS, Sanitasi, PSU, dan Kumuh.	Melakukan percepatan progress (Perencanaan, pelaksanaan sampai penyelesaian) ketika DIPA sudah direvisi.	Proposal Calon Penerima Bantuan dan SK Penetapan Penerima Bantuan			



LAMPIRAN



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jalan Malaka Kompleks Ruko Spazia Citra Land K1 No. 1, Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari Kode Pos 93231

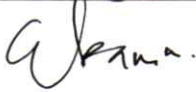
DAFTAR HADIR

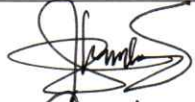
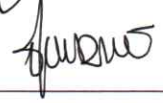
Hari/Tanggal : Kamis 12 Oktober 2023

Tempat : Ruang Rapat Sakker Pkp PROV. Sultra

Acara : Arahan Direktur peningkatan kualitas perumahan perdesaan dan kepala BP3KP Sulawesi III

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AGUS WAHIDIN	Dir PK Pds	
2	FERNANDO	Kasubdit 3	
3	Buletia	Kabalei	
4	Meekhis Baektia	Kadis Prokem Cekda Cakra	
5	Lily Damayanto	PPK	
6	M. IRAN. BASALAMAH.	KASATKER	
7	MOH. RIFAL AGUSTIRA	Cpus	
8	Frani	Baw	
9	Indah Musika Hati	Kaur adm Randal	
10	ABUUF DEDY SUSANTO	STAF	
	MUHAMMAD MUKHLIS	STAF	

MARHADIANTO	STAF	
AWIPULLAH	TA BSSPs	
ONI SURI LAKSYA. M	STAF	
Yenni S. Bahri	Staf	
Rud Arhad L.	Staf	
Lari Pating	Staf	
ARDI Yanto	Staf	
ASRUL TISYAR	staf BPBP	
Abd. Rahim. Nasir	Staf	
EKA MUKTI	staf.	
ALFERIS YAHKI	STAF	
ARDAN PRATISCTA	Staf	
Muh. Fakhriansa Putra	CPNS	
Nurul Hidayni Suleardi	CPNS	
Mursyid Hidayat	CPNS	
Amalia Nur Annisa Rasibo	CPNS	
Wd. Vince Annila. H	Staf Randal	
LAODE SRAFIN SARINI. ST	STAF	

	ANDI BASO MANDALA, S.Ars	PENGAWAS TATA BANGUNAN PEMDA KOLAKA UTARA	
	DEWA MUH. FATWA JAPARI, ST	Analisis Perencanaan Wilayah Perumahan Pemda Kolaka Utara	
	BASKAR OJAFAR, SE	Ka. BID PERUMAHAN, Kab. KOLAKA UTARA	
	Lh Amayafu		
	Zasniaty Layut, ST	Penata kelola Perumahan Ahli Muka KOLUT	
	Hamka Thahir		
	IKMA SURYANA, ST	PENGAWAS TATA BANGUNAN & PERUMAHAN PEMDA KOLUT	
	Lm. Taufik Halik		
	Indah MH		
	Marbijarah		
	M. Chika		
	Plk		



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

NOTULEN RAPAT

Judul Rapat	:	Arahan Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan dan Kepala BP3KP Sulawesi III
Hari/Tanggal	:	Kamis/02 Oktober 2025
Waktu	:	10.00 WITA s/d Selesai
Lokasi	:	Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
Tujuan	:	Memberi arahan kepada seluruh pegawai Satker Sultra
Peserta	:	1. Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan 2. Kepala BP3KP Sulawesi III 3. Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra 4. PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman 5. Bendahara Pengeluaran 6. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 7. Staff Satker PKP Prov. Sultra 8. Kadis PKP Kab. Kolaka Utara dan Staff
Agenda Rapat	:	1. Arahan Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan 2. Kepala BP3KP Sulawesi III
Pimpinan Rapat	:	Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra
Notulis Rapat	:	Eka Mukti, SE

Arahan Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Sejarah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ini, sangat dinamis. Di orde baru itu Kementerian Perumahan Rakyat, kemudian bergabung dengan PU, kemudian berpisah lagi. Kalau lihat sejarah sangat dinamis masalah perumahan ini. Tetapi masih teringat sama kita semua waktu masih bergabung dengan Kementerian PU yaitu PUPR. tidak menyalahkan siapapun sebuah sistem yang berjalan dengan sistem saat itu. Urusan perumahan memakan biaya yang sangat besar, Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Sementara Perumahan paling kecil. Jadi bisa diwajarkan pada saat itu urusan PUPR, terutama Perumahan Rakyat, tidak terlalu diperhatikan dikarenakan anggarannya paling kecil. tidak menjadi perhatian publik yang sedemikian rupa. sekarang sudah pisah dari PU, tetapi anggaran tetap kecil tetapi masuk program strategis Presiden Prabowo. Ada 2 titik yang akan menentukan kehidupan negara di masa depan, menurut para ahli yaitu Rumah dan Sekolah.

Beban dari program strategis presiden tersebut berada di kita sekarang, kesadaran ini yang ingat dibangun oleh Bapak Presiden, Dikasih lah target 3 juta rumah per tahun. Dengan mencapai 3 juta rumah, Kementerian PKP membentuk ekosistem perumahan, yaitu Negara melalui APBN, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa melalui APBDDes, BUMN/BUMD, swasta, Yayasan/Lembaga dan Masyarakat itu sendiri. Ingat, kriteria miskin tidak miskin itu salah satunya Rumah.

Selanjutnya, kita sama sama sadar diri, sekarang kita punya komitmen membantu menegakkan hukum di jajaran Kementerian PKP, bekerja berprestasi dan selamat. Aturan kita tegakkan, berdasarkan jam terbang masing masing, kita bekerja dengan damai, baik dan selamat. Sebuah hasil pekerjaan tanpa adanya kerjasama orang lain, akan berdampak sia sia. Karena itu di harapkan dalam konteks kerja harus profesional, suka tidak suka kepada personal harus dahulukan pekerjaan.

Diskusi Dengan Kadis PKP Kab. Kolaka Utara

Kondisi sekarang di Kab. Kolaka Utara, Bupati sudah mengarahkan kepada para Kepala Desa untuk menyisihkan pendapatan minimal perbaikan 1 Rumah per tahun. Dan itu sifatnya wajib.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

DOKUMENTASI

Arahan Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan dan Kepala BP3KP Sulawesi III







KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No 1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

691588, FAE.100A.52/211

Kendari, 03 Oktober 2025

Nomor : 018/UM/Rb14.5.2/2025
Lampiran : -
Perihal : Pembahasan Percepatan Pelaksanaan
Kegiatan BSPS Delineasi Perkotaan dan
Perdesaan TA 2025

Kepada Yth.

1. Koordinator dan TFL Kota Kendari
2. Koordinator dan TFL Kabupaten Kolaka Timur

di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan BSPS Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2025 Delineasi Perkotaan dan Perdesaan, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam rapat pembahasan percepatan pelaksanaan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 06 Oktober 2025
Pukul : 11.00 WITA - Selesai
Tempat : Kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PPK Rumah Swadaya, PSU, dan
Kawasan Permukiman



Lili Damayanto, S.T.

NIP. 19870907 201001 1 008

Tembusan :

1. Kepala Balai P3KP Sulawesi III;
2. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 06 Oktober 2025

Tempat : Kantor Satker PKP Prov. Sulawesi Tenggara

No.	Nama	Instansi/ Badan Usaha	Jabatan	Tanda Tangan
1	Lili Danayanto		PPK	
2.	MUHTAR		STAF	
3.	Fuad Aslan	Satker PKP Sultra	Staf	
4	Ica C. Husen	Satker PKP Sultra	Staf	
5	Lt. Taufik, H		TA	
6	ZAINAL ST		Kepsek	
7	YULIATI, SS		TFL	
8	SULISTIRAWATI		TFL	
9.	MISNA NINGSI. S. SSOS		TFL	
10	ANDIRULLAN		TA	
11	MUH. MUKHLIS		STAF	
12.	Muzarnu Nabel		TFL KDI	



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 06 Oktober 2025

Tempat : Kantor Satker PKP Prov. Sulawesi Tenggara

No.	Nama	Instansi/ Badan Usaha	Jabatan	Tanda Tangan
13	MUTT. ASRAF K.		KORFAS	
14	EKA MUKTI		staf	
15	ARDAN PRATISCA		Staff	
16	YUNI IKASARI A.R		staf	
17	ARIEF DEDY		Staf	
18	AUDREY DANI		STAF	
19	ARDIYANTO		St	
20	ALFETHS		"	



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

NOTULENSI

RAPAT PEMBAHASAN PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS DELINEASI PERKOTAAN DAN PERDESAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TA 2025

Sehubungan dengan diselenggarakannya Rapat Pembahasan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan BSPS Delineasi Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2025, hormat kami sampaikan hal-hal, sebagai berikut :

A. UMUM

Hari/Tanggal : Senin, 06 Oktober 2025
Waktu : 11.00 WITA s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rapat ini diselenggarakan dalam rangka percepatan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2025 di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya pada delineasi Perkotaan dan Perdesaan.

C. PEMBAHASAN

Rapat pembahasan ini dipimpin oleh PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara dan dihadiri oleh Koordinator dan TFL Kota Kendari serta Koordinator dan TFL Kabupaten Kolaka Timur (Daftar Hadir Terlampir).

D. PENJELASAN OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pejabat pembuat komitmen menjelaskan percepatan pelaksanaan BSPS Perkotaan dan Perdesaan TA 2025 meliputi :

1. SK Tahap I telah keluar, maka segera dilakukan percepatan pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT).
2. Untuk lokasi perkotaan perlu dilakukan PTT. Jika di daerah hanya ada satu toko atau beberapa toko berjauhan maka tidak perlu dilakukan PTT.
3. Harga survei toko perlu disesuaikan dengan HPS.
4. Jumlah Penerima Bantuan minimal 3 unit dapat dijadikan Kelompok Penerima Bantuan (KPB).
5. Jika SK Tahap II telah keluar, maka KPB pada Tahap I tidak dapat digabung dengan KPB Tahap II.
6. Korkab/Kota dan TFL diharapkan memperhatikan kondisi struktur bangunan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
7. Korkab/Kota dan TFL diharapkan melakukan upaya percepatan dengan tetap memperhatikan kondisi di masyarakat mengingat saat ini Penerima Bantuan yang sudah diputuskan baru satu tahap.

Demikian notulensi ini dibuat dan akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulis,



Ica Capriyati Husen, S.T.

DOKUMENTASI



DOKUMENTASI



DOKUMENTASI



DOKUMENTASI



DOKUMENTASI





KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No 1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos. 93231

Nomor : 020/UM/Rb14.5.2/2025 Kendari, 9 Oktober 2025
Lampiran : -
Hal : Review Hasil Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara paket
Pekerjaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kabupaten Buton

Yth,
Direktur CV. AMD JAYA KONSTRUKSI
di -

Tempat

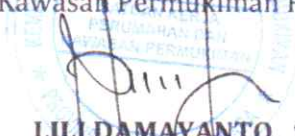
Berdasarkan hasil pengumuman pemenang pengadaan langsung barang / jasa paket pekerjaan **Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kabupaten Buton** oleh Pejabat Pengadaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 173.3/PP/Rb14.5.3/2025 tanggal 26 September 2025 yang menetapkan **CV. AMD JAYA KONSTRUKSI** sebagai pemenang, dengan ini kami sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman mengundang saudara/i untuk melakukan review dan klarifikasi hasil pengadaan langsung paket pekerjaan tersebut di atas yang akan dilaksanakan pada :

Hari,Tanggal : Kamis, 9 Oktober 2025
Waktu : 13.00 WITA sampai selesai
Tempat : Ruang Rapat Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Kompleks Ruko Spazia Citraland K1 No.1, Kota Kendari

Diharapkan saudara/i membawa kelengkapan dokumen penawaran dan personil yang telah di lampirkan saat menyampaikan dokumen penawaran dalam INAPROC SPSE.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya,
PSU dan Kawasan Permukiman
Satuan Kerja Perumahan
Dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra


LILI DAMAYANTO, S.T.
NIP. 198709072010011008

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Balai P3KP Sulawesi III di Makassar
2. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra di Kendari
3. Arsip



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No 1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

DAFTAR HADIR

Agenda : Review Hasil Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan Satker PKP Prov.

Sultra paket Pekerjaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kabupaten Buton

Hari, Tanggal : Kamis, 09 Oktober 2025

Tempat : Kantor Satker PKP Prov. Sulawesi Tenggara

No.	Nama	Instansi/ Badan Usaha	Jabatan	Tanda Tangan
1.	LA JOSBUN	CV. AMD JAYA KONTRUKSI	Pejabat Lapangan	
2.	LM RIZAL DP. HIRALI	CV. AMD JAYA KONSTRUKSI	K3	
3.	ANWAR	CV. AMD JAYA KONSTRUKSI	ADM.	
4.	Lili Permyanti	ppb		
5.	Fuad Ashard	Staf		
6.	Ica C. Husen	Satker SPK Sultra	Staf	
7.	Ld. Ihsan C	satker pkp		
8.	MUKH-MUKHLIS	staf		
9.	Lm. Taufik H			
10.	Bardi Ihsan	CV. AMD jaya Konstruksi	Direktur	
11.	MUHTAN	pp		



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

DAFTAR HADIR

Agenda : Review Hasil Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan Satker PKP Prov.
Sultra paket Pekerjaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kabupaten Buton

Hari, Tanggal : Kamis, 09 Oktober 2025

Tempat : Kantor Satker PKP Prov. Sulawesi Tenggara

No.	Nama	Instansi/ Badan Usaha	Jabatan	Tanda Tangan
12.	Yuni Ikasari A.R		staf	
13.	ARIEF DERY		staf	
14.	Oni Susilakty M		staf	
15.	Indah MH		staf	
16.	Muh. Fachriana Paru		CPN	
17.	Mursyid Hidayat		CPNS	
18.	Moh. Rizki Agustina		CPNS	
19.				
20.				
21.				
22.				



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

BERITA ACARA REVIU HASIL PEMILIHAN PENYEDIA

Nomor: 004/BA/Rb14.5.2/2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal 09 Oktober 2025, bertempat di Kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LILI DAMAYANTO, S.T.

NIP : 198709072010011008

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Unit Kerja : Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

telah melakukan **reviu terhadap hasil pemilihan penyedia barang/jasa** yang dilaksanakan oleh **Pokja Pemilihan** untuk paket pekerjaan sebagai berikut:

Informasi Umum Paket Pekerjaan

- **Nama Paket** : Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kabupaten Buton
- **Satuan Kerja** : Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
- **Jenis Pengadaan** : Pekerjaan Konstruksi
- **Nilai HPS** : Rp 399.966.000,-
- **Sumber Dana** : APBN
- **Tahun Anggaran** : 2025

Dokumen yang Direviu

1. Dokumen Pemilihan (Termasuk KAK dan HPS)
2. Dokumen Penawaran Penyedia
3. Berita Acara Evaluasi Penawaran
4. Penetapan dan Pengumuman Pemenang
5. Dokumen Kualifikasi Penyedia Pemenang

6. Klarifikasi dan Negosiasi
 7. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 8. Dokumen lain yang relevan
-

Hasil Reviu

Berdasarkan reviu terhadap dokumen dan proses yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan, diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Proses pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam **Perpres 16 Tahun 2018** beserta perubahannya dan aturan turunannya.
 2. Penyedia pemenang, yaitu **CV. AMD JAYA KONSTRUKSI**, telah memenuhi seluruh persyaratan kualifikasi dan administratif.
 3. Harga penawaran sebesar **Rp 399.800.000,-** tidak melebihi HPS dan dianggap wajar.
 4. Tidak terdapat sanggahan yang masuk / sanggahan telah ditangani sesuai prosedur (pilih salah satu).
 5. Dokumen telah lengkap dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan dan penandatanganan kontrak.
 6. Besaran Jaminan Pelaksanaan adalah 5% dari nilai kontrak berupa garansi bank.
 7. Besaran Jaminan Uang Muka adalah 30% dari nilai kontrak berupa garansi bank.
-

Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka:

- ☒ Hasil pemilihan penyedia **dapat diterima** dan proses pengadaan **dapat dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak**.
-

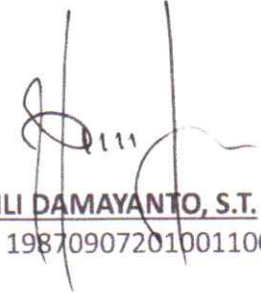
Demikian berita acara ini dibuat dan ditata bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara



MUH. IRSAN BASALAMAH, S.T., M.T.
NIP. 198706122010011013

PPK Rumah Swadaya, PSU
dan Kawasan Permukiman



LILI DAMAYANTO, S.T.
NIP. 198709072010011008

CV. AMD JAYA KONSTRUKSI



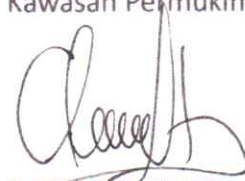
BUDI IRAWAN
Direktur

Kaur Teknik
PPK Rumah Swadaya, PSU dan
Kawasan Permukiman



FUAD ASHAD, S.T., M.Arch.
NIP. 198909172025211058

Kaur Administrasi
PPK Rumah Swadaya, PSU
dan Kawasan Permukiman



ICA CAPRIYATI HUSEN, S.T.
NIP. 199306162018022001

Checklist Reviu Hasil Pemilihan Penyedia oleh PPK

Tujuan: Memberikan keyakinan bahwa proses pemilihan penyedia telah sesuai ketentuan dan dapat ditindaklanjuti ke tahap penandatanganan kontrak.

A. Administrasi Umum

No	Uraian	Ya	Tidak	Catatan
1	Pokja Pemilihan telah menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK secara resmi.	☒	☐	
2	Tersedia dokumen lengkap hasil pemilihan (berita acara evaluasi, penetapan pemenang, surat penawaran, dll).	☒	☐	
3	Dokumen penawaran penyedia pemenang telah ditandatangani dan lengkap.	☒	☐	

B. Kesesuaian dengan Perencanaan dan Spesifikasi

No	Uraian	Ya	Tidak	Catatan
4	Hasil pemilihan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK yang ditetapkan PPK.	☒	☐	
5	Total nilai penawaran tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia.	☒	☐	
6	Jadwal pelaksanaan sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan kegiatan.	☐	☒	

C. Evaluasi Kualifikasi dan Legalitas Penyedia

No	Uraian	Ya	Tidak	Catatan
7	Penyedia pemenang memenuhi seluruh persyaratan kualifikasi.	☒	☐	
8	Dokumen legalitas penyedia (izin usaha, NIB, NPWP, dsb) masih berlaku.	☒	☐	
9	Tidak ada konflik kepentingan antara penyedia dan pihak pengadaan.	☒	☐	

D. Evaluasi Harga dan Penawaran

No	Uraian	Ya	Tidak	Catatan
10	Harga penawaran wajar dan tidak melebihi HPS.	☒	☐	

No Uraian

- 11 Telah dilakukan koreksi aritmatika jika diperlukan.
- 12 Ada bukti analisis kewajaran harga (jika diperlukan).

Ya Tidak Catatan

- ☒ ☐
- ☐ ☒

E. Penanganan Sanggahan (Jika Ada)**No Uraian**

- 13 Masa sanggah telah selesai.
- 14 Sanggahan telah dijawab sesuai ketentuan.
- 15 Tidak ada sanggahan yang belum terselesaikan.

Ya Tidak Catatan

- ☒ ☐
- ☐ ☒
- ☐ ☒

F. Kesiapan untuk Penandatanganan Kontrak**No Uraian**

- 16 Semua dokumen telah memenuhi syarat untuk penyusunan kontrak.
- 17 Penyedia bersedia menandatangani kontrak dan memenuhi jaminan.
- 18 Draf kontrak telah disusun dan sesuai ketentuan.

Ya Tidak Catatan

- ☒ ☐
- ☒ ☐
- ☐ ☒

Foto Dokumentasi



Foto Dokumentasi





KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

SURAT TUGAS

Nomor : 200 /SPT/Rb14.5/2025

Dalam rangka Penandatanganan Kontrak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III di Kab. Buton, dengan ini kami menugaskan pejabat/staf sebagaimana tercantum dibawah ini untuk melaksanakan tugas/perjalanan dinas dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	Pelaksana SPD	Unit Kerja	Periode Perjalanan Dinas	Tujuan	Transportasi	Pembebanan Anggaran
1	<u>Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T</u> NIP. 19870612 201001 1 013 Kepala Satuan Kerja	Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra	5 November s.d. 6 November 2025	Kota Makassar	Transportasi Udara	DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra TA 2025
2	<u>Lili Damayanto, S.T</u> NIP. 19870907 201001 1 008 PPK Ruswa, PSU, dan KP					
3	<u>Fuad Ashad Langguta, S.T.,M.Ars</u> NIP. 19890917 202521 1 058 KAUR Teknik Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman					
4	<u>Muhammad Mukhlis, ST.,M.T</u> NIP. 19870406 202521 1 068 Penata Kelola Perumahan - Ahli Pertama					

Kepada pegawai tersebut di atas agar melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan rincian Surat Tugas dan menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan perjalanan dinas.

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari, 4 November 2025

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara

Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T.
NIP. 19870612 201001 1 013

Tembusan :

1. Kepala Balai P3KP Sulawesi III;
2. Arsip.



LAPORAN PERJALANAN DINAS

Pelaksana Perjalanan Dinas : Muh. Irsan Basalamah, S.T., M.T
Lili Damayanto, S.T.
Fuad Ashad Langguta, S.T., M.Arch
Muhammad Mukhlis, ST., MT.

Tanggal Perjalanan Dinas : 5 – 6 November 2025

Tujuan Perjalanan Dinas : Kota Makassar

Keperluan Perjalanan Dinas : Dalam rangka Penandatanganan Kontrak Pekerjaan
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo
III Kab. Buton di Makassar

I. Pendahuluan

Rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan, sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh merupakan salah satu kegiatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman untuk mendukung terwujudnya program 3 juta rumah dengan meningkatkan kualitas bangunan rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Undang-undang no 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu lokasi kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh terdapat di Kawasan Dawanawajo III Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia.

II. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton dilakukan pada tanggal 5 November 2025.

III. Jadwal Kegiatan

Hari / tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
Rabu, 5 November 2025	- Perjalanan Kendari ke Makassar - Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton	
Kamis, 6 November 2025	- Perjalanan Kota Makassar ke Bau-bau	

IV. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penandatanganan Kontrak pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton adalah sebagai berikut :

- Melakukan penandatanganan Kontrak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton antara PPK dan Penyedia Jasa;
- Melakukan koordinasi dengan penyedia jasa terkait pelaksanaan di lapangan;
- Melakukan Sharing informasi terkait kondisi lokasi pekerjaan.

V. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Proses Kegiatan penandatanganan Kontrak pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton adalah sebagai berikut yaitu :

- Penandatanganan Kontrak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton :
 - Melakukan rapat dengan balai dan Satuan kerja dengan menyampaikan maksud dan tujuan penandatanganan Kontrak pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton.
 - Memdengarkan arahan terkait dengan pelaksanaan dari Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - Melakukan evaluasi terhadap masalah yang akan dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan.
- Koordinasi dengan penyedia jasa terkait pelaksanaan di lapangan:
 - Memberikan informasi, manfaat dan tujuan dilaksanakannya program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton.
 - Melakukan sharing informasi kepada penyedia jasa terkait pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton.

- Melakukan penyusunan rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton.

VI. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil penandatanganan Kontrak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton adalah sebagai berikut yaitu :

1. Melakukan penyesuaian terhadap alokasi sumber daya (anggaran, waktu, personil) yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton.
2. Memberikan informasi terkini mengenai lokasi kegiatan, tantangan yang ada, dan solusi yang mungkin untuk diterapkan dalam pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton.
3. Menentukan prioritas kegiatan, menyesuaikan jadwal, dan merumuskan strategi yang akan digunakan dalam pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton.

VII. Penutup

Demikian laporan kegiatan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 10 November 2025
Yang Melakukan Perjalanan Dinas,

Muh. Irsan Basalamah, S.T., M.T
NIP. 198706122010011013

Lili Damayanto, S.T.
NIP. 198709072010011008

Fuad Ashad Langguta, S.T., M.Arch
NIP. 198909172025211058

Muhammad Mukhlis, ST., MT
NIP. 198704062025211068



LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN PENANDATANGANAN KONTRAK PENINGKATAN KUALITAS
PERMUKIMAN KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON



PENANDATANGANAN KONTRAK PENINGKATAN KUALITAS
 PERMUKIMAN KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON



PENANDATANGANAN KONTRAK PENINGKATAN KUALITAS
 PERMUKIMAN KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON



PENANDATANGANAN KONTRAK PENINGKATAN KUALITAS
 PERMUKIMAN KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON



PENANDATANGANAN KONTRAK PENINGKATAN KUALITAS
 PERMUKIMAN KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON



PENANDATANGANAN KONTRAK PENINGKATAN KUALITAS
 PERMUKIMAN KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON



PENANDATANGANAN KONTRAK PENINGKATAN KUALITAS
 PERMUKIMAN KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

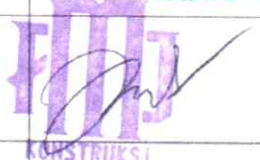
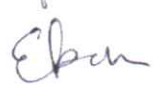
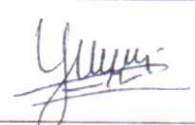
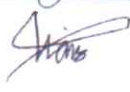
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No 1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

DAFTAR HADIR

Agenda : Rapat Penandatanganan Kontrak

Hari, Tanggal : Selasa, 14 Oktober 2025

Tempat : Ruang Rapat Kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Nama	Instansi/ Badan Usaha	Jabatan	Tanda Tangan
1	M. IRSAN B	Satker Sultra	Kabotker	
2	Fuat Aslind	Satker sultra	Staf	
3	Lili Panayanto	sultra	ppk	
4	Empu palemto	CV. KASUN KONSULTAN	DIREKTUR	
5	BUDI IRWAN	CV. AND JAYA KONSTRUKSI	DIREKTUR	
6	LAODE SIRAFIR	SATKER PKP	STAFF	
7	Mursyid Hidayat	SATKER PKP	CPNS	
8	EKA MUKTI	SATKER PKP	STAFF	
9	Ica C. Huren	Satker PKP Sultra	Staf	
10	Yuni Karani A. IZ	Satker PKP sultra	Staf	
11	Moh. Fakhriansa Putra	Satker PKP Sultra	CPNS	



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos 93231

DAFTAR HADIR

Agenda : Rapat Penandatanganan Kontrak
Hari, Tanggal : Selasa, 14 Oktober 2025
Tempat : Ruang Rapat Kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Nama	Instansi/ Badan Usaha	Jabatan	Tanda Tangan
12	HAMLIN			
13	ALFREDO			
14	ARUEF DEBY			
15	ONI SUSILAKY. M		staf	
16	STRI MARSIJANAH		staf	
17	Ichsan Chumadi			
18	Nurul Bidayni S.		CPNS	
19	Iewi Ratung		staf	
20	Abd. Rahim. Hario		staf	
21	YUNI		staf	



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

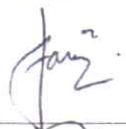
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No 1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos 93231

DAFTAR HADIR

Agenda : Rapat Penandatanganan Kontrak

Hari, Tanggal : Selasa, 14 Oktober 2025

Tempat : Ruang Rapat Kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Nama	Instansi/ Badan Usaha	Jabatan	Tanda Tangan
22	FAIZ		Staf	
23	Hamka			
24	Wd. vince Annika.		staf	
25	Fitriani		Pendahan	
26				
27				
28				
29				
30				
31				



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

NOTULEN RAPAT

Judul Rapat	:	Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kab. Buton dan Supervisi Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kab. Buton
Hari/Tanggal	:	Selasa/14 Oktober 2025
Waktu	:	10.00 WITA s/d Selesai
Lokasi	:	Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
Tujuan	:	Ditanda Tangan Kontrak Pekerjaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kab. Buton dan Supervisi Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kab. Buton
Peserta	:	1. Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra 2. PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman 3. Penyedia Jasa Kontruksi 4. Konsultan 5. Staff Satker PKP Prov. Sultra
Agenda Rapat	:	1. Pembukaan Rapat 2. Arahan dan Percepatan Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kab. Buton
Pimpinan Rapat	:	Muh. Irsan basalamah, S.T.,M.T. selaku Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
Notulis Rapat	:	Eka Mukti, SE

Rapat ini dimulai dengan pembahasan Kontrak Kerja Kepada Jasa Penyedia dan Konsultan termaksud didalam nya Lama Pekerjaan, Nilai Kontrak, Termin Pembayaran, Denda Keterlambatan dan yang menyangkut pekerjaan dari supervisi. Lama pekerjaan dan nilai kontrak mungkin tidak ada masalah, tetapi di termin pembayaran sudah sesuai termin 1 50% dengan progres fisik 55%, termin 2 progres fisik 95% dengan progres fisik 100%, dengan retensi 5% dengan jaminan, begitu juga dengan Konsultan, Pencairan konsultan tetap mengikuti Pencairan termin fisik. Dokumen Penunjang untuk pembayaran yaitu Laporan pelaksanaan (Harian, Mingguan dan Bulanan), Dokumentasi, Back Up Data dan As-Built Drawing, Itu untuk Laporan Fisik. Denda pekerjaan juga tidak ada masalah, semua pihak terima dengan kontrak yang berlaku. PCM dan MC-0 Dilakukan bersama sesuai dengan kebutuhan lapangan, serta dengan dilakukannya percepatan pelaksanaan kegiatan.

Pembahasan Kontrak Kerja banyak terjadi perubahan, diantaranya pembayaran termin akhir Konsultan akan berbeda dengan Penyedia Jasa Kontruksi. Hal ini dikarenakan untuk menjaga kalau ada hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, ini juga mengikuti arahan dari menteri keuangan. Jadi 4x Pembayaran yaitu, Uang Muka, Termin 1, Termin 2 dan Retensi.

Penegasan dilakukan juga kepada tenaga lapangan Penyedia Jasa Konstruksi agar memakai Sumber Daya Manusia yang berada di dekat wilayah pekerjaan.

Setelah arahan dan pembahasan percepatan selesai, acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Kontrak Kerja Bersama Antara PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman, Penyedia Jasa Konstruksi dan Konsultan.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

BERITA ACARA RAPAT PENANDATANGANAN KONTRAK

Nomor: 005/BA/Rb14.5.2/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal 14 Oktober 2025, bertempat di Kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dilaksanakan rapat dalam rangka Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kabupaten Buton antara:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):

Nama : LILI DAMAYANTO, S.T.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Unit Kerja : Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
Alamat : Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K.1 Kec. Poasia, Kota Kendari
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Kontraktor Pelaksana

Nama : BUDI IRAWAN, S.T.
Jabatan : Direkur
Perusahaan : CV. AMD Jaya Konstruksi
Alamat : Perumahan Dosen UHO Blok J No. 5, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. Konsultan Supervisi

Nama : Ir. ERFAN POLEANTO, S.T.
Jabatan : Direkur
Perusahaan : CV. Kaison Konsultan
Alamat : Jl. Kijang Komp. Perumnas Poasia Blok D/24, Kota Kendari
Selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Adapun agenda rapat adalah sebagai berikut:

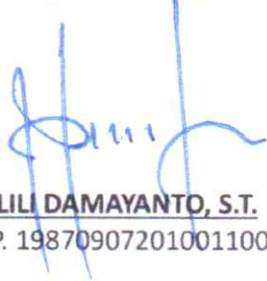
- Pembahasan akhir draft kontrak kerja sama.
- Persetujuan isi kontrak oleh kedua belah pihak.
- Penandatanganan kontrak kerja sama.
- Diskusi mengenai tindak lanjut pelaksanaan kontrak.
- Pembahasan sanksi-sanksi.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani kontrak kerja sama dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak yang telah disetujui bersama.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti bahwa rapat telah dilaksanakan dengan hasil sebagaimana disebutkan di atas.

Kendari, 14 Oktober 2025

Pihak Pertama,
PPK Rumah Swadaya, PSU dan
Kawasan Permukiman



LILI DAMAYANTO, S.T.
NIP. 198709072010011008

Pihak Kedua,
CV. AMD JAYA KONSTRUKSI



BUDI IRAWAN, S.T.
Direktur

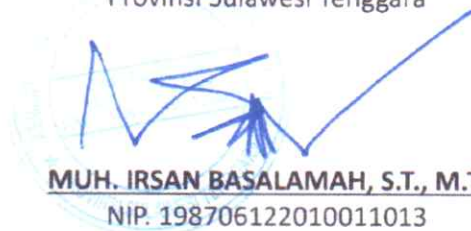
Pihak Ketiga,
CV. KAISON KONSULTAN



Ir. ERFAN POLEANTO, S.T.
Direktur

Mengetahui,

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara

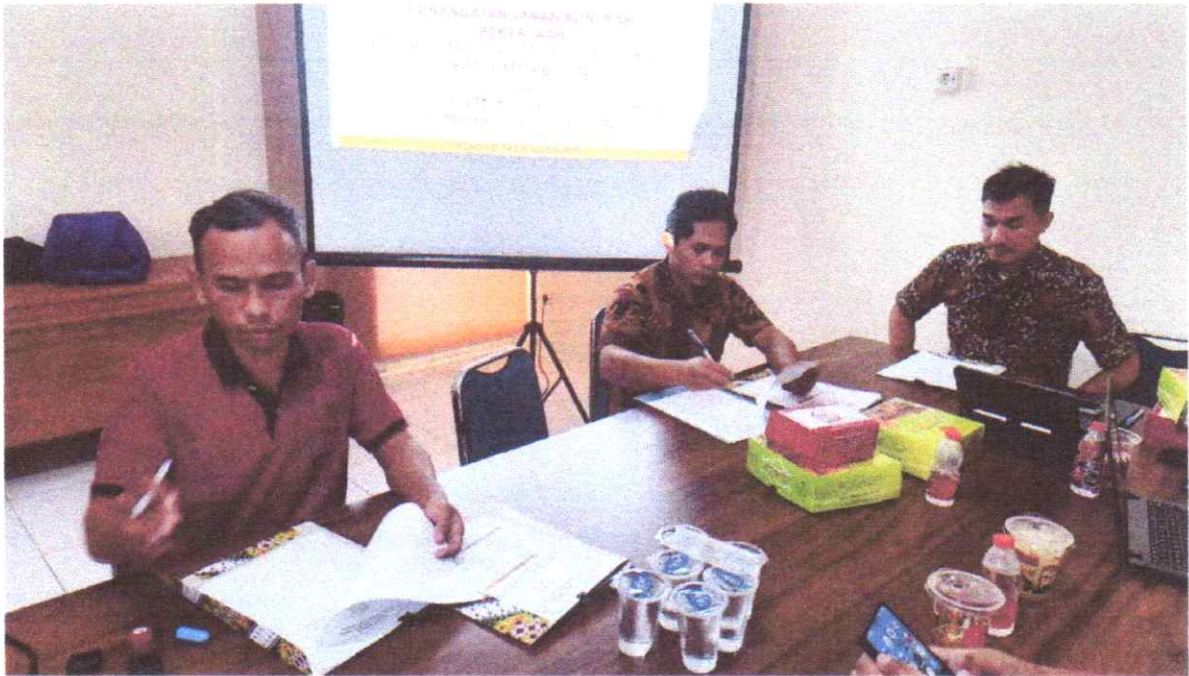


MUH. IRSAN BASALAMAH, S.T., M.T.
NIP. 198706122010011013

Foto Dokumentasi



Foto Dokumentasi





KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

SURAT TUGAS

Nomor : 185 /SPT/Rb14.5/2025

Dalam rangka Rapat Koordinasi Pembinaan Teknis Pelaksanaan BPS dan Monitoring Evaluasi BPS di Pulau Sulawesi, dengan ini kami menugaskan pejabat/staf sebagaimana tercantum dibawah ini untuk melaksanakan tugas/perjalanan dinas dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	Pelaksana SPD	Unit Kerja	Periode Perjalanan Dinas	Tujuan	Transportasi	Pembebanan Anggaran
1	<u>Muh.Irsan Basalamah, S.T., M.T</u> NIP. 19870612 201001 1 013 Kepala Satuan Kerja.	Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra	15 Oktober s.d. 17 Oktober 2025	Kota. Makassar	Transportasi Udara	DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra TA 2025

Kepada pegawai tersebut di atas agar melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan rincian Surat Tugas dan menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan perjalanan dinas.

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari, 14 Oktober 2025

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara


Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T.
NIP. 19870612 201001 1 013

Tembusan :

1. Kepala Balai P3KP Sulawesi III;
2. Arsip.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Pelaksana Perjalanan Dinas : - MUH. Irsan Basalamah, S.T., M.T

Tanggal Perjalanan Dinas : 15-17 Oktober 2025

Tujuan Perjalanan Dinas : Aula Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII
Makassar

Keperluan Perjalanan Dinas : Dalam Rangka Rapat Koordinasi Pembinaan Teknis
Pelaksanaan BSPS dan Monitoring Evaluasi BSPS di
Pulau Sulawesi

I. Pendahuluan

Menindaklanjuti Surat Tugas Nomor 184.4/SPT/Rb14.5/2025 tanggal 13 Oktober 2025 dalam rangka Rapat Koordinasi Pembinaan Teknis Pelaksanaan BSPS dan Monitoring Evaluasi BSPS di Pulau Sulawesi, maka dilaksanakan perjalanan dinas ke Aula Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar.

II. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan Teknis Pelaksanaan BSPS dan Monitoring Evaluasi BSPS di Pulau Sulawesi dilaksanakan oleh Tim Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 16-17 Oktober bertempat di Aula Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar.

III. Jadwal Kegiatan

No	Hari, Tanggal	Kegiatan
1	Selasa, 15 Oktober 2025	- Perjalanan dinas dari Kendari ke Makassar, berangkat dari kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, menuju Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Menggunakan Angkutan Udara melalui Bandara Halu Oleo Kendari menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar - Menuju Ke Tempat Penginapan
2	Rabu, 16 Oktober 2025	Acara di mulai dengan Registrasi peserta, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa pembuka

		• Arahan Dari Direktorat Perdesaan, dilanjutkan dengan Materi 1 Oleh BPS Terkait peran data dan statistic dalam mendukung kebijakan Perumahan, Materi 2 tentang Mekanisme Pelaksanaan BSPS di Wilayah III, dan Materi 3 oleh krisna Mega Riski mengenai Pelaksanaan teknis bangunan sederhana.
3	Kamis, 17 Oktober 2025	• Acara ditutup pada Pagi hari dengan penegasan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antar instansi dan mempercepat capaian Program 3 Juta Rumah. • Kepulangan dari kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan Teknis Pelaksanaan BSPS dan Monitoring Evaluasi BSPS di Pulau Sulawesi

IV. RANGKAIAN KEGIATAN

Kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan Teknis Pelaksanaan BSPS dan Monitoring Evaluasi BSPS di Pulau Sulawesi dilaksanakan sebagai forum strategis untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah Sulawesi. Acara dimulai pada pagi hari dengan registrasi peserta yang berasal dari berbagai unsur perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi, perwakilan dari Kementerian PKP, Koordinator Kabupaten, tenaga fasilitator lapangan. Kegiatan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa, diikuti oleh sambutan pembukaan dari Direktorat Perdesaan dan Perkotaan. Dalam arahannya, menegaskan bahwa program 3 Juta Rumah merupakan bentuk kolaborasi nasional dalam mewujudkan hunian layak bagi rakyat. Disebutkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada gotong royong seluruh pihak pemerintah daerah, pengembang, masyarakat, BUMN, dan organisasi kemasyarakatan. Makna gotong royong disampaikan secara mendalam sebagai semangat khas bangsa Indonesia yang mencerminkan kerja bersama untuk kepentingan umum. Melalui semangat ini, setiap lapisan masyarakat diharapkan turut berperan sebagai ujung tombak di desa dan kelurahan dalam menyukseskan program BSPS dan target 3 juta rumah.

A. Sesi Materi 1 : Peran BPS dalam Penyediaan Data dan Statistik Perumahan

Materi pertama disampaikan oleh Bapak Sapta Hastho Ponco dari Badan Pusat Statistik (BPS). Beliau menjelaskan pentingnya data statistik yang akurat untuk mendukung perumusan kebijakan perumahan. BPS memiliki dua instrumen utama: SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) dan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).

Dalam paparannya, dijelaskan bahwa SUSENAS menghasilkan indikator makro seperti kondisi atap, dinding, lantai, luas hunian, dan akses sanitasi. Sementara DTSEN berperan penting dalam pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat yang telah divalidasi dengan data kependudukan Dukcapil. Materi ini menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga untuk menghasilkan data yang valid, terutama dalam konteks backlog perumahan, baik rumah yang belum dimiliki maupun rumah tidak layak huni. Beliau juga menyampaikan arahan Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, yang menegaskan perlunya penyempurnaan dan integrasi data lintas instansi dalam mendukung pembangunan berbasis data terpadu.

B. Sesi Materi 2 : Mekanisme Pelaksanaan BSPS di Wilayah III

Sesi kedua membahas mekanisme pelaksanaan BSPS di Wilayah III, mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Para peserta diberikan pemahaman tentang tata cara penyaluran bantuan, kriteria penerima, serta pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Sesi ini juga diwarnai dengan diskusi aktif mengenai tantangan di lapangan, seperti kesulitan distribusi bahan bangunan ke daerah terpencil, keterbatasan fasilitator, serta kebutuhan peningkatan kapasitas teknis aparat daerah.

C. Sesi Materi 3 : Pelaksana Teknis Bangunan Sederhana

Materi ketiga disampaikan oleh Bapak Krisna Mega Riski, yang memaparkan aspek teknis pembangunan rumah sederhana. Penjelasan meliputi pemilihan material lokal yang kuat dan terjangkau, standar keamanan struktur, serta desain rumah sederhana yang memenuhi syarat layak huni dan memiliki akses sanitasi memadai.

V. Penutup

kesimpulan rapat dan komitmen bersama untuk memperkuat pelaksanaan BSPS di Pulau Sulawesi. Direktorat menegaskan kembali bahwa semangat gotong royong merupakan kekuatan utama bangsa Indonesia untuk mewujudkan rumah layak bagi seluruh rakyat.

PELAKSANA PERJALANAN DINAS

Kendari, 20 Oktober 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	<u>Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T</u> NIP. 19870612 201001 1 013	Kepala Satuan Kerja	



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

Dalam rangka Rapat Koordinasi Pembinaan Teknis Pelaksanaan BSPS dan Monitoring Evaluasi BSPS di Pulau Sulawesi



Aula Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar



Aula Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar



Aula Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

Dalam rangka Rapat Koordinasi Pembinaan Teknis Pelaksanaan BSPS dan Monitoring Evaluasi BSPS di Pulau Sulawesi



Aula Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar



Aula Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar



Aula Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

Jalan Prof. DR. Soepomo Nomor 197, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870

Jakarta, 30 September 2025

Nomor : UM 0102 - Rk / 59
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (Dua) berkas
Hal : **Undangan Rapat Koordinasi Pembinaan
Teknis Pelaksanaan BSPS dan
Monitoring, Evaluasi BSPS di Pulau
Sulawesi Delineasi Perdesaan**

Yth.

Bapak/Ibu (sesuai daftar terlampir)

Di –

Tempat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program 3 Juta Rumah sesuai Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), maka akan dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan Teknis Pelaksanaan BSPS dan Monitoring, Evaluasi BSPS Delineasi Perdesaan Wilayah III yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Kamis – Jumat / 16 - 17 Oktober 2025**
Waktu : 08.00 WITA s.d. selesai
Tempat : **Aula Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII
Makassar**
Jl. Nuri No. 19, Kec. Mariso, Kota Makassar
Sulawesi Selatan 90121
Agenda : Terlampir

Diharapkan agar Bapak/Ibu dapat mengisi konfirmasi kehadiran paling lambat hari Senin, 13 Oktober 2025 melalui tautan berikut: <https://bit.ly/KonfirmasiKehadiranRakorSulawesi>. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi **Sdri. Aninda (082280078065)/Sdri. Carolina (081294429346)**. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Peningkatan Kualitas
Perumahan Perdesaan

H. Agus Wahidin, S.Pd., M.Si.
NIP. 197104011997101001

Tembusan:

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Lampiran I

Surat Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Nomor : UM 0102 - RK / 59

Tanggal : 30 September 2025

A. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pusat

1. Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan
2. Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan
3. Kepala Subdirektorat Wilayah I Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan
4. Kepala Subdirektorat Wilayah II Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan
5. Tim Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Daerah

1. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II
2. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
3. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah
4. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat
5. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
6. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan
7. Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah
8. Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat
9. Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara
10. Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan

B. Pemerintah Daerah

1. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah
2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi
6. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar
7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur
8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara
9. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Enrekang
10. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng

C. Koordinator Kabupaten

1. Koordinator Kabupaten Sigi
2. Koordinator Kabupaten Polewali Mandar
3. Koordinator Kabupaten Kolaka Timur
4. Koordinator Kabupaten Toraja Utara
5. Koordinator Kabupaten Enrekang
6. Koordinator Kabupaten Soppeng

D. Tenaga Fasilitator Lapangan

1. Tenaga Fasilitator Lapangan Kabupaten Sigi
2. Tenaga Fasilitator Lapangan Kabupaten Polewali Mandar
3. Tenaga Fasilitator Lapangan Kabupaten Kolaka Timur
4. Tenaga Fasilitator Lapangan Kabupaten Toraja Utara
5. Tenaga Fasilitator Lapangan Kabupaten Enrekang
6. Tenaga Fasilitator Lapangan Kabupaten Soppeng

Lampiran II

Surat Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Nomor : UM 0102 - Rk / 56

Tanggal : 30 September 2025

SUSUNAN ACARA

Kamis, 16 Oktober 2025

WAKTU	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 – 11.00	PEMBUKAAN	
08.30 – 08.35	Lagu Indonesia Raya	Panitia
08.35 – 08.45	Sambutan Pemerintah Provinsi	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan
08.45 – 08.50	Pembukaan dan Arahan	Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan
08.50 – 08.55	Sesi Foto Bersama	Panitia
08.55 – 09.00	Pembacaan Doa	
09.00 – 11.30	SESI I	
09.00 – 10.00	Materi Peran BPS dalam Penyediaan Data dan Statistik Perumahan di Provinsi Sulawesi Selatan	Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat
10.00 – 11.00	Mekanisme Pelaksanaan BSPS di Wilayah III	Kepala Subdirektorat Wilayah III
11.00 – 11.30	Profil Kegiatan BSPS di Provinsi Sulawesi Selatan TA 2025	Kepala BP3KP Sulawesi III
11.30 – 12.00	Diskusi dan Tanya Jawab	Panitia
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 16.00	SESI II	
13.00 – 13.30	Pelaksanaan Teknis Bangunan Sederhana BSPS	Krisna Mega Rizki, S.T.
13.30 – 14.00	Diskusi dan Tanya Jawab	
14.00 – 15.30	Desk 1: BP3KP Sulawesi II	Koordinator Desk 1: Budi Hermawan, S.Kom.
	Desk 2: BP3KP Sulawesi III	Koordinator Desk 2: Faizal Febriyanto, S.T.
15.30 – 16.00	Penutup	Panitia

Jumat, 17 Oktober 2025

WAKTU	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
09.00 – selesai	KUNJUNGAN LAPANGAN	
09.00 – selesai	Kunjungan Lapangan ke Kabupaten Toraja Utara dan Soppeng	Koordinator Kab. Toraja Utara : Budi Hermawan, S.Kom.
		Koordinator Kab. Soppeng : Faizal Febriyanto, S.T.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

SURAT TUGAS

Nomor : ~~105~~-2/SPT/Rb14.5/2025

Dalam rangka Monev BSPS dan MC0 Kegiatan Peningkatan Sanitasi Rumah Kab. Buton, dengan ini kami menugaskan pejabat/staf sebagaimana tercantum dibawah ini untuk melaksanakan tugas/perjalanan dinas dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	Pelaksana SPD	Unit Kerja	Periode Perjalanan Dinas	Tujuan	Transportasi	Pembebanan Anggaran
1	<u>Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T</u> NIP. 19870612 201001 1 013 Kepala Satuan Kerja	Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra	17 Oktober s.d. 18 Oktober 2025	Kab. Buton	Transportasi Laut dan Darat	DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra TA 2025
2	<u>Lili damayanto, S.T</u> NIP. 19870907 201001 1 008 PPK Ruswa, PSU, dan KP					

Kepada pegawai tersebut di atas agar melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan rincian Surat Tugas dan menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan perjalanan dinas.

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari, 14 Oktober 2025

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara


Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T.
NIP. 19870612 201001 1 013

Tembusan :

1. Kepala Balai P3KP Sulawesi III;
2. Arsip.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Pelaksana Perjalanan Dinas : Muh. Irsan Basalamah, S.T., M.T.
Lili Damayanto, S.T.
Tanggal Perjalanan Dinas : 17 Oktober – 18 Oktober 2025
Tujuan Perjalanan Dinas : Kabupaten Buton
Keperluan Perjalanan Dinas : Dalam rangka MC 0 Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kabupaten Buton

I. Pendahuluan

Rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan, sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah salah satu kegiatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman untuk mendukung terwujudnya program 3 juta rumah dengan merenovasi dan membangun baru serta meningkatkan kualitas permukiman kumuh rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Undang-undang no 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu lokasi Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah terdapat di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara yang di Lakukan oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Reupblik Indonesia.

II. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kabupaten Buton dilakukan pada tanggal 17 sampai 18 Oktober 2025.

III. Jadwal Kegiatan

Hari / tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
Jumat, 17 Oktober 2025	- Tiba di lokasi Kabupaten Buton - Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kabupaten Buton	
Sabtu, 18 Oktober 2025	- Berangkat dari Kabupaten Buton menuju Kota Kendari	

IV. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kabupaten Buton adalah sebagai berikut :

- Melakukan Koordinasi dengan pemerintah setempat terkait dengan pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kabupaten Buton;
- Mendampingi penerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kabupaten Buton;
- Melakukan Kunjungan Lapangan dan Verifikasi data Calon Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kabupaten Buton.

V. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Proses Kegiatan pendampingan Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan yaitu :

- Koordinasi Pemerintah Kabupaten Buton :
 - Melakukan rapat dengan pemerintah Kabupaten Buton dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan di Kabupaten Buton;
 - Melakukan evaluasi terhadap masalah yang akan dihadapi saat pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kabupaten Buton.
- Kunjungan lapangan, verifikasi penerima bantuan kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kabupaten Buton :
 - Melakukan pengukuran lokasi dan diskusi kepada penerima bantuan di wilayah Kabupaten Buton tentang program Peningkatan kualitas Sanitas Rumah di Kawasan Permukiman Kumuh.

VI. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kabupaten Buton yaitu :

1. Melakukan penyesuaian terhadap alokasi sumber daya (anggaran, waktu, personil) yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kabupaten Buton.
2. Memberikan informasi terkini mengenai perkembangan kegiatan, tantangan yang ada, dan solusi yang mungkin untuk diterapkan dalam program Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kabupaten Buton.
3. Menentukan prioritas kegiatan, menyesuaikan jadwal, dan merumuskan strategi yang akan digunakan untuk program Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kabupaten Buton.
4. Menyusun langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kabupaten Buton.

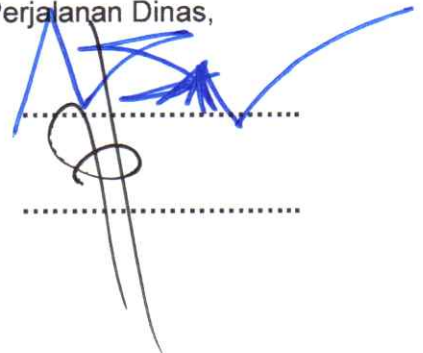
VII. Penutup

Demikian laporan kegiatan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 20 Oktober 2025
Yang Melakukan Perjalanan Dinas,

Muh. Irsan Basalamah, S.T., M.T.
NIP. 198706122010011013

Lili Damayanto, S.T.
NIP. 198709072010011008



LAMPIRAN
DOKUMENTASI MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS
SANITASI RUMAH DI KABUPATEN BUTON



MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS
 SANITASI RUMAH KABUPATEN BUTON



MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENINGKATAN
 KUALITAS SANITASI RUMAH KABUPATEN BUTON



MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN BSPS KABUPATEN BUTON
 SELATAN



MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN BSPS KABUPATEN
 BUTON SELATAN



MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN BSPS KABUPATEN BUTON
 SELATAN



MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN BSPS KABUPATEN
 BUTON SELATAN

LAMPIRAN
DOKUMENTASI MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS
SANITASI RUMAH DI KABUPATEN BUTON



MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS
 SANITASI RUMAH KABUPATEN BUTON



MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENINGKATAN
 KUALITAS SANITASI RUMAH KABUPATEN BUTON



MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN BSPS KABUPATEN BUTON
 SELATAN



MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN BSPS KABUPATEN
 BUTON SELATAN



MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN BSPS KABUPATEN BUTON
 SELATAN



MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN BSPS KABUPATEN
 BUTON SELATAN



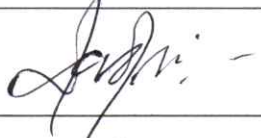
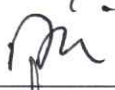
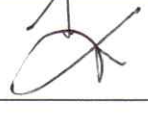
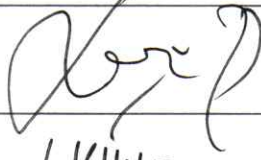
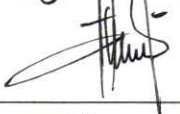
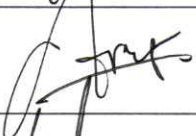
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jalan Malaka Kompleks Ruko Spazia Citra Land K1 No. 1, Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari Kode Pos 93231

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa 121 oktober 2025
Tempat : Ruang Rapat Satker PKP Prov. Sultra
Acara : Arahkan percepatan penyerapan Anggaran dan kegiatan
Lingkup Satker PKP Prov. Sultra

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	M. IRSAN BASALAMAH, ST. MT	Kasaker /KPA	
2	Lili Damayanto		
3	Ica C. Husen	Staf	
4	MARDIANA MUHTAR	PPSPM	
5	Fitriani	Bers.	
6	Indah MH	staf	
7	Hamka, T		
8	ARDIYANTO	MT	
9	LAODE STRATON S	STAF	
10	Moh. Rifal Agustina	staf	
11	Nurul Bidayni S.	staf	
12	Amalia Nur Annisa Rasibo	Staf	
13	Mursyid Hidayat	CPNS	

14	Marbijanah	staf	kurus
15	Muh. Fathriansa Rana	CAV	
16	EKA MUKTI	staf	Cham
17	Ld. Ichsan C	Asker	
18	AUDREY DANI	STAFF	
19	ONI SUSILAWATI M	staf	
20	MUH-MUKHLIS	STAF	
21	AWIDULLAH	TA	
22	Lz Ode Mufi Taufik	— —	
23	Levi Pating		
24	Yuni Kasari A.F.R	— —	
25	Hazmin	SATPAM	
26	Haulin	SATPAM.	
27	ASRAF	TA	
28	ALFENS	STAFF	
29	Fua	STAF	
30	ARUF	STAF	
31	FAIZ	— —	

32	ARZDHAN PRATICA	staf	
33	JENNI	staf	
34	RAHMA	staf	
35	Wd. Vince Annala	staf	
36			
37			
38			
39			
40			



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

NOTULEN RAPAT

Judul Rapat	:	Arahan Percepatan Penyerapan Anggaran dan Kegiatan di Lingkup Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
Hari/Tanggal	:	Selasa/21 Oktober 2025
Waktu	:	11.00 WITA s/d Selesai
Lokasi	:	Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
Tujuan	:	Percepatan Progres untuk 1 minggu Kedepan
Peserta	:	1. Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra 2. PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman 3. Pejabat PPS-PM 4. Bendahara 5. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 6. Semua Kaur di Lingkup PKP Prov. Sultra 7. Staff Satker PKP Prov. Sultra
Agenda Rapat	:	1. Pembukaan Rapat 2. Arahan dan Percepatan Penyerapan Anggaran dan Kegiatan di Lingkup Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
Pimpinan Rapat	:	Muh. Irsan basalamah, S.T.,M.T. selaku Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
Notulis Rapat	:	Eka Mukti, SE

Rapat dimulai dengan pemaparan progres penyerapan sampai dengan tgl 20 Oktober 2025 dan setelah pemaparan kasatker memberi arahan dimana pos pos penyerapan untuk waktu 1 minggu kedepan. Masukan bendahara, untuk penyerapan di khusus kan pengadaan barang, kelengkapan dan atk kantor yang dipercepat.

Tidak lupa juga pendampingan PTT toko untuk kegiatan BSPS, wasdal untuk kegiatan BSPS yang sudah berjalan aktif dilakukan, termaksud juga dengan kendala kendala yang akan di hadapi kedepannya.

Terkhusus untuk Wasdal di Pulau Buton, dikhususkan untuk monitoring kegiatan Peningkatan kualitas permukiman kumuh dan sanitasi rumah. Dikarenakan kegiatan tersebut ini minggu sudah mulai aktif berjalan.

Untuk SK PB yang belum keluar, atau masih menunggu. Satker mengharapkan Komunikasi dengan orang pusat di intenskan, dikarenakan waktu yang semakin dekat dengan akhir tahun.

Setelah arahan dan pembahasan percepatan selesai, acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Kontrak Kerja Bersama Antara PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman, Penyedia Jasa Konstruksi dan Konsultan.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

DOKUMENTASI

Arahan Percepatan Penyerapan Anggaran dan Kegiatan di Lingkup Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara





KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kola Kendari - Kode Pos : 93231

Nomor : 033/UM/Rb14.5.2/2025
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Persiapan
Penandatanganan Kontrak

Kendari, 23 Oktober 2025

Kepada Yth.

Direktur CV. KARYA KALUKKU

di -

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan hasil pemilihan penyedia pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanowajo III Kabupaten Buton yang telah menetapkan CV. Karya Kalukku sebagai calon pemenang, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada:

Hari,Tanggal : Senin, 27 Oktober 2025

Waktu : 13.00 WITA s.d. Selesai

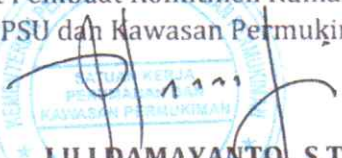
Tempat : Ruang Rapat Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kompleks Ruko Spazia Citraland K1 No.1, Kota Kendari

Berkenaan dengan pentingnya kegiatan ini, maka kehadiran Direktur tidak dapat diwakili, serta menghadirkan personil inti sesuai dokumen penawaran guna klarifikasi dan penegasan kesediaan bekerja. Adapun agenda rapat yaitu sebagai berikut:

- Verifikasi kelengkapan dokumen sebelum penandatanganan kontrak;
- Konfirmasi kesiapan pelaksanaan pekerjaan, termasuk ketersediaan jaminan pelaksanaan, alat, dan rencana kerja;
- Klarifikasi dan komitmen personel inti yang tercantum dalam dokumen penawaran;
- Penandatanganan Berita Acara PAM sebagai dasar penandatanganan kontrak.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya,
PSU dan Kawasan Permukiman


LILI DAMAYANTO S.T.
NIP. 198709072010011008

Tembusan:

- Kasubdit Wilayah III Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman di Jakarta;
- Kepala Balai P3KP Sulawesi III di Makassar;
- Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra di Kendari;
- Arsip.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No 1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

DAFTAR HADIR

Agenda : Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

Hari, Tanggal : Senin, 27 Oktober 2025

Tempat : Kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi
Tenggara

No.	Nama	Instansi/ Badan Usaha	Jabatan	Tanda Tangan
1	NOH ISAN BASALANAH	Satker PKP	Kasatker	
2	Ica C. Huren	Satker PKP Sultra	staf	
3	Lili Darmayanto	satker pkp	ppk	
4	Fird Ashnd	Satker PKP sultra	staf	
5	Muntar	SATKER PKP sultra	pp	
6	ROSDI	CV. KARYA KALUKU	DIREKTUR	
7	HERMAN T.	— II —	MANAJER TAMU	
8	IMRON	— II —	Wc-Direktur	
9	Moh. Rizki	— II —	PERSONIL - PELAKSANA	
10	IMDE YOSIN	— II —	PERSONIL K3	
11	ELSYAD, P.	CV. KARYA K	MANAJER FINANCE	



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

DAFTAR HADIR

Agenda : Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

Hari, Tanggal : Senin, 27 Oktober 2025

Tempat : Kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi
Tenggara

No.	Nama	Instansi/ Badan Usaha	Jabatan	Tanda Tangan
12	ARDAN PRATISCTA	KEMEN PKP SULTRA	STAF	
13	ARIEF DEDY	— " —	— " —	
14	MUH. MUKHLIS	Satker PIP Sultra	staf	
15	Yuni Ikasari Arif R	Satker PIP Sultra	staf	
16	Marbijanah	Satker staf PKP sultra	staf	
17	MARHADIANTO	— " —	staf	
18	Lewi.P	— " —	— " —	
19	WISULIAKTY. M	— " —	staf	
20	ARDIYANU	— " —	staf	
21	Ld. Giongin	— " —	staf	
22	EKA MUKTI	— " —	staf	

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No. 1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

DAFTAR HADIR

Agenda : Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

Hari, Tanggal : Senin, 27 Oktober 2025

Tempat : Kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

[illegible]



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No 1 Kel. Anduonghu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos. 93231

BERITA ACARA RAPAT PERSIAPAN PENANDATANGANAN KONTRAK

Nomor : 008/BA/Rb14.5.2/2025

Pada hari ini, Senin tanggal 27 Bulan Oktober Tahun 2025, bertempat di Kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dilaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanowajo III Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Rapat dipimpin oleh PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman Prov. Sulawesi Tenggara dihadiri oleh Kasubdit Wilayah III Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (melalui *Zoom Meeting*), Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sulawesi Tenggara, Direktur Pemenang Tender CV. Karya Kalukku, Kaur Teknis dan Kaur Administrasi PPK Ruswa, PSU, dan Kawasan Permukiman, staf Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sulawesi Tenggara.

Rapat diawali dengan sambutan dari Kasubdit Wilayah III Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sulawesi Tenggara kemudian dilanjutkan dengan pembahasan persiapan penandatanganan kontrak pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanowajo III Kabupaten Buton Prov. Sulawesi Tenggara.

Adapun maksud dan tujuan diselenggarakan rapat adalah guna membahas persiapan penandatanganan kontrak pada pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanowajo III Kab. Buton Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2025, menyamakan persepsi dan juga menemukan kesepakatan terhadap hal-hal spesifik yang berhubungan dengan dokumen kontrak, dan sebagai bentuk tertib administrasi sebuah proyek dalam tahapan pekerjaan, karena tahap perencanaan dan tahap pemilihan penyedia jasa juga menjadi bagian integral dari kegiatan proyek konstruksi, dengan hasil dan kesimpulan rapat :

1. Bentuk jaminan pelaksanaan adalah garansi bank dengan nilai sebesar 5% dari nilai kontrak berlaku minimum selama waktu pelaksanaan pekerjaan;
2. Jenis-jenis jaminan yang akan digunakan selama masa kontrak :
 - a. Jaminan Pelaksanaan : Garansi Bank sebesar 5% dari nilai kontrak
 - b. Jaminan Uang Muka : Garansi Bank sebesar 30% dari nilai kontrak
 - c. Jaminan Pemeliharaan : Garansi Bank sebesar 5% dari nilai kontrak
3. Dalam pelaksanaan pekerjaan tidak diperkenankan adanya perubahan kontrak yang dikarenakan terjadinya eskalasi harga;



4. Dalam penyelesaian pekerjaan, Penyedia Jasa CV. Karya Kalukku sanggup melaksanakan pekerjaan hingga akhir Desember 2025;
5. Disepakati Denda keterlambatan pekerjaan adalah 1/1000 dari sisa nilai kontrak;
6. Waktu pemeliharaan pekerjaan disepakati selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal PHO;
7. Penyedia jasa bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan pekerjaan hingga hasil pekerjaan, dan tidak akan memberikan pekerjaan kepada pihak lain;
8. Berdasarkan point 7 (tujuh) diatas, direktur CV. Karya Kalukku sebagai pemenang tender dengan ini menyatakan dengan benar bahwa CV. Karya Kalukku yang akan melaksanakan pekerjaan dari awal pekerjaan hingga akhir pekerjaan;
9. Penyedia Jasa CV. Karya Kalukku menjamin bahwa Personil yang terdiri dari pelaksana lapangan dan tenaga K3 dapat dihadirkan dan bertugas penuh waktu pada pelaksanaan pekerjaan sesuai dokumen penawaran pekerjaan pada saat tender.

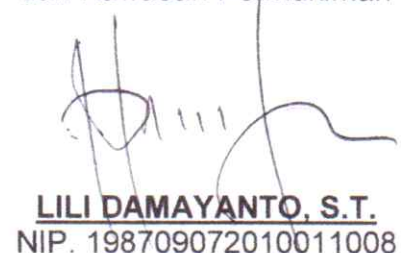
Demikian berita acara rapat ini dibuat dan ditandatangani bersama, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara



MUH. IRSAN BASALAMAH, S.T., M.T.
NIP. 198706122010011013

PPK Rumah Swadaya, PSU
dan Kawasan Permukiman



LILI DAMAYANTO, S.T.
NIP. 198709072010011008

CV. KARYA KALUKKU



ROSADI
Direktur

Kaur Teknik
PPK Rumah Swadaya, PSU dan
Kawasan Permukiman



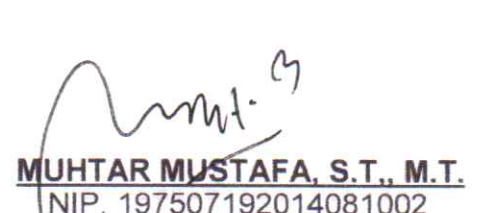
FUAD ASHAD L., S.T., M.Arch.
NIP. 198909172025211058

Kaur Administrasi
PPK Rumah Swadaya, PSU
dan Kawasan Permukiman



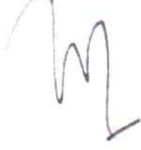
ICA CAPRIYATI HUSEN, S.T.
NIP. 199306162018022001

Perjabat Pengadaan
Barang/Jasa,



MUHTAR MUSTAFA, S.T., M.T.
NIP. 197507192014081002

CV. KARYA KALUKKU



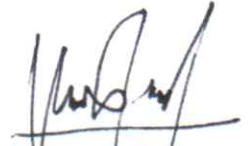
IMRAN
Wakil Direktur

CV. KARYA KALUKKU



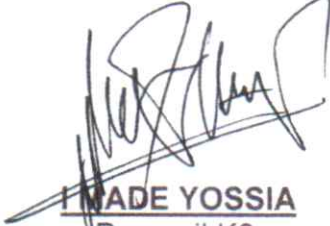
HERMAN T.
Manajer Teknik

CV. KARYA KALUKKU



MOH. RIZKI
Pelaksana

CV. KARYA KALUKKU



I MADE YOSSIA
Personil K3

CV. KARYA KALUKKU



ERSYAD R.
Manajer Finance

DOKUMENTASI



DOKUMENTASI





KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jalan Malaka Kompleks Ruko Spazia Citra Land K1 No. 1, Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari Kode Pos 93231

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : 28 - 10 - 2023

Tempat : U.1 RUANG RAPAT SATKER SULTRA.

Acara : FGD Realisasi penyusunan FLPP di SULTRA.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MUH IRSAN BASALAMAH	KASATKER	
2	ISHAK HASABU	BNI	
3	Hetty Herawaty	BNI	
4	Marzuki	BTN	
5	Andi Ratu Alam	BTN	
6	DANANG SUTARNO	REI	
7	SIRAJUDDIN	HIMPERA	
8	STEVE MUKIRIWARU SE	HIMPERA	
9	Aswar Anawir	BR1	
10	Wahana	REI	
11	Andi Budi P.	BTN Syariah	
12	Muhammad Iltam	BANK MANDIRI	
13	Seriky Monica	MANDIRI	

[illegible]



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citrailand Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

NOTULEN RAPAT

Judul Rapat	:	FGD Realisasi Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Provinsi Sulawesi Tenggara
Hari/Tanggal	:	Selasa/28 Oktober 2025
Waktu	:	13.00 WITA s/d Selesai
Lokasi	:	Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
Tujuan	:	1. Pembahasan progres penyaluran FLPP tahun 2025 2. Pembahasan realisasi pembangunan rumah subsidi FLPP tahun 2025
Peserta	:	1. Kepala Satuan Kerja PKP Prov. Sulawesi Tenggara 2. Kepala Seksi Wilayah I Balai P3KP Sulawesi III 3. Kepala Seksi Wilayah II Balai P3KP Sulawesi III 4. Staf Seksi Wilayah II Balai P3KP Sulawesi III 5. Staf Satker PKP Prov. Sulawesi Tenggara 6. Pimpinan PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Cab. Kendari 7. Pimpinan PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cab. Kendari 8. Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Cab. Kendari 9. Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cab. Kendari 10. Pimpinan PT. Bank Mandiri Cab. Kendari 11. Pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Cab. Kendari 12. Ketua DPD Apersi Prov. Sulawesi Tenggara 13. Ketua DPD Rei Prov. Sulawesi Tenggara 14. Ketua DPD PI Prov. Sulawesi Tenggara 15. Ketua DPD Himpera Prov. Sulawesi Tenggara
Agenda Rapat	:	1. Pembukaan Rapat 2. Arahkan dan Percepatan Pemantauan dan Pendataan Realisasi Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Perumahan di Prov. Sulawesi Tenggara 3. Diskusi
Pimpinan Rapat	:	Muh. Irsan basalamah, S.T.,M.T. selaku Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
Notulis Rapat	:	Eka Mukti, SE

Rapat dimulai dengan pemaparan Kasatker PKP Prov. Sultra tentang target, rencana dan upaya pembangunan dan renovasi 3 juta rumah. Target 3 juta rumah terbagi 3 bagian yaitu 1 juta rumah di Perkotaan, 1 juta rumah di Perdesaan dan 1 juta rumah di Pesisir. Rencana pembangunan 3 juta rumah yaitu Negara, Pengembang, Swadaya dan Gotong Royong, tetapi untuk diskusi saat ini kita hanya membahas masalah Negara yang didalamnya program FLPP. Upaya untuk mencapai 3 juta rumah tersebut menyediakan dukungan likuiditas Bank Indonesia untuk menambah pembiayaan rumah subsidi FLPP dan Rumah Komersial, Pemanfaatan tanah negara untuk pembangunan rumah MBR, Data DTSEN yang tepat sasaran, melakukan inisiasi Pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan, Proyek Strategis Nasional berbasis program, dukungan para stakeholder melalui kolaborasi dan koordinasi serta investasi luar negeri serta Penjara menjadi Rumah.

Saat ini di Satker PKP Prov. Sultra sudah membuat form pendataan untuk Asosiasi terkait pendataan terupdate pembangunan rumah FLPP. Form pendataan berisi antara lain, Nama Perumahan dan Pengembang serta Bank Penyalur, Alamat Perumahan, Koordinasi Lokasi, Rumah terbangun, Fasilitas Umum, Infrastruktur dll. Form pendataan bukan hanya untuk Asosiasi, tetapi Bank Penyalur juga mempunyai form pendataan, antara lain yang berisi Jumlah Unit FLPP terupdate, Bulan Realisasi, Nama Perumahan dan Kab./Kota.

Peraturan Menteri PKP No. 9 tahun 2025 tentang kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat MBR yaitu sebagai wujud amanat konstitusi.

SBUM saat ini sangat tidak dikenal oleh masyarakat luas, apakah seimbang antara realisasi SBUM dan FLPP ?? Pasti tidak, SBUM tidak setenar FLPP. Kata kasatker, pemerintah pusat melalui Balai P3KP Sulawesi III dan Satker PKP Prov. Sulawesi Tenggara akan terus mensosialisasikan program SBUM ini.

Balai P3KP Sulawesi III membukan Layanan Klinik PKP, apa substansi layanan klinik pkp, yaitu program, kebijakan/regulasi dan jenis bantuan, perencanaan dan pembiayaan rumah sederhana, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi, pemanfaatan rumah, penanganan dan pencegahan kawasan kumuh, fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat

Apa itu klinik PKP, Tujuan PKP, Manfaat dan Informasi apa saja mohon segera hubungi layanan ini. Ada juga program benar PKP, yang bisa pengaduan via telepon yang tertera pada slide dilayar.

Program yang terakhir ini sangat berkaitan dengan diskusi hari ini, yaitu Program SKB Tiga Menteri yaitu Gratis BPHTB, Gratis PBG dan Gratis PPNDTP. Ketiga program ini sangat, sangat berkaitan dengan FLPP. Kelancaran FLPP tergantung dari berjalannya program skb tiga menteri ini

Masukan dan arahan dilanjutkan oleh Bapak Nur Ali selaku Kepala Seksi Wilayah II untuk mempercepat dan mempermudah data FLPP sehingga bisa dijadikan acuan untuk percepatan program FLPP kedepannya

Ibu Andi Ayu selaku kepala seksi wilayah I meminta data per bulan paling lama tanggal 5 untuk menyampaikan data realisasi pasti FLPP perbulan. Sehingga tidak ada selisih antara data dari Bank dan data dari Asosiasi/Pengembang.

Ibu Andi Ayu juga memaparkan Sosialisasi Kredit Program Perumahan

Latar belakang Kredit Program Perumahan yaitu program 3 juta rumah. Diperlukannya relaksasi kebijakan KUR untuk mendorong pelaku usaha sektor terkait perumahan menyediakan produk perumahan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat

Adaun manfaat Kredit Program Perumahan yaitu Menambah Suplai Perumahan, Multiplier Efek

Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Resiko yang Rendah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama dari Kredit Program Perumahan yaitu Mendorong Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Plafon KK yang Optimal, Ketetapan Sararan, Kualitas Kredit yang Terkendali dan Peningkatan Jumlah Debitur yang Berhasil Graduasi.

Untuk saat ini, kita hanya melihat KPP dari segi penyedia dulu, yaitu Pengembang Perumahan, Penyedia Jasa Konstruksi dan Pedagang Bahan Bangunan. Dana KPP diperuntukan untuk Pengadaan Tanah, Pembelian Bahan Bangunan dan/atau Pengadaan Barang dan Jasa guna membangun rumah atau perumahan. Adapun jenis rumah sebagai objek KPP yaitu Rumah dan Perumahan.

Adapun Persyaratan untuk pengajuan KPP yaitu :

1. Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia
2. Memiliki Usaha Produktif dan Layak
3. Memiliki Nomor Wajib Pajak
4. Memiliki NIB
5. Menjalankan Usaha Paling Singkat 6 Bulan Lamanya
6. Tidak Terdapat Informasi Negatif Dengan Hasil Trening Bank Checking
7. Tidak Sedang Menerima KUR Secara Bersamaan
8. Dapat Sedang Menerima Kredit/Pembiayaan Komersial yang Berlaku di Penyalur KPP
9. Tidak Sedang Menerima Bantuan Pemerintah Secara Bersamaan
10. Memberi Agunan Pokok
11. Dapat di Berlakukan Agunan Tambahan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku

DISKUSI

Pak Ishak, Dari Bank BNI Cabang Kendari

Di Karenaan BNI ada 2 Cabang, yaitu di Kota Kendari dan Kota BauBau, Pihak kami meminta untuk dibuatkan link sy pendataan FLP tidak terlalu rumit dilakukan.

Sampai saat ini tidak ada masalah dalam penyaluran FLPP, tetapi data memang blum bisa kami pastikan untuk saat ini, tetap Bank BNI sendiri mendukung penuh Program Perumahan khususnya FLPP

Terkait KPP, kami sudah mendapat arahan, dan sudah bertemu dengan beberaa Asosiasi guna membahas, kelancaran, kemudahan dan apa saja yang akan menjadi kendari bagi pihak bank dan pengembang dalam mengambil KPP tersebut

Pak Marzuki, Dari Bank BTN Cabang Kendari

Sampai dengan Oktober FLPP di Bank BTN Cabang Kendari mencapai 2.650 Unit. Permasalahan sampai saat ini terjadi di pihak pengembang yaitu, keterlambatan bangunan yang terbangun

Untuk saat ini, sudah ada beberapa KPP yang kami proses, mungkin tercapai atau tidak nya KPP tersebut akan kami bahas sama2 di forum yang mendatang

Dari Bank BRI Cabang Kendari

Bank BRI mempunyai 5 Cabang di Sulawesi Tenggara, tetapi FLPP terfokus pada Kota Kendari dan Kab. Kolaka. Untuk FLPP sendiri kisaran 1.000 Unit. Mungkin nanti nilai pastinya akan di share ke link yang di kasih pihak Satker

Dari BTN Syariah

Tidak ada kendala yang berat untuk program FLPP, sampai saat ini BTN Syariah sudah memproses FLPP kurang lebih 2.000 Unit Rumah. Tetapi Program KPP kami belum mulai,ihak BTN Syariah masih menargetkan FLPP sebagai prgram no. 1.

Pihak BTN Syariah juga meminta Pihak pemerintah pusat rajin memsosialisasikan SBUM utnuk lebih dikenal lagi

Dari Bank Mandiri

Untuk FLP kurang lebih 300 Unit, untuk KPP kami baru mendapat surat resmi/edaran untuk mensosialisasikan KPP

Asosiasi REI

Menindaklanjuti BPHPB SK TIGA MENTERI, proses nya berjalan lancar, tetapi banyak terjadi masalah dikalangan bawah, termaksud perizinan dan kendala waktu dan biaya

Asosiasi HIMPERA

Coleg data, hambatan pengembang dan developer agak privat atau kurang maksimal untuk membagi data

PBHTB dan Penerbitan PBG sudah tidak berjalan sebagaimana kita tau, dikarenakan perubahan yang terjadi di pimpinan daerah

Kedepannya FGD seperti ini harus ada kerja sama lintas sektor, kami dari Asosiasi mendukung penuh dan meminta Kepala Dinas PKP, Kepala Dinas PU dan Kepala BAPENDA harus di undang juga, di karenakan dari meraka yang seharusnya bersinergi untuk memperlancar SK TIGA MENTERI

Asosiasi APERSI

Instruksi dari Bapak Menteri PKP sangat multitafsir. Berbeda dengan proses yang kita lihat di media sosial, bagaimana itu SK TIGA MENTERI berjalan dengan sukses, bagaimana itu PBHTB di gratiskan berjalan dengan lancar, Bagaimana itu PBG berjalan dengan lancar. tetapi yang terjadi dilapangan tidak seperti itu, sangat sangat berbeda dengan apa yang kita lihat di media sosial.

Bapak Menteri tidak melihat administrasi sebelum terbitnya PBHTB dan PBG, kalau membuat PBHTB dan PBG Cuma 1 jam, 2 jam atau 10 menit tidak masalah, tetapi berkas yang di perlukan untuk membuat PBHTB dan PBG itu banyak dan bisa makan waktu sampai 6 bulan lamanya. sekarang pun site plan itu di sidangkan, itu akan memperlambat proses pembuatan SK TIGA MENTERI tersebut.

Semoga kita semua sadar.. Gratisnya PBHTB dan PBG itu membuat salah satu pos pemasukan daerah itu hilang. Semoga ini menjadi perhatian kita semua.

PENUTUP OLEH KEPALA SATKER PKP SULAWESI TENGGARA

Saya Mengharapkan kepada semua Asosiasi untuk mempercepat pembangunan perumahan, karena masalah Bank untuk Program FLPP yaitu Pembangunan Perumahan

dan Asosiasi, terima kasih atas masukan, saran dan kritiknya terhadap kami, kami akan tampung semua. Dan kami akan membahas kepada pihak diatas dengan apa yang terjadi di lapangan sampai saat ini

Saya tetap mengarahkan kepada teman teman di Satker untuk memperhatikan data, pengaduan, keluhan dan masukan bapak ibu sekalian

Saya sangat berterima kasih kepada bapak ibu sekalian, berkenan hadir di FGD ini, semoga kedepannya atau di pertemuan selanjutnya, undangan akan kami tambah guna memperlancar program Kementerian PKP. Terima Kasih Banyak



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

DOKUMENTASI

FGD Realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Provinsi Sulawesi Tenggara





KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

SURAT TUGAS

Nomor : 198.1 /SPT/Rb14.5/2025

Dalam rangka Koordinasi ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dan Menghadiri Undangan Pemantauan dan Verifikasi Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian PKP , dengan ini kami menugaskan pejabat/staf sebagaimana tercantum dibawah ini untuk melaksanakan tugas/perjalanan dinas dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	Pelaksana SPD	Unit Kerja	Periode Perjalanan Dinas	Tujuan	Transportasi	Pembebanan Anggaran
1	<u>Muh.Irsan Basalamah, S.T., M.T</u> NIP. 19870612 201001 1 013 Kepala Satuan Kerja.	Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra	3 November s.d. 5 November 2025	Kota. Makassar	Transportasi Udara	DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra TA 2025

Kepada pegawai tersebut di atas agar melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan rincian Surat Tugas dan menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan perjalanan dinas.

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari, 31 Oktober 2025

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara

Muh. Irsan Basalamah, S.T., M.T.
NIP. 19870612 201001 1 013

Tembusan :

1. Kepala Balai P3KP Sulawesi III;
2. Arsip.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Pelaksana Perjalanan : - Muh Irsan Basalamah, S.T., M.T
Dinas

Tanggal Perjalanan Dinas : 3 - 5 November 2025

Tujuan Perjalanan Dinas : Kantor Balai P3KP Sulawesi III dan Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Jl. Karaeng Bontotangga 1, Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulsel 90221

Keperluan Perjalanan Dinas : Dalam rangka Koordinasi ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dan Menghadiri Undangan Pemantauan dan Verifikasi Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian PKP.

I. Pendahuluan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan serta pengawasan program di lingkungan Kementerian PKP, khususnya pada sektor penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman, telah dilaksanakan kegiatan **koordinasi ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi III.**

Kegiatan ini juga dilaksanakan sekaligus untuk **menghadiri undangan kegiatan Pemantauan dan Verifikasi Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di lingkungan Kementerian PKP**, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah ditindaklanjuti secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan koordinasi ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara unit pusat dan satuan kerja di daerah dalam rangka peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program, serta perbaikan tata kelola penyelenggaraan kegiatan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja BP3KP Sulawesi III.

II. Jadwal Kegiatan

No	Hari, Tanggal	Kegiatan
1	Senin, 3 November 2025	• Perjalanan dinas dari Kendari ke Makassar, berangkat dari kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, menuju Kota Makasar, Prov. Sulse Menggunakan Angkutan Udara melalui Bandara Halu Oleo Kendari menuju Bandar Udara Sultan Hasanuddin.. • Menuju Ke Kantor Balai BP3KP Sulawesi III.
2	Selasa, 4 November 2025	• DESK : Verifikasi Tindak Lanjut LHP BPK (Dokumen administrai dan setoran).
3	Rabu, 5 November 2025	• DESK : Verifikasi Tindak Lanjut LHP BPK (Dokumen administrai dan setoran).

III. Rangkaian Kegiatan

Tujuan Koordinasi

Koordinasi dilakukan untuk membahas pelaksanaan program dan kegiatan penyediaan perumahan serta penataan kawasan permukiman di wilayah kerja Sulawesi III, termasuk sinkronisasi data, progres kegiatan, dan rencana tindak lanjut antara BP3KP Sulawesi III dan pihak terkait.

Pokok Pembahasan

1. Paparan BP3KP Sulawesi III:

- Capaian program penyediaan rumah layak huni dan pengembangan kawasan permukiman tahun berjalan.
- Identifikasi lokasi prioritas dan kendala teknis di lapangan.
- Progres pembangunan rumah khusus, rumah susun, serta bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

2. Masukan dari [Instansi Anda]:

- Dukungan terhadap pelaksanaan program perumahan di daerah.
- Usulan integrasi program dengan rencana tata ruang wilayah dan infrastruktur pendukung.

- Penegasan perlunya koordinasi lintas sektor dalam penentuan lokasi dan verifikasi penerima manfaat.

3. **Permasalahan dan Tantangan:**

- Keterbatasan anggaran dan lahan.
- Kesesuaian data penerima manfaat.
- Sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

4. **Rencana Tindak Lanjut:**

- Pembaruan data lokasi dan penerima manfaat.
- Penjadwalan monitoring lapangan bersama.
- Penyusunan laporan kemajuan dan rekomendasi kebijakan lanjutan.

Kesimpulan

Koordinasi berjalan dengan baik dan menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara BP3KP Sulawesi III dan pemerintah daerah dalam percepatan penyediaan perumahan layak dan penataan kawasan permukiman berkelanjutan.

Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pemantauan dan verifikasi atas **dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP)**, baik oleh **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)** maupun **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**, dalam rangka memastikan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan, lengkap secara administrasi, serta didukung dengan bukti fisik maupun dokumen setoran yang sah.

Pokok Pembahasan

1. **Verifikasi Dokumen Administrasi:**

- Pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung hasil tindak lanjut LHP BPK, meliputi surat pertanggungjawaban, berita acara, kontrak, dan dokumen pendukung lainnya.
- Evaluasi kesesuaian bukti tindak lanjut dengan rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah disampaikan.

2. **Verifikasi Dokumen Setoran:**

- Pemeriksaan bukti setor ke kas negara atas temuan yang bersifat finansial.
- Validasi keaslian dan kesesuaian nilai setoran dengan temuan hasil audit BPK.

3. **Desk Verifikasi:**

- Pelaksanaan desk verifikasi dilakukan secara langsung bersama tim Itjen untuk mengklarifikasi dokumen dan memastikan status penyelesaian tiap butir temuan.
- Pemberian catatan atau rekomendasi tambahan terhadap dokumen yang masih perlu dilengkapi atau diperbaiki.

4. Permasalahan yang Ditemui:

- o Beberapa dokumen pendukung belum lengkap atau belum tersusun secara sistematis.
- o Perlu koordinasi lanjutan dengan satuan kerja terkait untuk melengkapi bukti tindak lanjut.

Kesimpulan dan Tindak Lanjut

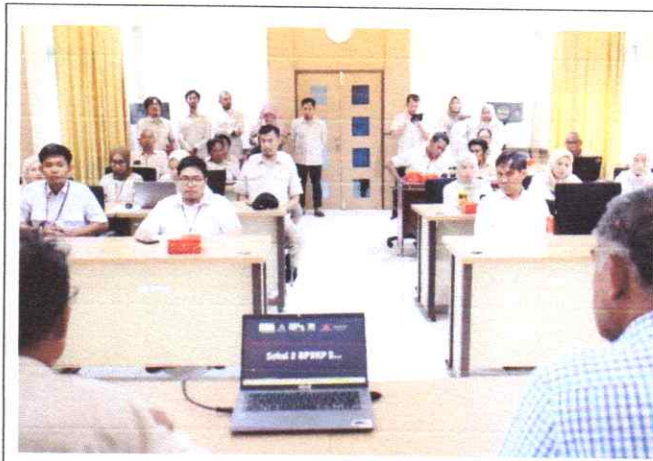
- Kegiatan berjalan dengan baik dan seluruh pihak menunjukkan komitmen untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai ketentuan.
- BP3KP Sulawesi III diminta segera melengkapi dokumen pendukung dan bukti setoran yang belum lengkap.
- Itjen Kementerian PKP akan melakukan pemantauan lanjutan terhadap progres penyelesaian TLHP BPK.
- Diperlukan penguatan koordinasi antara satuan kerja, unit teknis, dan Itjen dalam penyusunan laporan TLHP berikutnya.

PELAKSANA PERJALANAN DINAS

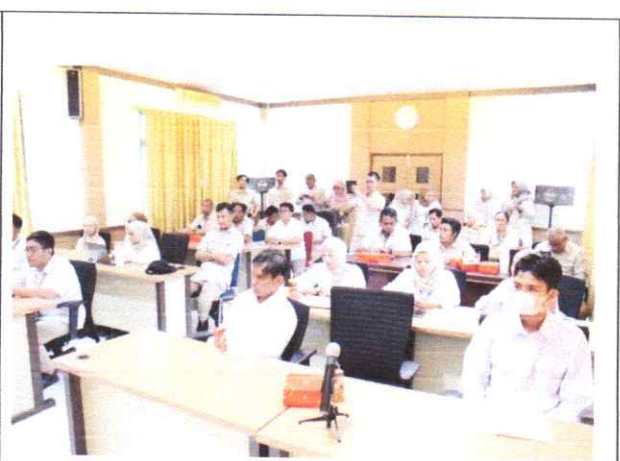
Kendari, 10 November 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	<u>Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T</u> NIP. 19870612 201001 1 013	Kepala Satuan Kerja	

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN



Koordinasi ke Kantor BP3KP Sulawesi III



Koordinasi ke Kantor BP3KP Sulawesi III



Rangkaian Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut
Laporan Hasil BPK



Rangkaian Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut
Laporan Hasil BPK



Rangkaian Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut
Laporan Hasil BPK



Dokumentasi Sewa Kendaraan



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN INSPEKTORAT JENDERAL

Wisma Mandiri 2, Jl. Kebon Sirih No.83, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340

Nomor : UM 0102-lj/49
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Pemantauan dan Verifikasi Dokumen
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jakarta, 23 Oktober 2025

Yth.
(Daftar Undangan Terlampir)
di Jakarta

Dalam rangka penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas SPI dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian PUPR TA. 2024 Nomor 12.b/LHP/XVII/05/2025 Tanggal 19 Mei 2025 dan LHP Atas Laporan Keuangan BA 999.07 – Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SBK) Tahun 2024 Nomor 10/LHP/XVII/05/2025 Tanggal 19 Mei 2025. Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat Pemantauan dan Verifikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin-Jumat, 03 - 07 November 2025
Waktu : 08.00 WIB - selesai
Lokasi : Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Jl. Karaeng Bontotangnga 1, Karunrung, Kec. Rappocini, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan 90221
Agenda : 1. Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
2. Verifikasi Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Mengingat pentingnya kegiatan verifikasi tindak lanjut LHP BPK ini, maka Kepala Satuan Kerja dan PPK agar datang tepat waktu dan tidak boleh diwakilkan dengan membawa dokumen tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi serta diupload ke dalam tautan <https://bit.ly/TLBPKRITA2024LK> dan <https://bit.ly/TLBPKRITA2024BUN>.

Panita menanggung biaya tiket pesawat, penginapan dan uang harian pada tanggal 03 - 07 November 2025 untuk peserta Balai dan Satker Daerah. Konfirmasi kehadiran mengisi tautan <https://bit.ly/PESERTATLLHP>. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdr. Kenny Hp. 0851 7524 4692 dan Sdr. Bhenhony Hp. 0853 9716 0033.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih

Inspektur Jenderal Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman,



Dr. Heri Jerman, S.H., M.H.
NIP 196610151993031004

Tembusan:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Arsip.

Lampiran II

Surat Inspektur Jenderal

Nomor : UM 0102-Ij/49

Tanggal : 23 Oktober 2025

**JADWAL KEGIATAN
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TA.2024
NOMOR 12.B/LHP/XVII/05/2025 TANGGAL 19 MEI 2025 DAN
NOMOR 10/LHP/XVII/05/2025 TANGGAL 19 MEI 2025**

NO.	HARI / TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Senin, 03 November 2025	08.00 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
		08.30 - 09.00	Pembukaan	Inspektur Jenderal
		09.00 - 10.00	Pemaparan Progres Tindak Lanjut Atas Rekomendasi BPK RI	Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal Kementerian PKP
		10.00 - 11.00	Mekanisme Verifikasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Inspektorat Jenderal Kementerian PKP
		11.00- 12.00	Tanya Jawab	
		12.00 - 13.00	ISHOMA	Panitia
		13.00 - 17.00	DESK : Verifikasi Tindak lanjut LHP BPK (dokumen administrasi dan setoran)	1. Tim Verifikasi Inspektorat I, II, III dan BI; 2. Biro Keuangan & BMN Kementerian PKP; 3. Unit Organisasi; 4. Satker Terkait.
2	Selasa, 04 November 2025	08.00 - 10.00	DESK : Verifikasi Tindak lanjut LHP BPK (dokumen administrasi dan setoran)	1. Tim Verifikasi Inspektorat I, II, III dan BI; 2. Biro Keuangan & BMN Kementerian PKP; 3. Unit Organisasi; 4. Satker Terkait.
		10.00 - 12.00	DESK : Verifikasi Tindak lanjut LHP BPK (dokumen administrasi dan setoran)	1. Tim Verifikasi Inspektorat I, II, III dan BI; 2. Biro Keuangan & BMN Kementerian PKP; 3. Unit Organisasi; 4. Satker Terkait.
		12.00 - 13.00	ISHOMA	Panitia
		13.00 - 15.00	DESK : Verifikasi Tindak lanjut LHP BPK (dokumen administrasi dan setoran)	1. Tim Verifikasi Inspektorat I, II, III dan BI; 2. Biro Keuangan & BMN Kementerian PKP; 3. Unit Organisasi; 4. Satker Terkait.
		15.00 - 17.00	DESK : Verifikasi Tindak lanjut LHP BPK (dokumen administrasi dan setoran)	1. Tim Verifikasi Inspektorat I, II, III dan BI; 2. Biro Keuangan & BMN Kementerian PKP; 3. Unit Organisasi; 4. Satker Terkait.
3	Rabu, 05 November 2025	08.00 - 10.00	DESK : Verifikasi Tindak lanjut LHP BPK (dokumen administrasi dan setoran)	1. Tim Verifikasi Inspektorat I, II, III dan BI; 2. Biro Keuangan & BMN Kementerian PKP; 3. Unit Organisasi; 4. Satker Terkait.
		10.00 - 12.00	ISHOMA	Panitia
		13.00- 15.00	DESK : Verifikasi Tindak lanjut LHP BPK (dokumen administrasi dan setoran)	1. Tim Verifikasi Inspektorat I, II, III dan BI; 2. Biro Keuangan & BMN Kementerian PKP; 3. Unit Organisasi; 4. Satker Terkait.

NO.	HARI / TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
		15.00 - 17.00	DESK : Verifikasi Tindak lanjut LHP BPK (dokumen administrasi dan setoran)	1. Tim Verifikasi Inspektorat I, II, III dan BI; 2. Biro Keuangan & BMN Kementerian PKP; 3. Unit Organisasi; 4. Satker Terkait
4	Kamis, 06 November 2025	08.00 - 10.00	DESK : Verifikasi Tindak lanjut LHP BPK (dokumen administrasi dan setoran)	1. Tim Verifikasi Inspektorat I, II, III dan BI; 2. Biro Keuangan & BMN Kementerian PKP; 3. Unit Organisasi; 4. Satker Terkait
		10.00 - 12.00	DESK : Verifikasi Tindak lanjut LHP BPK (dokumen administrasi dan setoran)	1. Tim Verifikasi Inspektorat I, II, III dan BI; 2. Biro Keuangan & BMN Kementerian PKP; 3. Unit Organisasi; 4. Satker Terkait
		12.00 - 13.00	ISHOMA	Panitia
		13.00 - 15.00	DESK : Verifikasi Tindak lanjut LHP BPK (dokumen administrasi dan setoran)	1. Tim Verifikasi Inspektorat I, II, III dan BI; 2. Biro Keuangan & BMN Kementerian PKP; 3. Unit Organisasi; 4. Satker Terkait
		15.00 - 17.00	DESK : Verifikasi Tindak lanjut LHP BPK (dokumen administrasi dan setoran)	1. Tim Verifikasi Inspektorat I, II, III dan BI; 2. Biro Keuangan & BMN Kementerian PKP; 3. Unit Organisasi; 4. Satker Terkait
5	Jum'at, 07 November 2025	08.00 - 12.00	DESK : Verifikasi Tindak lanjut LHP BPK (dokumen administrasi dan setoran)	1. Tim Verifikasi Inspektorat I, II, III dan BI; 2. Biro Keuangan & BMN Kementerian PKP; 3. Unit Organisasi; 4. Satker Terkait
		12.00 - 13.00	ISHOMA	Panitia
		13.00 - 15.00	DESK : Verifikasi Tindak lanjut LHP BPK (dokumen administrasi dan setoran)	1. Tim Verifikasi Inspektorat I, II, III dan BI; 2. Biro Keuangan & BMN Kementerian PKP; 3. Unit Organisasi; 4. Satker Terkait
		15.00 - 17.00	Finalisasi Draft CHV Inspektorat Jenderal	1. Tim Verifikasi Inspektorat I, II, III dan BI; 2. Biro Keuangan & BMN Kementerian PKP; 3. Unit Organisasi; 4. Satker Terkait



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

SURAT TUGAS

Nomor : 200 /SPT/Rb14.5/2025

Dalam rangka Penandatanganan Kontrak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III di Kab. Buton, dengan ini kami menugaskan pejabat/staf sebagaimana tercantum dibawah ini untuk melaksanakan tugas/perjalanan dinas dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	Pelaksana SPD	Unit Kerja	Periode Perjalanan Dinas	Tujuan	Transportasi	Pembebanan Anggaran
1	<u>Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T</u> NIP. 19870612 201001 1 013 Kepala Satuan Kerja	Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra	5 November s.d. 6 November 2025	Kota Makassar	Transportasi Udara	DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra TA 2025
2	<u>Lili Damayanto, S.T</u> NIP. 19870907 201001 1 008 PPK Ruswa, PSU, dan KP					
3	<u>Fuad Ashad Langguta, S.T.,M.Ars</u> NIP. 19890917 202521 1 058 KAUR Teknik Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman					
4	<u>Muhammad Mukhlis, ST.,M.T</u> NIP. 19870406 202521 1 068 Penata Kelola Perumahan - Ahli Pertama					

Kepada pegawai tersebut di atas agar melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan rincian Surat Tugas dan menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan perjalanan dinas.

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari, 4 November 2025

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara

Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T.
NIP. 19870612 201001 1 013

Tembusan :

1. Kepala Balai P3KP Sulawesi III;
2. Arsip.



LAPORAN PERJALANAN DINAS

Pelaksana Perjalanan Dinas : Muh. Irsan Basalamah, S.T., M.T
Lili Damayanto, S.T.
Fuad Ashad Langguta, S.T., M.Arch
Muhammad Mukhlis, ST., MT.

Tanggal Perjalanan Dinas : 5 – 6 November 2025

Tujuan Perjalanan Dinas : Kota Makassar

Keperluan Perjalanan Dinas : Dalam rangka Penandatanganan Kontrak Pekerjaan
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo
III Kab. Buton di Makassar

I. Pendahuluan

Rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan, sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh merupakan salah satu kegiatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman untuk mendukung terwujudnya program 3 juta rumah dengan meningkatkan kualitas bangunan rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Undang-undang no 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu lokasi kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh terdapat di Kawasan Dawanawajo III Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia.

II. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton dilakukan pada tanggal 5 November 2025.

III. Jadwal Kegiatan

Hari / tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
Rabu, 5 November 2025	- Perjalanan Kendari ke Makassar - Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton	
Kamis, 6 November 2025	- Perjalanan Kota Makassar ke Bau-bau	

IV. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penandatanganan Kontrak pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton adalah sebagai berikut :

- Melakukan penandatanganan Kontrak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton antara PPK dan Penyedia Jasa;
- Melakukan koordinasi dengan penyedia jasa terkait pelaksanaan di lapangan;
- Melakukan Sharing informasi terkait kondisi lokasi pekerjaan.

V. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Proses Kegiatan penandatanganan Kontrak pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton adalah sebagai berikut yaitu :

- Penandatanganan Kontrak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton :
 - Melakukan rapat dengan balai dan Satuan kerja dengan menyampaikan maksud dan tujuan penandatanganan Kontrak pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton.
 - Memdengarkan arahan terkait dengan pelaksanaan dari Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - Melakukan evaluasi terhadap masalah yang akan dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan.
- Koordinasi dengan penyedia jasa terkait pelaksanaan di lapangan:
 - Memberikan informasi, manfaat dan tujuan dilaksanakannya program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton.
 - Melakukan sharing informasi kepada penyedia jasa terkait pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton.

- Melakukan penyusunan rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton.

VI. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil penandatanganan Kontrak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton adalah sebagai berikut yaitu :

1. Melakukan penyesuaian terhadap alokasi sumber daya (anggaran, waktu, personil) yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton.
2. Memberikan informasi terkini mengenai lokasi kegiatan, tantangan yang ada, dan solusi yang mungkin untuk diterapkan dalam pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton.
3. Menentukan prioritas kegiatan, menyesuaikan jadwal, dan merumuskan strategi yang akan digunakan dalam pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton.

VII. Penutup

Demikian laporan kegiatan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 10 November 2025
Yang Melakukan Perjalanan Dinas,

Muh. Irsan Basalamah, S.T., M.T
NIP. 198706122010011013

Lili Damayanto, S.T.
NIP. 198709072010011008

Fuad Ashad Langguta, S.T., M.Arch
NIP. 198909172025211058

Muhammad Mukhlis, ST., MT
NIP. 198704062025211068



LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN PENANDATANGANAN KONTRAK PENINGKATAN KUALITAS
PERMUKIMAN KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON



PENANDATANGANAN KONTRAK PENINGKATAN KUALITAS
 PERMUKIMAN KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON



PENANDATANGANAN KONTRAK PENINGKATAN KUALITAS
 PERMUKIMAN KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON



PENANDATANGANAN KONTRAK PENINGKATAN KUALITAS
 PERMUKIMAN KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON



PENANDATANGANAN KONTRAK PENINGKATAN KUALITAS
 PERMUKIMAN KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON



PENANDATANGANAN KONTRAK PENINGKATAN KUALITAS
 PERMUKIMAN KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON



PENANDATANGANAN KONTRAK PENINGKATAN KUALITAS
 PERMUKIMAN KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI TENGGARA
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 931231

SURAT TUGAS

Nomor : 200.3 /SPT/Rb14.5/2025

Dalam rangka MC 0 Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III di Kab. Buton, dengan ini kami menugaskan pejabat/staf sebagaimana tercantum dibawah ini untuk melaksanakan tugas/perjalanan dinas dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	Pelaksana SPD	Unit Kerja	Periode Perjalanan Dinas	Tujuan	Transportasi	Pembebanan Anggaran
1	<u>Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T</u> NIP. 19870612 201001 1 013 Kepala Satuan Kerja	Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra	6 November s.d. 8 November 2025	Kab. Buton	Transportasi Udara, Laut dan Darat	DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra TA 2025
2	<u>Lili Damayanto, S.T</u> NIP. 19870907 201001 1 008 PPK Ruswa, PSU, dan KP					

Kepada pegawai tersebut di atas agar melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan rincian Surat Tugas dan menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan perjalanan dinas.

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari, 4 November 2025

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara



Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T.
NIP. 19870612 201001 1 013

Tembusan :

1. Kepala Balai P3KP Sulawesi III;
2. Arsip.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Pelaksana Perjalanan Dinas : Muh. Irsan Basalamah, S.T., M.T.
Lili Damayanto, S.T.
Tanggal Perjalanan Dinas : 6 – 8 November 2025
Tujuan Perjalanan Dinas : Kabupaten Buton
Keperluan Perjalanan Dinas : Dalam rangka MC 0 Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton

I. Pendahuluan

Rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan, sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh merupakan salah satu kegiatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman untuk mendukung terwujudnya program 3 juta rumah dengan meningkatkan kualitas bangunan rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Undang-undang no 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu lokasi kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh terdapat di Kawasan Dawanawajo III Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara yang di Lakukan oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia.

II. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan MC 0 Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton dilakukan pada tanggal 6 sampai dengan 8 November 2025.

III. Jadwal Kegiatan

Hari / tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
Kamis, 6 November 2025	- Perjalanan Makassar ke Bau-Bau/Buton - Persiapan pelaksanaan MC 0	
Jumat, 7 November 2025	- MC 0 Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton	
Sabtu, 8 November 2025	- Perjalan dari Buton ke Kendari	

IV. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan MC 0 Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan penyedia jasa terkait persiapan pelaksanaan MC 0 di lapangan;
- b. Melakukan Koordinasi dan sosialisai terhadap pemerintah setempat terkait pelaksanaan kegiatan MC 0 Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton.
- c. Melaksanakan kegiatan MC 0 Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton.

V. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Proses Kegiatan MC 0 Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan penyedia jasa terkait persiapan pelaksanaan MC 0 di lapangan;
 - Melakukan rapat dengan pemerintah setempat dengan menyampaikan maksud dan tujuan MC 0 Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton.
 - Melakukan evaluasi terhadap masalah yang akan dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan MC 0 Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton.

2. Koordinasi dengan penyedia jasa terkait pelaksanaan di lapangan:
 - Memberikan informasi, manfaat dan tujuan dilaksanakannya program MC 0 Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton.
 - Melakukan sharing informasi kepada penyedia jasa terkait pekerjaan MC 0 Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton.
3. Kegiatan MC 0 Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton:
 - Melakukan pengukuran ulang Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton.
 - Melakukan evaluasi hasil MC 0 Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton.

VI. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil pelaksanaan MC 0 Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III yaitu :

1. Terdapat perubahan volume pekerjaan, antara lain volume pekerjaan ruas jalan dan ruas paving block;
2. Perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan volume, gambar dan RAB pekerjaan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Addendum Kontrak;
3. Melakukan penyesuaian terhadap alokasi sumber daya (anggaran, waktu, personil) yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kab. Buton;
4. Kesiapan lapangan termasuk akses, bahan material dan alat pendukung lainnya tidak terdapat kendala, sehingga pekerjaan yang tidak mengalami perubahan volume dapat dilaksanakan;
5. Melakukan perbandingan hasil pengukuran MC 0 dan hasil pengukuran perencanaan sehingga menjadi dasar jika terjadi perubahan volume pekerjaan;
6. Melakukan perubahan gambar kerja berdasarkan kondisi hasil pengukuran ulang (MC0) di lapangan;
7. Titik acuan beserta batas area kerja sudah ditentukan bersama dan harus dijaga oleh semua pihak;
8. Melakukan sosialisasi ke masyarakat setempat tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan sehingga hal-hal yang mengganggu mobilisasi masyarakat tidak menjadi kendala yang dapat memperlambat progres pelaksanaan pekerjaan;

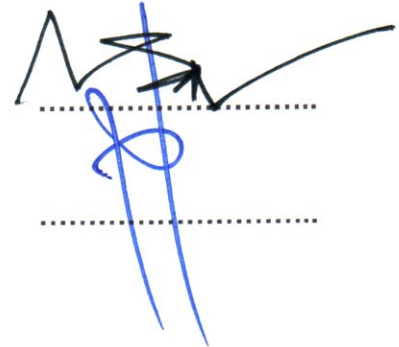
VII. Penutup

Demikian laporan kegiatan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 10 November 2025
Yang Melakukan Perjalanan Dinas,

MUH. IRSAN BASALAMAH, S.T., M.T.
NIP. 198706122010011013

LILI DAMAYANTO, S.T.
NIP. 198709072010011008

The image shows a handwritten signature in black ink on a dotted line. Below the signature, there is a blue ink scribble that also crosses the dotted line. The signature is stylized and appears to be a combination of letters and numbers.

LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN KEGIATAN MC 0 PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS
PERMUKIMAN KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON



MC 0 PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
DAWANAWAJO III KAB. BUTON



MC 0 PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON



MC 0 PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
DAWANAWAJO III KAB. BUTON



MC 0 PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON

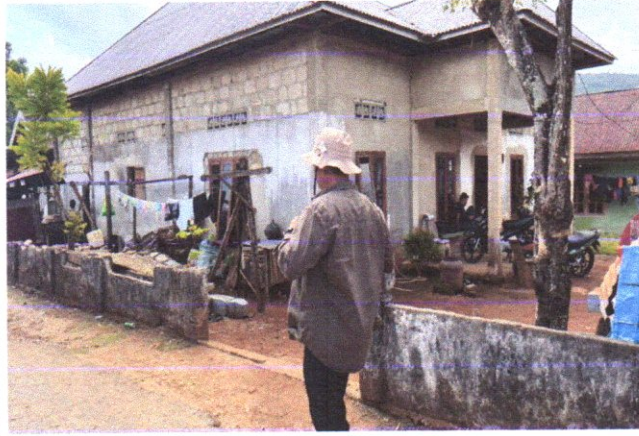


MC 0 PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
DAWANAWAJO III KAB. BUTON



MC 0 PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON

LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN KEGIATAN MC 0 PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS
PERMUKIMAN KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON



MC 0 PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
DAWANAWAJO III KAB. BUTON



MC 0 PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON



MC 0 PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
DAWANAWAJO III KAB. BUTON



MC 0 PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON



MC 0 PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
DAWANAWAJO III KAB. BUTON



MC 0 PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON

LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN KEGIATAN MC 0 PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS
PERMUKIMAN KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON



MC 0 PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
DAWANAWAJO III KAB. BUTON



MC 0 PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON



MC 0 PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
DAWANAWAJO III KAB. BUTON



MC 0 PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON



MC 0 PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
DAWANAWAJO III KAB. BUTON



MC 0 PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

SURAT TUGAS

Nomor : 204 /SPT/Rb14.5/2025

Dalam rangka Mendampingi Kasubdit Wilayah III Monitoring Kegiatan BSPS, Sanitasi dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III di Kab. Buton, dengan ini kami menugaskan pejabat/staf sebagaimana tercantum dibawah ini untuk melaksanakan tugas/perjalanan dinas dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	Pelaksana SPD	Unit Kerja	Periode Perjalanan Dinas	Tujuan	Transportasi	Pembebanan Anggaran
1	<u>Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T</u> NIP. 19870612 201001 1 013 Kepala Satuan Kerja	Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra	11 s.d. 13 November 2025	Kab. Buton	Transportasi Laut dan Darat	DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra TA 2025
2	<u>Lili Damayanto, S.T</u> NIP. 19870907 201001 1 008 PPK Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman					
3	<u>Fuad Ashad Langguta, S.T.,M.Ars</u> NIP. 19890917 202521 1 058 KAUR Teknik Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman					
4	<u>Muh. Fakhriansa Putra, S.T</u> NIP. 19980613 202506 1 013 Penata Kelola Perumahan - Ahli Pertama					
5	<u>Muhammad Ri'fal Agustira, S.Ars</u> NIP. 19950307 202506 1 010 Penata Kelola Perumahan - Ahli Pertama					
6	<u>Muhammad Mukhlis, ST.,M.T</u> NIP. 19870406 202521 1 068 Penata Kelola Perumahan - Ahli Pertama					
7	<u>Arief Dedy Susanto, S.E</u> NIP. 19880313 202521 1 063 Arsiparis - Ahli Pertama					

Kepada pegawai tersebut di atas agar melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan rincian Surat Tugas dan menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan perjalanan dinas.

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari, 10 November 2025

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara


Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T.
NIP. 19870612 201001 1 013

Tembusan :

1. Kepala Balai P3KP Sulawesi III;
2. Arsip.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Pelaksana Perjalanan Dinas : Muh. Irsan Basalamah, ST.,MT
Lili Damayanto, ST
Fuad Ashad Langguta, ST.,M.Arch
Muh. Mukhlis, ST.,MT
Muh. Fakhriansa Putra, ST
Muhammad Rifal Agustira, S.Ars
Arief Dedy Susanto, SE
Tanggal Perjalanan Dinas : 11 – 13 November 2025
Tujuan Perjalanan Dinas : Kabupaten Buton
Keperluan Perjalanan Dinas : Dalam rangka pendampingan Kasubdit Wilayah III
Direktorat Pengembangan Permukiman monitoring
kegiatan BSPS, Peningkatan Kualitas Permukiman
Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kab.
Buton

I. Pendahuluan

Rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan, sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh merupakan salah satu kegiatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman untuk mendukung terwujudnya program 3 juta rumah dengan meningkatkan kualitas bangunan rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Undang-undang no 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu lokasi kegiatan BSPS, Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah berada di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara yang di Lakukan oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia.

II. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan pendampingan Kasubdit Wilayah III Direktorat Pengembangan Permukiman monitoring kegiatan BSPS, Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kab. Buton dilakukan pada tanggal 11 sampai dengan 13 November 2025.

III. Jadwal Kegiatan

Hari / tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
Selasa, 11 November 2025	- Perjalanan Kendari ke Bau-Bau/Buton	
Rabu, 12 November 2025	- Pendampingan Kasubdit Wilayah III Direktorat Pengembangan Permukiman monitoring kegiatan BSPS, Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kab. Buton	
Kamis, 13 November 2025	- Perjalanan Baubau/Buton ke Kendari	

IV. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pendampingan Kasubdit Wilayah III Direktorat Pengembangan Permukiman monitoring kegiatan BSPS, Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kab. Buton adalah sebagai berikut :

- Melakukan Koordinasi dan sosialisai terhadap pemerintah setempat terkait pelaksanaan kegiatan BSPS, Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kab. Buton.
- Melakukan koordinasi dengan penyedia jasa terkait pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kab. Buton;
- Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Pekerjaan BSPS, Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kab. Buton.

V. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Proses Kegiatan pendampingan Kasubdit Wilayah III Direktorat Pengembangan Permukiman monitoring kegiatan BSPS, Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kab. Buton adalah sebagai berikut yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat terkait pelaksanaan kegiatan yang akan di laksanakan di Kab. Buton;
 - Melakukan rapat dengan Bupati Kab. Buton dengan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan BSPS, Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah yang dilakukan di Kab. Buton.
 - Memberikan informasi, manfaat dan tujuan dilaksanakannya program BSPS, Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah yang dilakukan di Kab. Buton.
 - Melakukan sharing informasi kepada Bupati terkait program BSPS, Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah yang dilakukan di Kab. Buton.
2. Koordinasi dengan penyedia jasa terkait pelaksanaan di lapangan :
 - Melakukan evaluasi terhadap masalah yang akan dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan kegiatan BSPS, Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kab. Buton.
 - Melakukan sharing informasi kepada penyedia jasa terkait pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah yang dilakukan di Kab. Buton.
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan BSPS, Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kab. Buton :
 - Melakukan pengecekan ulang Pekerjaan BSPS, Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kab. Buton.
 - Melakukan evaluasi hasil pengecekan ulang Pekerjaan BSPS, Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kab. Buton.

VI. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan BSPS, Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kab. Buton yaitu :

1. Terdapat perubahan volume pekerjaan, antara lain volume pekerjaan ruas jalan dan ruas paving block;
2. Perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan volume, gambar dan RAB pekerjaan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Addendum Kontrak;

3. Melakukan penyesuaian terhadap alokasi sumber daya (anggaran, waktu, personil) yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kab. Buton;
4. Kesiapan lapangan termasuk akses, bahan material dan alat pendukung lainnya tidak mengalami kendala sehingga pekerjaan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kab. Buton yang tidak mengalami perubahan volume dapat dilaksanakan;
5. Melakukan perubahan gambar kerja berdasarkan kondisi hasil pengukuran ulang pekerjaan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kab. Buton;
6. Melakukan sosialisasi ke masyarakat setempat tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan sehingga hal-hal yang mengganggu mobilisasi masyarakat tidak menjadi kendala yang dapat memperlambat progres pelaksanaan pekerjaan;

VII. Penutup

Demikian laporan kegiatan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 14 November 2025
Yang Melakukan Perjalanan Dinas,

Muh. Irsan Basalamah, ST.,MT
NIP. 198706122010011013

Lili Damayanto, ST
NIP. 198709072010011008

Fuad Ashad Langguta, ST.,M.Arch
NIP. 198909172021211058

Muh. Fakhriansah Putra, ST
NIP. 199806132025061013

Muhammad Rifal Agustira, S.Ars
NIP. 199503072025061010

Muh. Mukhlis, ST.,MT
NIP. 198704062025211068

Arief Dedy Susanto, SE
NIP. 198803132025211063

LAMPIRAN
DOKUMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEKERJAAN BSPS, PENINGKATAN
KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DAN PENINGKATAN KUALITAS SANITASI RUMAH DI
KAB. BUTON



MONEV PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON



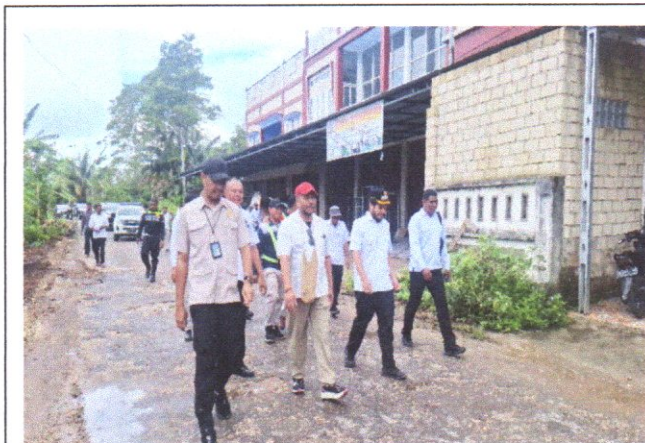
MONEV PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON



MONEV PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON



MONEV PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
KUMUH DAWANAWAJO III KAB. BUTON



MC 0 PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
DAWANAWAJO III KAB. BUTON

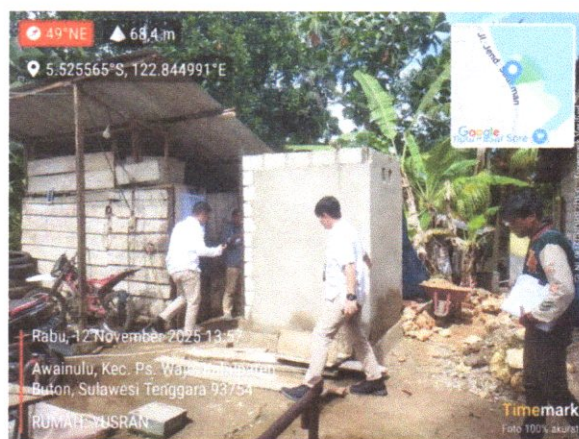


MC 0 PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
DAWANAWAJO III KAB. BUTON

LAMPIRAN
DOKUMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEKERJAAN BSPTS, PENINGKATAN
KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DAN PENINGKATAN KUALITAS SANITASI RUMAH DI
KAB. BUTON



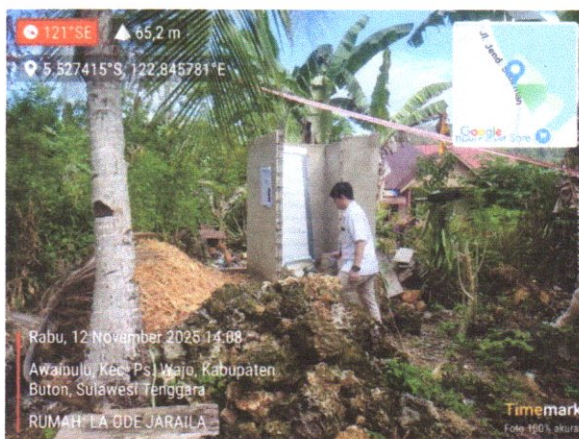
MONEV PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS SANITASI RUMAH
KAB. BUTON



MONEV PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS SANITASI RUMAH
KAB. BUTON



MONEV PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS SANITASI RUMAH
KAB. BUTON



MONEV PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS SANITASI RUMAH
KAB. BUTON



MONEV PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS SANITASI RUMAH
KAB. BUTON



MONEV PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS SANITASI RUMAH
KAB. BUTON

LAMPIRAN
DOKUMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEKERJAAN BSPTS, PENINGKATAN
KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DAN PENINGKATAN KUALITAS SANITASI RUMAH DI
KAB. BUTON



MONEV PEKERJAAN BSPTS KAB. BUTON



MONEV PEKERJAAN BSPTS KAB. BUTON



MONEV PEKERJAAN BSPTS KAB. BUTON



MONEV PEKERJAAN BSPTS KAB. BUTON



MONEV PEKERJAAN BSPTS KAB. BUTON



MONEV PEKERJAAN BSPTS KAB. BUTON



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

SURAT TUGAS

Nomor : 206 /SPT/Rb14.5/2025

[Handwritten signature]

Dalam rangka Koordinasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kabupaten . Buton di Direktorat Kawasan Permukiman, dengan ini kami menugaskan pejabat/staf sebagaimana tercantum dibawah ini untuk melaksanakan tugas/perjalanan dinas dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	Pelaksana SPD	Unit Kerja	Periode Perjalanan Dinas	Tujuan	Transportasi	Pembebanan Anggaran
1	<u>Muh.Irsan Basalamah, S.T., M.T</u> NIP. 19870612 201001 1 013 Kepala Satuan Kerja.	Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra	13 November s.d. 15 November 2025	Jakarta	Transportasi Udara	DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra TA 2025

Kepada pegawai tersebut di atas agar melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan rincian Surat Tugas dan menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan perjalanan dinas.

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari, 12 November 2025

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara

Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T.
NIP. 19870612 201001 1 013

Tembusan :

1. Kepala Balai P3KP Sulawesi III;
2. Arsip.

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Pelaksana Perjalanan : - Muh Irsan Basalamah, S.T., M.T

Dinas

Tanggal Perjalanan Dinas : 13 - 15 November 2025

Tujuan Perjalanan Dinas : Direktorat Kawasan Permukiman Jl. Raden Fatah 1.
Nomor 1, Selong Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
12110.

Keperluan Perjalanan : Dalam rangka Koordinasi Peningkatan Kualitas
Dinas Permukiman Kumuh Dawanawajo III Kabupaten
Buton di Direktorat Kawasan Permukiman
Kementerian Perumahan dan Kawasan
Permukiman.

I. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan kawasan permukiman kumuh, Direktorat Kawasan Permukiman pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan kegiatan koordinasi terkait Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di kawasan **Dawanawajo III, Kabupaten Buton**. Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan persepsi, menyelaraskan program, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni, sehat, dan berkelanjutan.

Koordinasi ini juga menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan perencanaan, ketersediaan data, serta pelaksanaan program peningkatan kualitas permukiman kumuh dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kebijakan nasional penanganan permukiman kumuh. Dengan demikian, diharapkan intervensi yang dilakukan di kawasan Dawanawajo III dapat memberikan dampak yang optimal bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.

II. Jadwal Kegiatan

No	Hari, Tanggal	Kegiatan
1	Kamis, 13 November 2025	• Perjalanan dinas dari Baubau ke Jakarta, berangkat dari kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, menuju Jakarta, Provinsi DKI Jakarta Menggunakan Angkutan Udara melalui Bandara Betoambari Baubau menuju Bandar Udara Int Soekarno-Hatta. • Menuju ke Kantor Ditjen Kawasan Permukiman dalam rangka Koordinasi. • Balik Menuju Hotel.
2	JUmat, 14 November 2025	• Menuju ke Kantor Ditjen Kawasan Permukiman dalam rangka Koordinasi. • Balik Menuju Hotel.
3	Sabtu, 15 November 2025	• Balik Menuju ke Kota Kendari.

III. Rangkaian Kegiatan

Tujuan Koordinasi

Koordinasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III, Kabupaten Buton, yang dilakukan oleh Direktorat Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, memiliki beberapa tujuan utama sebagai berikut:

1. **Menyelaraskan kebijakan dan program** antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam penanganan permukiman kumuh di kawasan Dawanawajo III.
2. **Mengidentifikasi kondisi eksisting kawasan** secara komprehensif untuk memastikan intervensi yang direncanakan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. **Mengkoordinasikan rencana kerja dan pembagian peran** antarinstansi agar proses perencanaan dan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh dapat berjalan efektif dan efisien.
4. **Menginventarisasi kebutuhan, potensi, serta kendala** dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas permukiman sehingga dapat dirumuskan solusi yang tepat.
5. **Menyusun rencana tindak lanjut yang terarah dan realistis** sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh di Dawanawajo III secara terintegrasi dan berkelanjutan.
6. **Memperkuat komitmen bersama** dalam upaya mewujudkan permukiman yang layak huni, sehat, dan memiliki kualitas lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat setempat.

PELAKSANA PERJALANAN DINAS

Kendari, 17 November 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	<u>Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T</u> NIP. 19870612 201001 1 013	Kepala Satuan Kerja	

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

	
Koordinasi ke Kantor Ditjen Kawasan Permukiman	Koordinasi ke Kantor Ditjen Kawasan Permukiman



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

SURAT TUGAS

Nomor : 210 /SPT/Rb14.5/2025

Dalam rangka Menghadiri Undangan Raker Komisi V DPR RI dan Koordinasi Ke Kantor Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Terkait Usulan Pekerjaan Tahun Anggaran 2026, dengan ini kami menugaskan pejabat/staf sebagaimana tercantum dibawah ini untuk melaksanakan tugas/perjalanan dinas dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	Pelaksana SPD	Unit Kerja	Periode Perjalanan Dinas	Tujuan	Transportasi	Pembebanan Anggaran
1	<u>Muh.Irsan Basalamah, S.T., M.T</u> NIP. 19870612 201001 1 013 Kepala Satuan Kerja.	Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra	18 s.d. 21 November 2025	Jakarta	Transportasi Udara	DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra TA 2025

Kepada pegawai tersebut di atas agar melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan rincian Surat Tugas dan menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan perjalanan dinas.

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari, 18 November 2025

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara


Muh. Irsan Basalamah, S.T., M.T.
NIP. 19870612 201001 1 013

Tembusan :

1. Kepala Balai P3KP Sulawesi III;
2. Arsip.

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Pelaksana Perjalanan : - Muh Irsan Basalamah, S.T., M.T

Dinas

Tanggal Perjalanan Dinas : 18 - 21 November 2025

Tujuan Perjalanan Dinas : Ruang Rapat Komisi V DPR RI (KK-V) Gedung Nusantara Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta dan Direktorat Kawasan Permukiman Jl. Raden Fatah 1. Nomor 1, Selong Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110.

Keperluan Perjalanan : Dalam rangka Menghadiri Undangan Raker Komisi V DPR RI dan Koordinasi Ke Kantor Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Terkait Usulan Pekerjaan Tahun Anggaran 2026.

I. Pendahuluan

Dalam rangka menghadiri Undangan Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI terkait pembahasan Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan November 2025 serta pembahasan Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2026, diperlukan penyampaian data, informasi, dan bahan pendukung yang komprehensif. Selain itu, kegiatan koordinasi juga dilaksanakan ke Kantor Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, guna membahas dan memverifikasi usulan pekerjaan untuk Tahun Anggaran 2026. Koordinasi ini bertujuan memastikan keselarasan antara kebutuhan program, prioritas pembangunan kawasan permukiman.

II. Jadwal Kegiatan

No	Hari, Tanggal	Kegiatan
1	Selasa, 18 November 2025	• Perjalanan dinas dari Kendari ke Jakarta, berangkat dari kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, menuju Jakarta, Menggunakan Angkutan Udara melalui Bandara Haluoleo menuju Bandar Udara Int Soekarno-Hatta. • Menuju ke Hotel.
2	Rabu, 19 November 2025	• Menuju ke Kantor DPR RI, Menghadiri Acara Rapat Kerja Bersama Komisi V DPR. • Balik Menuju Hotel.
3	Kamis, 20 November 2025	• Menuju ke Kantor Ditjen Kawasan Permukiman Untuk Koordinasi. • Balik Menuju Hotel.
4	Jumat, 21 November 2025	• Balik Menuju ke Kota Kendari

III. Rangkaian Kegiatan

Tujuan Rapat dan Koordinasi.

Kegiatan menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dan melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menyampaikan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan November 2025, khususnya terkait capaian kinerja program BSPS, Sanitasi, Penanganan Kawasan Kumuh, Rumah Susun, dan Rumah Khusus.
2. Mendapatkan arahan, masukan, dan tanggapan dari Komisi V DPR RI sebagai mitra kerja dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kualitas capaian program di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
3. Membahas rencana program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026, meliputi usulan kebutuhan, prioritas, target, serta perkiraan pagu indikatif untuk program BSPS, Sanitasi, Kawasan Kumuh, Rumah Susun, dan Rumah Khusus.
4. Melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman terkait verifikasi, sinkronisasi, dan penyelarasan usulan pekerjaan Tahun Anggaran 2026 sehingga sesuai dengan kebijakan nasional, kebutuhan daerah, serta ketersediaan anggaran.
5. Memastikan bahwa usulan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 telah memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan standar perencanaan, serta mendukung prioritas pembangunan permukiman yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan integrasi dan efektivitas perencanaan program melalui komunikasi antarinstansi, sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran mendatang dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan tepat sasaran.

IV. Penutup

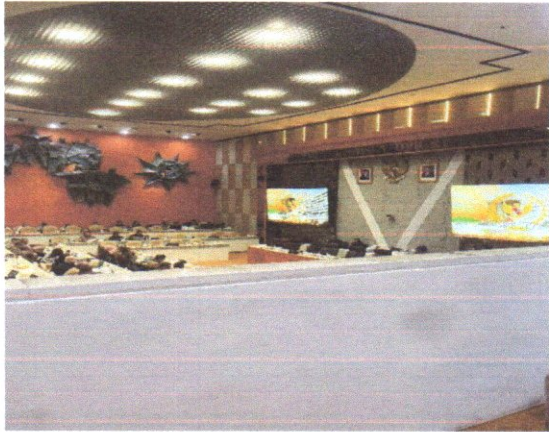
Demikian laporan perjalanan dinas ini disusun sebagai bahan pertanggung jawaban kegiatan serta acuan dalam penyempurnaan pelaksanaan program kedepan.

PELAKSANA PERJALANAN DINAS

Kendari, 24 November 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	<u>Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T</u> NIP. 19870612 201001 1 013	Kepala Satuan Kerja	

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

	
Raker Komisi V DPR RI	Raker Komisi V DPR RI

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Wisma Mandiri 2, Jl. Kebon Sirih No.83, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta, 10340

Nomor : UM0102-Sj/1250 Jakarta, 17 November 2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Raker Komisi V DPR RI

Yth. Para Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
di tempat

Sehubungan dengan Surat Wakil Ketua DPR RI/KORINBANG Nomor B/16698/PW.01/11/2025 tanggal 12 November 2025 hal Perubahan Raker Komisi V DPR RI Tanggal 13 November 2025, bersama ini kami mengharapkan Bapak/Ibu untuk turut hadir dalam rapat kerja dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 19 November 2025
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI (KK-V)
Gedung Nusantara
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta
Agenda : 1. Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2025 sampai dengan bulan November 2025.
2. Pembahasan Rencana Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2026.
Dress code : Batik Lengan Panjang

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman



Didyk Choiroel, S.Sos., M.Si
NIP 197104161992011001

Tembusan :
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman



00037 - 00040

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No.1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari - Kode Pos : 93231

SURAT TUGAS

Nomor : 216.1 /SPT/Rb14.5/2025

Dalam rangka Mendampingi Tim Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan dan Tim Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Resiko Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BSPS di Kota Kendari, dengan ini kami menugaskan pejabat/staf sebagaimana tercantum dibawah ini untuk melaksanakan tugas/perjalanan dinas dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	Pelaksana SPD	Unit Kerja	Periode Perjalanan Dinas	Tujuan	Transportasi	Pembebanan Anggaran
1	<u>Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T</u> NIP. 19870612 201001 1 013 Kepala Satuan Kerja	Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra	27 s.d 28 November 2025	Kota Kendari	Transportasi Darat	DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra TA 2025
2	<u>Hamka Thahir, S.Ars</u> NIP. 19820101 201408 1 004 KAUR Teknik Randal					
3	<u>Arief Dedy Susanto, S.E</u> NIP. 19880313 202521 1 063 Arsiparis - Ahli Pertama					
4	<u>Lewi Patiung, S.T</u> NIP. 19890105 202521 1 046 Penata Layanan Operasional					

Kepada pegawai tersebut di atas agar melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan rincian Surat Tugas dan menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan perjalanan dinas.

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari, 26 November 2025

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara

Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T.
NIP. 19870612 201001 1 013

Tembusan :

1. Kepala Balai P3KP Sulawesi III;
2. Arsip.



LAPORAN PERJALANAN DINAS

Pelaksana Perjalanan Dinas : - Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T
- Hamka Thahir, S.Ars
- Arief Dedy Susanto, S.E
- Lewi Patiung, S.T.

Tanggal Perjalanan Dinas : 27 November – 28 November 2025

Tujuan Perjalanan Dinas : Kota Kendari

Keperluan Perjalanan Dinas : Mendampingi Tim Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan dan Tim Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Resiko Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BPS di Kota Kendari

I. Pendahuluan

Dalam rangka melakukan Pendampingan kepada Tim Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan dan Tim Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Resiko Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BPS di Kota Kendari.

II. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan Tim Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan dan Tim Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Resiko Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BPS di Kota Kendari dilaksanakan pada tanggal 27 November -28 November 2025 di Kota Kendari.

III. Jadwal Kegiatan

Hari / tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
Kamis, 27 November 2025	- Menjemput Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan beserta Tim di Bandara Haluoleo.	

	dan Evaluasi kegiatan BSPS kepada Tim Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Resiko di Kota Kendari	
Jumat, 28 November 2025	- Mengantar Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan beserta Tim di Bandara Haluoleo.	

IV. Rangkaian Kegiatan

Rangkaian Kegiatan Pendampingan kepada Tim Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan dan Tim Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Resiko Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BSPS di Kota Kendari adalah sebagai berikut:

1. Menjemput Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan beserta Tim di Bandara Haluoleo.
2. Melakukan Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan BSPS kepada Tim Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Resiko di Kota Kendari
3. Mengantar Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan beserta Tim di Bandara Haluoleo.

V. Permasalahan

Tidak ada permasalahan, semua Proses Pendampingan berjalan dengan lancar, baik dan efektif.

VI. Tindak Lanjut

-

VII. Penutup

Demikian laporan kegiatan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 1 Desember 2025

Yang Melakukan Perjalanan Dinas,

Muh. Irsan Basalamah, S.T., M.T
NIP. 19870612 201001 1 013

Hamka Thahir, S.Ars
NIP. 19820101 201408 1 004

Arief Dedy Susanto, S.E
NIP. 19880313 202521 1 063

Lewi Patiung, ST
NIP. 19890105 202521 1 046



DOKUMENTASI KEGIATAN

Mendampingi Tim Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan dan Tim Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Resiko Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BSPS di Kota Kendari 27 – 28 November 2025



**DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No. 1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari – Kode Pos : 93231

SURAT TUGAS

00081

Nomor : 225.2 /ST/Rb14.5/2025

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi BSPS Bersama dengan Tim Subdit Wilayah III Direktorat Bankim Kawasan Permukiman di Kabupaten Konawe Selatan, dengan ini kami menugaskan pejabat/staf sebagaimana tercantum dibawah ini untuk melaksanakan tugas/perjalanan dinas dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	Pelaksana SPD	Unit Kerja	Periode Perjalanan Dinas	Tujuan	Transportasi	Pembebanan Anggaran
1	<u>Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T</u> NIP. 19870612 201001 1 013 Kepala Satuan Kerja	Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra	10 Desember 2025	Kab. Konawe Selatan	Transportasi Darat	DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra TA 2025
2	<u>Arief Dedy Susanto, S.E</u> NIP. 19880313 202521 1 063 Arsiparis - Ahli Pertama					
3	<u>Muh. Asraf Kasim S.Ars</u> TA Manajemen BSPS					

Kepada pegawai tersebut di atas agar melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan rincian Surat Tugas dan menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan perjalanan dinas.

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari, 9 Desember 2025

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara**Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T.**
NIP. 19870612 201001 1 013**Tembusan :**

1. Kepala Balai P3KP Sulawesi III;
2. Arsip.



DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No. 1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari – Kode Pos : 93231

LAPORAN PERJALANAN

Kepada Yth : Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
Dari : Pelaksana Perjalanan Dinas
Hal : Monitoring dan Evaluasi BSPS Bersama dengan Tim Subdit Wilayah III Direktorat Bankim Kawasan Permukiman di Kabupaten Konawe Selatan
Lampiran : 4 (empat) lembar
Tanggal : 11 Desember 2025

Menindaklanjuti Surat Tugas Nomor 225.2/SPT/Rb14.5/2025 tanggal 9 Desember 2025 Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi BSPS Bersama dengan Tim Subdit Wilayah III Direktorat Bankim Kawasan Permukiman di Kabupaten Konawe Selatan, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Latar Belakang

- a. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu program strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah dan lingkungan hunian melalui pemberian bantuan stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pelaksanaan BSPS membutuhkan pemantauan yang berkelanjutan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, sesuai ketentuan teknis, serta mampu mencapai output dan outcome yang diharapkan, yaitu terwujudnya rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang lebih sehat dan aman.
- b. Sebagai bagian dari pengawasan dan peningkatan kualitas pelaksanaan BSPS di daerah, Tim Subdirektorat Wilayah III, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (Bankim) melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) di Kabupaten Konawe Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa proses perencanaan, penyaluran, penggunaan anggaran, pelaksanaan fisik, serta pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai pedoman umum dan petunjuk teknis BSPS.
- c. Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu daerah penerima program BSPS dengan sebaran lokasi dan jumlah penerima bantuan yang cukup besar, sehingga diperlukan pendampingan intensif untuk mengantisipasi berbagai kendala teknis, administratif, dan sosial, termasuk kesiapan kelompok penerima bantuan, ketersediaan material, kemampuan swadaya, serta dukungan pemerintah daerah.

2. Tujuan

- a. Melihat progres fisik dan administrasi pelaksanaan BSPS pada lokasi yang telah ditetapkan.
- b. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang muncul di lapangan dan merumuskan solusi bersama.
- c. Memberikan pembinaan teknis kepada Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) serta kelompok penerima bantuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai standar.

- d. Memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas program.
- e. Mengumpulkan data dan rekomendasi sebagai dasar perbaikan kebijakan dan pelaksanaan BSPS di periode berikutnya.

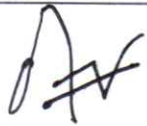
1. Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari, tanggal 10 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Hari, Tanggal	Kegiatan
1	Rabu, 10 Desember 2025	• Perjalanan menuju Kabupaten Konawe Selatan Desa Lamokula, dengan menggunakan Transportasi darat dari Kota Kendari. • Melakukan Monitoring dan Evaluasi BspS di Desa Lamokula Bersama Tim Bankim. • Melakukan Wawancara ke Penerima Bantuan Tentang Sejauh Mana mereka memahami Program BSPS dan apa saja keswadayaan yang mereka lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu. • Balik Menuju Kota Kendari.

2. Hal-hal yang dapat disampaikan dari kegiatan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan monitoring dan evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Konawe Selatan telah dilaksanakan bersama Tim Subdit Wilayah III Direktorat Bankim Kawasan Permukiman. Pelaksanaan monev difokuskan pada peninjauan progres pembangunan rumah penerima bantuan serta memastikan kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan pedoman teknis BSPS.
- Hasil monev menunjukkan bahwa sebagian besar unit rumah yang mendapat bantuan telah direalisasikan sesuai rencana, baik dari segi kualitas konstruksi, pemanfaatan bahan bangunan, maupun keterlibatan swadaya masyarakat. Tim juga mengidentifikasi beberapa kendala teknis seperti lambatnya distribusi material di beberapa lokasi serta kebutuhan pendampingan lanjutan pada kelompok penerima bantuan tertentu.
- Secara umum, kegiatan monev ini memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian pelaksanaan BSPS di Kabupaten Konawe Selatan sekaligus menjadi dasar untuk peningkatan efektivitas program pada periode berikutnya. Rekomendasi teknis telah disampaikan kepada pemerintah daerah dan tenaga pendamping agar pelaksanaan BSPS dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Pelaksana Perjalanan Dinas.

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T NIP. 19870612 201001 1 013	Kepala Satuan Kerja	
2.	Arief Dedy Susanto, S.E NIP. 19880313 202521 1 063	Arsiparis Ahli Pertama	
3.	Muh. Asraf Kasim S.Ars	TA Manajemen BSPS	

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN



Monev Desa Lamokula



Monev Desa Lamokula



Monev Desa Lamokula



Monev Desa Lamokula



Monev Desa Lamokula



Monev Desa Lamokula



DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No. 1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari – Kode Pos : 93231

SURAT TUGAS

Nomor : 229.4 /ST/Rb14.5/2025

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Dawanawajo III di Kab. Buton, dengan ini kami menugaskan pejabat/staf sebagaimana tercantum dibawah ini untuk melaksanakan tugas/perjalanan dinas dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	Pelaksana SPD	Unit Kerja	Periode Perjalanan Dinas	Tujuan	Transportasi	Pembebanan Anggaran
1	Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T NIP. 19870612 201001 1 013 Kepala Satuan Kerja	Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra	16 - 18 Desember 2025	Kab. Buton	Transportasi Laut dan Darat	DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra TA 2025
2	Laode Sirafin Sarini, S.T NIP. 19910725 202421 1 003 Penata Kelola Perumahan - Ahli Pertama					

Kepada pegawai tersebut di atas agar melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan rincian Surat Tugas dan menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan perjalanan dinas.

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari, 15 Desember 2025

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara**Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T.**
NIP. 19870612 201001 1 013**Tembusan :**

1. Kepala Balai P3KP Sulawesi III;
2. Arsip.



DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No. 1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari – Kode Pos : 93231

LAPORAN PERJALANAN

Pelaksana Perjalanan Dinas : 1. MUH. IRSAN BASALAMAH, S.T.,MT.
2. LAODE SIRAFIN SARINI, S.T.
Tanggal Perjalanan Dinas : 16 - 18 Desember 2025
Tujuan Perjalanan Dinas : Kabupaten Buton
Keperluan Perjalanan Dinas : Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Dawanawajo III di Kabupaten Buton

Menindaklanjuti Surat Tugas Nomor 229.4/SPT/Rb14.5/2025 tanggal 15 Desember 2025 dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Dawanawajo III di Kabupaten Buton, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Dalam rangka memastikan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh berjalan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi teknis, telah dilaksanakan perjalanan dinas untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di lokasi Dawanawajo III, Kabupaten Buton. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan, pengendalian mutu pekerjaan, serta penilaian kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan yang berlaku.

2. Tujuan

- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Buton.
- Menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas kawasan kumuh dengan spesifikasi teknis dan peraturan yang berlaku.
- Mengidentifikasi permasalahan dan temuan di lapangan sebagai dasar perbaikan dan tindak lanjut.
- Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pelaksana kegiatan.
- Menyusun laporan hasil monitoring sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.

3. Uraian Kegiatan

Dilaksanakan selama 3 hari, tanggal 16 s.d 18 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Hari, Tanggal	Kegiatan
1	Selasa, 16 Desember 2025	Berangkat dari Kota Kendari menuju Kabupaten Buton dilakukan dengan menggunakan Transportasi Laut pelabuhan Murhum Kota Baubau.

No	Hari, Tanggal	Kegiatan
2	Rabu, 17 Desember 2025	• Tiba di Kabupaten Buton dan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi di lokasi Dawanawajo III, meliputi peninjauan langsung kegiatan peningkatan kualitas kumuh. • Monitoring pelaksanaan program BSPS pada rumah penerima bantuan di Desa Takimpo Kabupaten Buton. • Wawancara singkat dengan pelaksana kegiatan dan masyarakat penerima manfaat.
3.	Kamis, 18 Desember 2025	• Perjalanan Kembali ke Kota Kendari dengan transportasi Laut dari Pelabuhan Murhum Baubau ke kota Kendari.

4. Hasil dan Temuan Lapangan

Berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi di lapangan, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh di Dawanawajo III
 - a) Beberapa ruas jalan lingkungan yang menggunakan Paving blok ditemukan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, dimana sebagian paving blok dipatahkan untuk menyesuaikan ukuran pemasangan.
 - b) Dasar pasir pada pekerjaan paving blok ditemukan kurang dari ketebalan spesifikasi yang telah ditetapkan, sehingga berpotensi mempengaruhi kualitas dan ketahanan konstruksi.
 - c) Pekerjaan aspal, direncanakan percepatan pelaksanaan pengaspalan yang dijadwalkan pada tanggal 20 Desember 2025.
 - d) Pembangunan bilik sanitasi di percepat finishingnya, namun perlu dipastikan seluruh tahapan pekerjaan di sesuaikan dengan ketentuan teknis serta mengacu pada aturan dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam gambar rencana (shop drawing) yang telah di setujui.
2. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
 - a) Ditemukan beberapa penerima bantuan (PB) yang belum mencapai progres fisik 100% dari laporan Rumah sudah terbangun 100%

5. Kesimpulan

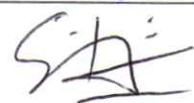
Berdasarkan hasil monitoing dan Evaluasi yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksana kegiatan pengingkatan kualitas kawasah kumuh di Dawanawajo III masih memerlukan perbaikan agar sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan yang berlaku.
2. Temuan pada pekerjaan paving blok menunjukan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap mutu dan metode pelaksanaan pekerjaan.
3. Pelaksanaan BSPS pada umumnya berjalan, namun terdapat beberapa kasus rumah yang belum mencapai 100% dikarenakan komponen rumah seperti jendela belum terpasang.

6. Penutup

Demikian laporan perjalanan dinas ini disusun sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksana kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Dawanawajo III di Kabupaten Buton. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar tindak lanjut perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program ke depannya.

Pelaksana Perjalanan Dinas

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MUH. IRSAN BASALMAH, S.T.,M.T. NIP. 19870612 2010011013	Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara	
2.	LAODE SIRAFIN SARINI, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No. 1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari – Kode Pos : 93231

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Dawanawajo III di Kabupaten Buton



Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Dawanawajo III di Kabupaten Buton



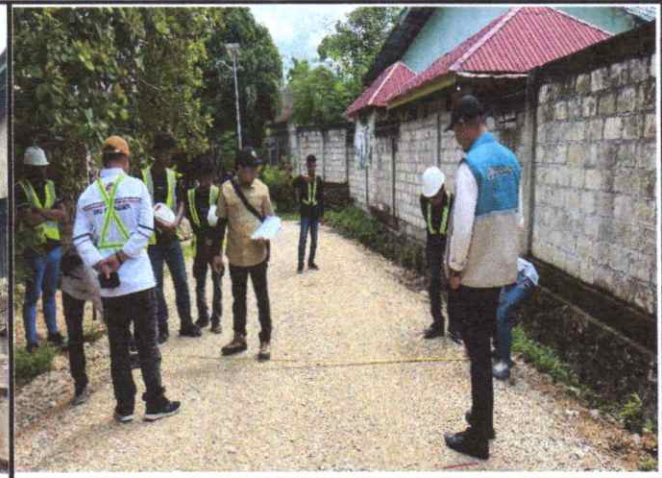
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Dawanawajo III di Kabupaten Buton



Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan
Kumuh Dawanawajo III di Kabupaten Buton



Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan
Kumuh Dawanawajo III di Kabupaten Buton



Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan
Kumuh Dawanawajo III di Kabupaten Buton





DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Malaka Kompleks Ruko Spazia Citraland Blok K1 No. 1 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari – Kode Pos : 93231

SURAT TUGAS

Nomor : 236.7 /ST/Rb14.5/2025

Dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Peningkatan Kualitas Sanitasi dan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Parsial Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Dawanawajo III di Kabupaten Buton, dengan ini kami menugaskan pejabat/staf sebagaimana tercantum dibawah ini untuk melaksanakan tugas/perjalanan dinas dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	Pelaksana SPD	Unit Kerja	Periode Perjalanan Dinas	Tujuan	Transportasi	Pembebanan Anggaran
1	<u>Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T</u> NIP. 19870612 201001 1 013 Kepala Satuan Kerja	Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra	28 s.d. 29 Desember 2025	Kab. Buton	Transportasi Laut dan Darat	DIPA Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sultra TA 2025

Kepada pegawai tersebut di atas agar melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan rincian Surat Tugas dan menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan perjalanan dinas.

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendari, 24 Desember 2025

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Tenggara**Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T.**
NIP. 19870612 201001 1 013**Tembusan :**

1. Kepala Balai P3KP Sulawesi III;
2. Arsip.



LAPORAN PERJALANAN

Pelaksana Perjalanan Dinas : 1. Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T
Tanggal Perjalanan Dinas : 28 - 29 Desember 2025
Tujuan Perjalanan Dinas : Kabupaten Buton
Keperluan Perjalanan Dinas : Dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Peningkatan Kualitas Sanitasi dan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Parsial Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Dawanawajo III di Kabupaten Buton

Menindaklanjuti Surat Tugas Nomor 236.7/ST/Rb14.5/2025 tanggal 24 Desember 2025 Dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Peningkatan Kualitas Sanitasi dan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Parsial Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Dawanawajo III di Kabupaten Buton, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kabupaten Wajo berjalan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi teknis, telah dilaksanakan perjalanan dinas untuk melakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Peningkatan Kualitas Sanitasi dan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Parsial Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Dawanawajo III di Kabupaten Buton. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan, pengendalian mutu pekerjaan, serta penilaian kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan yang berlaku.

2. Tujuan

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III di Kabupaten Buton
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kabupaten Buton
- c. Melakukan pemeriksaan administrasi persiapan PHO Parsial Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Dawanawajo III di Kabupaten Buton
- d. Melakukan pemeriksaan administrasi persiapan PHO Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kabupaten Buton

3. Uraian Kegiatan

Dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 28 s.d 29 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Hari, Tanggal	Kegiatan
1	Minggu, 28 Desember 2025	• Berangkat dari Kota Kendari ke Kota Bau-Bau menggunakan transportasi Laut • Perjalanan ke kab. Buton menggunakan transportasi Darat • Melaksanakan rapat koordinasi dengan konsultan dan kontraktor mengenai pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan kegiatan peningkatan kualitas sanitasi rumah • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh meliputi pemeriksaan pekerjaan jalan paving block • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas sanitasi rumah
2	Senin, 29 Desember 2025	• Melaksanakan rapat koordinasi dengan konsultan dan kontraktor mengenai pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan kegiatan peningkatan kualitas sanitasi rumah • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh meliputi pemeriksaan pekerjaan jalan aspal serta saluran • Perjalanan Kembali ke Kota Kendari dari Kota Bau-Bau menggunakan transportasi Laut

4. Hasil dan Temuan Lapangan

Berdasarkan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan PHO Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah dan PHO Parsial Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dawanawajo III di Kab. Buton yaitu Beberapa ruas jalan lingkungan yang menggunakan Paving Blok ditemukan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau mengalami kerusakan
- b. Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kab. Buton yaitu Masih ditemukan beberapa pekerjaan bilik yang belum sesuai dengan spesifikasi teknis atau mengalami kerusakan

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pelaksana kegiatan peningkatan kualitas kawasan kumuh di Dawanawajo III masih memerlukan perbaikan agar sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan yang berlaku.
- b. Pelaksana kegiatan peningkatan kualitas sanitasi rumah masih memerlukan perbaikan agar sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan yang berlaku.

6. Penutup

Demikian laporan perjalanan dinas ini disusun sebagai bahan pertanggung jawaban Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Peningkatan Kualitas Sanitasi dan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Parsial Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Dawanawajo III di Kabupaten Buton. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar tindak lanjut perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program ke depannya.

Pelaksana Perjalanan Dinas

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Muh. Irsan Basalamah, S.T.,M.T NIP. 19860619 201101 2 015	Kepala Satuan Kerja PKP Sulawesi Tenggara	

LAMPIRAN

DOKUMENTASI SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO) PENINGKATAN KUALITAS SANITASI DAN SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO) PARTIAL PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH DAWANAWAJO III DI KAB. BUTON



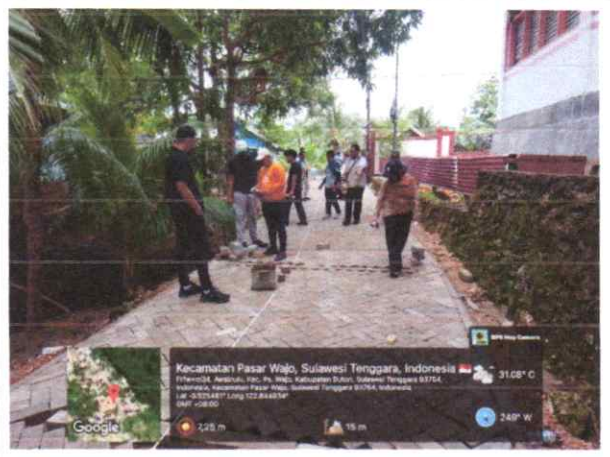
MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN JALAN PAVING BLOCK



MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN JALAN PAVING BLOCK



MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN BILIK KEGIATAN
PENINGKATAN KUALITAS SANITASI RUMAH



MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN JALAN PAVING BLOCK



MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN JALAN ASPAL



MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN ASPAL